



LAPORAN KINERJA TAHUN 2018



PADANG, JANUARI 2019
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-NYA Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat diselesaikan penyusunannya dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2018 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2018 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 di sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Penyajian Laporan ini disusun secara sistematis agar dapat memberi gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2018.

Selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dilingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik ditahun mendatang.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan reformasi dibidang Kehutanan melalui upaya penataan organisasi, penyempurnaan

proses ketatalaksanaan serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan secara konsisten.

Akhir kata, LKj Tahun Anggaran 2018 ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Barat dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Padang, Januari 2019
Kepala Dinas Kehutanan



YOZARWARDI. UP, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690406 199701 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2018 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas sepuluh yaitu Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana pada RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Untuk mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan di atas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan Visi Gubernur Sumatera Barat yang secara sistematis tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 “Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera” dan Misi 5 Gubernur Sumatera Barat yaitu “Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan Serta Berwawasan Lingkungan”.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Barat di atas maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun (2016-2021) sebagai berikut:

Tujuan:

1. Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi

Sasaran Strategis:

1. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
2. Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat
3. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat
4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Ke empat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur melalui sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicapai dengan 95 target kinerja kegiatan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN terdiri dari 94 kegiatan sumber dana APBD, 1 kegiatan sumber dana APBN.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama Tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah 126.43% yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Kode
1.	Terwujudnya nilai pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100	
		Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	82%	92.93%	113.33	
		Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan	82%	76.26%	93	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi I					102.11	
2.	Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	Persentase penurunan luas lahan kritis	1.09%	1.10%	100.92	
		Persentase penurunan luas kerusakan hutan	10%	19.22%	192.20	
		Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	45%	86.32%	191.82	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi II					161.65	
3.	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	11.68%	16.62%	142.29	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategi III					142.29	
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	100	
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	95%	94.36%	99.33	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategi IV					99.67	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I s/d IV					126.43	

Tabel 1. Pencapaian IKU Sasaran Strategis Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Indikator *outcome* yang ditargetkan pada Tahun 2018 adalah indikator Kinerja Utama (IKU), berupa indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Barat. Capaian IKU Tahun 2018 selanjutnya digunakan untuk menilai capaian Sasaran Strategis Tahun 2018 Pencapaian Sasaran Strategis pada Tahun 2018 yang didukung capaian IKU (*outcome*) adalah sebagaimana digambarkan dalam Tabel di atas dengan uraian sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis “Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan” Tahun 2018 sebesar 102.11% diukur melalui capaian 3 (tiga) IKU.
2. Capaian sasaran strategis “Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat” Tahun 2018 sebesar 161.65% diukur melalui capaian 3 (tiga) IKU.
3. Capaian sasaran strategis “Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat” Tahun 2018 sebesar 142.29% diukur melalui capaian 1 (satu) IKU.
4. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya tata kelola organisasi” Tahun 2018 sebesar 99.67% diukur melalui capaian 2 (dua) IKU.

Seluruh rencana capaian kinerja Tahun 2018 dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, walaupun ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya kurang tepat waktu (terlambat) oleh beberapa faktor penghambat dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat diminimalisir seluruh kendala dan hambatan sehingga mendapatkan solusi pemecahannya, hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.4 Aspek Strategis	3
1.5 Struktur Organisasi	6
1.6 Analisis Perkembangan Strategis	11
1.6.1 Kondisi Saat Ini	11
1.6.2 Kondisi yang Diharapkan	15
1.7 Peningkatan Sistem Akip dan Inovasi Peningkatan Pelayanan Publik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	16
1.8 Sistematika Penyajian.....	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	19
2.1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	20
2.2 Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021..	20
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	27
2.4 Rencana Kinerja Sasaran	28
2.5 Rencana Kinerja Kegiatan	30
2.6 Rencana Anggaran Tahun 2018.....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	37
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	37
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	38
3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	40
BAB IV PENUTUP.....	150
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pencapaian IKU Sasaran Strategis Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017	iv
Tabel 2. Keterkaitan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan Program Pembangunan Kehutanan Tahun 2016-2021.....	6
Tabel 3. Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Periode 2016-2021	22
Tabel 4. Langkah-Langkah Strategis Pencapaian Sasaran.....	23
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018	28
Tabel 6. Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018	28
Tabel 7. Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Tahun 2018.....	30
Tabel 8. Rencana Anggaran Tahun Anggaran 2018	35
Tabel 9. Alokasi Dana per Sasaran Tahun Anggaran 2018.....	35
Tabel. 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	38
Tabel. 11. Pencapaian IKU Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018	39
Tabel 12. Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2018.....	42
Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	42
Tabel 14. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan sampai Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016- 2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016- 2021	45
Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja RPJMN (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).....	46
Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau	47
Tabel 17. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis I Tahun 2018.....	48
Tabel 18. Capaian Target IKU Persentase Pemanfaatan Dan Penggunaan Kawasan Hutan Yang Sesuai Dengan Fungsi Dan Peruntukannya per Triwulan Tahun 2018	50
Tabel 19. Hasil Monitoring Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat.....	52
Tabel 20. Capaian Target IKU Persentase Pencapaian Target Produksi HHK dan HHBK	58
Tabel 21. Target dan Realisasi Produksi HHK dan HHBK di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018	59
Tabel 22. Realisasi Produksi HHK dan HHBK terhadap Target Tahun 2018	61

Tabel 23.	Capaian Target IKU Nilai PNPB Sektor Kehutanan per Triwulan Tahun 2018	62
Tabel 24.	Target dan Realisasi PNPB Sektor Kehutanan di Sumatera Barat Tahun 2018	63
Tabel 25.	Pencapaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan Tahun 2018	65
Tabel 26.	Perbandingan Capaian Kinerja Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan Tahun 2017 dan Tahun 2018	67
Tabel 27.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan s.d akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	70
Tabel 28.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja RPJMN (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	71
Tabel 29.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau	73
Tabel 30.	Realisasi Capaian Kinerja Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan Kegiatan Sasaran Tahun 2018	75
Tabel 31.	Capaian Target IKU Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis per Triwulan Tahun 2018	80
Tabel 32.	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Penanaman Tahun 2013	80
Tabel 33.	Capaian Target IKU Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan per Triwulan Tahun 2018	84
Tabel 34.	Tutupan Lahan Kawasan Hutan Tahun 2015 hingga Tahun 2018	85
Tabel 35.	Jumlah Kelompok Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari hingga Tahun 2018 di Sumatera Barat	87
Tabel 36.	Capaian Target IKU Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (<i>hotspot</i>) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015) Tahun 2018 Setiap Triwulannya	88
Tabel 37.	Perbandingan capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Dan Pendapatan Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2015 dan Tahun 2016	90
Tabel 38.	Luas Kebakan Hutan dan Lahan di Sumatera Barat Tahun 2018	91
Tabel 39.	Pencapaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Tahun 2018	93
Tabel 40.	Perbandingan Capaian Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Tahun 2017 dan Tahun 2018	93
Tabel 41.	Perbandingan Capaian Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan sampai dengan Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.	94
Tabel 42.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja RPJMN (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	94

Tabel 43.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan di Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau.....	95
Tabel 44.	Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis III Tahun 2018.....	97
Tabel 45.	Capaian Target IKU Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Masyarakat Per Triwulan Tahun 2018.....	100
Tabel 46.	Rekapitulasi Luas Areal Kelola Perhutanan Sosial	101
Tabel 47.	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2018	107
Tabel 48.	Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	107
Tabel 49.	Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi sampai Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	109
Tabel 50.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau.....	109
Tabel 51.	Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis IV Tahun 2018	112
Tabel 52.	Capaian Target IKU Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Per Triwulan Tahun 2017	116
Tabel 53.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Lima Tahun Terakhir	116
Tabel 54.	Capaian Target IKU Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan per Triwulan Tahun 2018.....	118
Tabel 55.	Rekapitulasi Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Lima Tahun Terakhir	119
Tabel 56.	Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	120
Tabel 57.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	151

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.....	10
Gambar 2. Tujuan dan Sasaran Strategis I	41
Gambar 3. Capaian Target Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	43
Gambar 4. Capaian kinerja Pencapaian Target Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (%) Tahun 2016 - 2018	44
Gambar 5. Capaian kinerja Nilai PNPB Sektor Kehutanan (%) Tahun 2016 - 2018.....	44
Gambar 6. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis II	64
Gambar 7. Capaian Kinerja Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis Tahun 2016 - 2018 .	68
Gambar 8. Capaian Kinerja Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan Tahun 2017 - 2018.....	69
Gambar 9. Capaian Kinerja Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (<i>Hotspot</i>) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015) Tahun 2016 – 2018 ...	69
Gambar 10. Perkembangan Perubahan Penutupan Lahan Kawasan Hutan di Sumatera Barat Tiga Tahun Terakhir	86
Gambar 11. Angka <i>Toleransi</i> Titik Panas (<i>Hot Spot</i>) dan Realisasi <i>Hot Spot</i> Tahun 2015-2018.....	89
Gambar 12. Tujuan dan Sasaran Strategis III	92
Gambar 13. Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	94
Gambar 14. Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Tujuh Tahun Terakhir	102
Gambar 15. Tujuan dan Sasaran Strategis IV	106
Gambar 16. Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Tahun 2015 s.d Tahun 2017	108
Gambar 17. Capaian Kinerja Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2016 sampai dengan 2018	108
Gambar 18. Pencapaian Nilai SAKIP Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Lima Tahun Terakhir	117
Gambar 19. Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Lima Tahun Terakhir	119
Gambar 20. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 1	132
Gambar 21. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 2	133
Gambar 22. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 3	133
Gambar 23. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 4	134
Gambar 24. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 5	135
Gambar 25. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 6	136
Gambar 26. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 7	137
Gambar 27. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 8	138
Gambar 28. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 9	139

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja SKPD

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dan IV

Lampiran 3. Certificate ISO 9001:2008

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap kepala SKPD diwajibkan menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada gubernur paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan kinerja pemerintah, khususnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, disusun sebagai pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018. Perjanjian kinerja tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Revisi Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, yang didanai APBD maupun sumber dana lainnya.

Laporan kinerja ini menguraikan sejauhmana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018. Hasil-hasil yang telah diperoleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu tersebut merupakan bagian dari kontribusi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada penyelenggaraan pembangunan kehutanan pada khususnya dan pembangunan Sumatera Barat pada umumnya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dan penyampaian laporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Dengan demikian, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur Sumatera Barat.

Selain itu, penyampaian laporan kinerja kepada pihak yang berhak (secara hierarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain :

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Laporan kinerja ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan misi instansi; dan
3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

1.3 KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat.

2. Tugas Pokok

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan.

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang kehutanan, lingkup Provinsi Sumatera Barat;

- d. Pelaksanaan tugas di bidang sekretariat dinas, perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan, dan penyuluhan dan perhutanan sosial;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kehutanan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4 ASPEK STRATEGIS

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam pengelolaan hutan di Sumatera Barat sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Sumatera Barat. Adapun peran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Pemantapan kawasan hutan melalui proses percepatan penyelesaian RTRW substansi kehutanan dan penyiapan operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatkan resiliensi ekosistem hutan terhadap perubahan iklim melalui upaya mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi jumlah *hotspot* dan luas areal yang terbakar, koordinasi dan pelaporan hasil inventarisasi dan pemantauan efek gas rumah kaca, penanganan isu-isu terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta percepatan penanganan pengaduan perkara lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Meningkatkan pengamanan hutan dan penanganan *illegal logging* melalui pemantapan koordinasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, patroli dan operasi serta penegakan hukum, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, serta peningkatan peran serta masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN).
4. Melanjutkan program rehabilitasi hutan dan lahan (sipil teknis dan vegetatif), diarahkan kepada peningkatan ketahanan daya dukung air dan tanah, utamanya pengelolaan dan operasionalisasi KPHL serta pengelolaan hutan rakyat.

5. Meningkatkan sumbangan devisa dan PNBP dari hutan produksi melalui optimalisasi produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta ekspor melalui perbaikan perizinan, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK), penataan industri dan *cluster industries*, pengelolaan dan operasionalisasi KPHP.
6. Percepatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat melalui perhutanan sosial sebagai implementasi spirit keberpihakan pengelolaan hutan dengan melibatkan peran masyarakat dengan upaya peningkatan modal sosial dalam mendukung penyelesaian konflik dan hutan adat, peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan menghubungkannya dengan kemitraan.
7. Peningkatan tata kelola organisasi dengan mengimplementasikan ISO 9001:2015 dan melaksanakan seluruh kegiatan lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun oleh masing-masing unit kerja. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran juga merupakan upaya percepatan peningkatan tata kelola organisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Peran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, telah ditetapkan sepuluh prioritas pembangunan yaitu:

1. Pembangunan mental dan pengalaman agama dan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM, dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur dan;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat secara langsung mendukung agenda Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang kesepuluh yaitu “Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana”.

Dukungan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian dimaksud dilakukan melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengendalian Kebakaran Hutan, Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Hutan, Program Perencanaan Makro dan Pemanfaatan Kawasan Hutan, Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Secara detail kaitan antara RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan Program Pembangunan Kehutanan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Keterkaitan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan Program Pembangunan Kehutanan Tahun 2016-2021.

MISI	PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN PERUBAHAN RPJMD	SASARAN BERDASARKAN REKOMENDASI TIM PENGUATAN SAKIP MELALUI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR	PROGRAM
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	2. Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	3. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	3. Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 2. Program Pengendalian Kebakaran Hutan. 3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Hutan. 4. Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan. 5. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan. 6. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 7. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Secara kelembagaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di bidang Kehutanan.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselonering berada pada tingkat eselon II provinsi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai unsur pelaksana meliputi: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi. Dalam perkembangannya sesuai kebutuhan organisasi, struktur dinas mengalami penambahan eselon III dan IV sebagaimana tercantum dalam Peraturan

Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Peraturan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut:

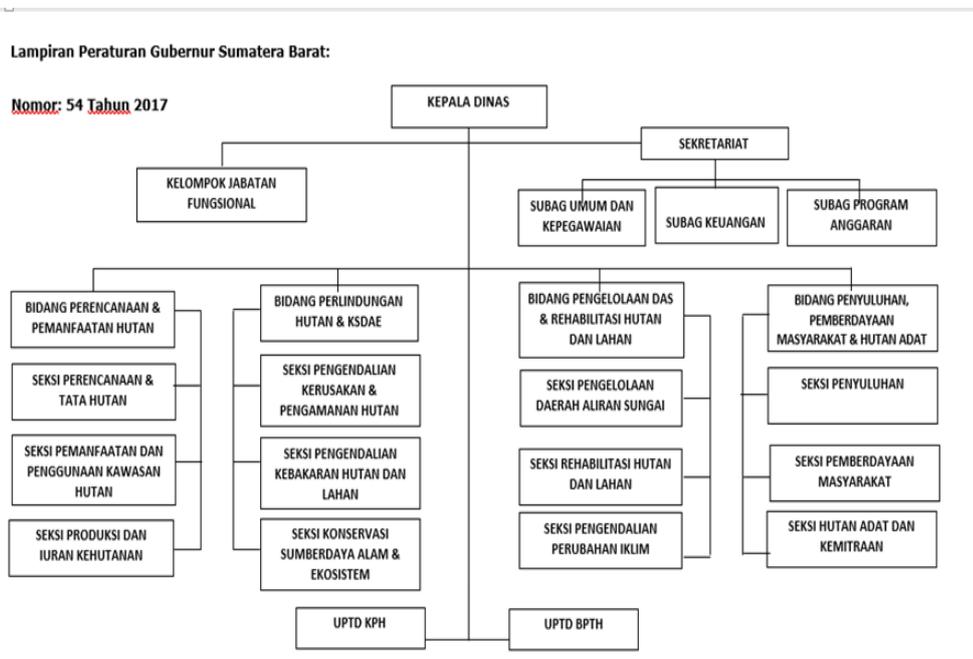
1. Kepala Dinas dijabat oleh Ir. Hendri Octavia, M.Si
2. Sekretaris dijabat oleh Yozarwardi.UP, S.Hut, M.Si yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dijabat oleh Suyatno, B.Sc
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dijabat oleh Purnama, B.Ac
 - c. Kepala Sub Bagian Program Anggaran dijabat oleh Ita Rahmawati, S.Hut, MM
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Faridil Afrasy, S.Hut, MM yang membawahi:
 - a. Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan dijabat oleh Sayogo Hutomo, S.Hut, MP
 - b. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan dijabat oleh Syamsul Bahri, S.Hut, M.Si
 - c. Kepala Seksi Produksi dan Luran Kehutanan dijabat oleh Adrianto, SH, M.Si
4. Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dijabat oleh Ir. Ruswin Rustam yang membawahi:
 - a. Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dijabat oleh Zarmawandi, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan dijabat oleh Ir. Saida R Nauli
 - c. Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dijabat oleh Afrial Muhammad, S.Pt, M.Si
5. Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE dijabat oleh Ir. Mgo Senatung, MP yang membawahi:
 - a. Plt. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan dijabat oleh Nevin, S.Hut, M.Si
 - b. Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dijabat oleh Dudi Badrudin, S.Hut.T
 - c. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dijabat oleh Novi Hendri, S.Hut, M.Si

6. Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat dijabat oleh Yonefis SH, MM yang membawahi:
 - a. Kepala Seksi Penyuluhan dijabat oleh Rini Hasmira, SH
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Kusworo, SP, M.Si
 - c. Kepala Seksi Hutan Adat dan Kemitraan dijabat oleh Tito Trio Putra, S.Hut, M.Si
7. Kepala UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan dijabat oleh Febrina Trisusila Putri, SP, M.Si yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Fazlul Taufik ST, M.Eng
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Benih dijabat oleh Era Sulastri, S.Hut, M.Si
 - c. Kepala Seksi Informasi dan Peredaran Benih dijabat oleh Imran, SE
8. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan dijabat oleh Bambang Suyono, S.Hut, MM yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Boy Martin, SH, M.Si
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Hendra Bhakti, ST
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Cucu Sukarna, S.IP
9. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Pasaman Raya yang dijabat oleh Yandesman, S.Hut yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Rizky Hamid Nasution, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Hendri Dunan, SH
 - c. Plt. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Yuhan Sahri, S.Hut.
10. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Lima Puluh Kota yang dijabat oleh Ir. Eka Meinarsih yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Susi Erienti, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Ismet Fanani, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Yogi Wandra, S.Hut

11. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Agam Raya yang dijabat oleh Ir. Afniwirman yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Dewi Safnita, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Yon Fredy, S.Hut
 - c. Plt. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Suhet Tarmizi, SP
12. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Sijunjung yang dijabat oleh Terra Dharma, S.Hut, M.Si yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Dian Yulia Widra, S.Hut.T
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Febri Syahli, S.Hut, M.Sc
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Slamet Riyadi, SH
13. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Solok yang dijabat oleh Ir. Refriasel yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Novi Eka Putri, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Bakhrinaldi, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Zeptin Alex Vildiro, S.Hut, MM
14. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Hulu Batang Hari yang dijabat oleh Hamdani, S.Sos yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Hasan, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Joni Saputra, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Muhammad Fitriadi, S.Hut
15. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Pesisir Selatan yang dijabat oleh Madrianto, S.Hut yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Yusfiandrita, S.Hut
 - b. Plt. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Jonvisi, SH

- c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Hendrio Fadly, S.Hut
- 16. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dharmasraya yang dijabat oleh Drs. Nofdinal Yefri, M.Si yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Ir. Evi Yusri, M.Si
 - b. Plt. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Arfismen
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Eka Febriandi, S.Hut
- 17. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mentawai yang dijabat oleh Tasliatul Fuaddi, S.Hut yang membawahi:
 - a. Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Zunaidi, S.Hut
 - b. Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Pribel Sirait, S.Hut
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dijabat oleh Riza Nofa Satria, S.Hut, M.Si

Secara lengkap struktur dan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Sumber: Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017
 Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

1.6 ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, mencakup kawasan hutan, sensitivitas kehutanan, penanganan *illegal logging*, rehabilitasi hutan dan lahan, pelibatan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan dan optimalisasi pemanfaatan hasil dan industri kehutanan.

Hal ini akan menjadi pertimbangan bagi keberlanjutan pembangunan kehutanan selanjutnya di Provinsi Sumatera Barat. Penilaian atas kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan dan permasalahan strategis tersebut diuraikan sebagai berikut :

1.6.1 Kondisi Saat ini

1.6.1.1 Ekologi

Kawasan hutan secara ekologis memiliki peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, berfungsi sebagai penyangga sumber kehidupan, pengatur tata air, ekosistem dan menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak karena hutan merupakan *Mother of Agricultural* (Pertanian, Sumber Energi Listrik, Pengairan dll).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar, sehingga secara keseluruhan Provinsi Sumatera Barat memiliki Kawasan Hutan **seluas ± 2.380.057 ha (56,27%) dari luas wilayah ± 4.229.730,00 ha** yang terdiri atas :

- Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas ± 806.939 ha,
- Hutan Lindung (HL) seluas ± 791.671 ha,
- Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas seluas ± 233.211 ha,
- Hutan Produksi (HP) seluas ± 360.608 ha,
- Hutan Produksi Konservasi (HPK) seluas ± 187.629 ha,
- Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 1.849.673 ha,

Melihat komposisi tersebut di atas, kawasan hutan Sumatera Barat didominasi oleh hutan konservasi dan lindung yang terhampar di pinggang Bukit Barisan yang merupakan hulu-hulu sungai yang bermuara ke provinsi tetangga (Jambi dan Riau), dengan kondisi fisik bertopografi sedang hingga berat, kontur bergelombang didominasi oleh berbagai jenis vegetasi perdu hingga pohon-pohonan dan didiami oleh berbagai jenis satwa.

Sebagai salah satu sumber daya produktif, kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat juga menjadi "primadona" dalam kerangka Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Hal ini telah dibuktikan dengan dijadikannya Provinsi Sumatera Barat sebagai model pengembangan Perhutanan Sosial (PS) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai instansi vertikal. PS juga dimaksudkan untuk menangani masalah-masalah tenurial yang banyak terjadi pada hampir seluruh kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat. Alih fungsi lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan kegiatan pembangunan lainnya di luar bidang kehutanan juga menambah kompleksitas masalah tenurial di Sumatera Barat. Di sisi lain, kepastian batas kawasan hutan belum sepenuhnya terpatri secara jelas baik fisik lapangan maupun dukungan peta kawasan hutan. Bahkan, konflik terkait kawasan hutan masih terdapat di beberapa daerah akibat masih rendahnya pengakuan atas keberadaan kawasan hutan oleh masyarakat.

Tidak hanya sebatas itu, dampak dari alih fungsi lahan yang dilakukan tanpa mengindahkan kaidah-kaidah konservasi dapat mengancam kelestarian hutan dengan meningkatnya luas lahan kritis yang tersebar di dalam dan di luar kawasan hutan. Akibatnya, kebakaran hutan, banjir, dan tanah longsor berpotensi terjadi sebagai dampaknya.

Di samping itu, bidang kehutanan juga merupakan isu-isu sensitif baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Tingginya perhatian multipihak terhadap pengelolaan hutan berpotensi menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, apalagi berkaitan dengan "*miss management*" dan "*conflict of interest*". Untuk itu, pengelolaan hutan harus dikelola secara komprehensif dan profesional.

1.6.1.2 Sosial/Ekonomi

Ketentuan terkait penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan sudah cukup banyak dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari

ketentuan yang ada, pada dasarnya penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip dasar penggunaan dan pemanfaatan hutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan fasilitasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan nasional. Provinsi Sumatera Barat dengan kawasan hutan yang luas, memiliki peluang untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang dimungkinkan dari ketentuan pengelolaan hutan, seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Nagari (HN), Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam, dan lain-lain sudah mulai digalakkan di Provinsi Sumatera Barat. Upaya-upaya tersebut setidaknya akan mengurangi tekanan-tekanan terhadap kawasan hutan.

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Saat ini, pemanfaatan hasil hutan kayu di Provinsi Sumatera Barat diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 8 (delapan) perusahaan yang terdiri atas 4 (empat) IUPHHK-HA dan 4 (empat) IUPHHK-HT. Untuk itu, pembinaan yang terus-menerus dari instansi kehutanan diperlukan agar prinsip kelestarian produksi dan kelestarian sumber daya hutan dalam pelaksanaan IUPHHK dapat tercapai.

Kebutuhan masyarakat akan bahan bangunan, seperti kayu, ikut mendorong tumbuhnya industri hasil hutan berupa Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)/*Sawmill*. Perhitungan kapasitas terpasang industri pengolahan kayu yang legal dan sudah didaftar ulang sebanyak 70 unit adalah $\pm 203.550 \text{ m}^3$ per tahun (setara dengan 407.100 m^3 kayu bulat dengan asumsi rendemen 50 %). Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri tersebut, baik berupa kayu bulat maupun kayu gergajian, masih didatangkan dari luar Provinsi Sumatera Barat dan mengandalkan kepada produksi hutan alam. Akibat kapasitas industri pengolahan kayu di atas yang tidak disertai dengan kemampuan suplai bahan baku secara lestari memicu peningkatan kasus penjarahan, penyerobotan, dan pengambilan hasil hutan secara ilegal yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.

1.6.1.3 Kelembagaan

Untuk menjalankan penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memiliki sumber daya manusia sebanyak 532 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status kepegawaian 529 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), dengan rincian :

1. Sekretariat : 36 orang
2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan : 17 orang
3. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat : 19 orang
4. Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE : 18 orang
5. Bidang Pengelolaan DAS dan RHL : 18 orang
6. UPTD BSPTH : 15 orang
7. UPTD KPHL BB : 119 orang
8. UPTD KPHL Agam Raya : 24 orang
9. UPTD KPHL 50 Kota : 53 orang
10. UPTD KPHP Dharmasraya : 17 orang
11. UPTD KPHP Mentawai : 21 orang
12. UPTD KPHP Pesisir Selatan : 18 orang
13. UPTD KPHL Pasaman Raya : 52 orang
14. UPTD KPHL Sijunjung : 37 orang
15. UPTD KPHL Hulu Batanghari : 19 orang
16. UPTD KPHL Solok : 43 orang

Berdasarkan jenjang pendidikan, ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Doktor : 1 orang
- b. Magister (S2): 36 orang
- c. Sarjana (S1): 201 orang
- d. Diploma (D3): 26 orang
- e. Sekolah Menengah Atas (SMA): 262 orang
- f. Sekolah Menengah Pertama (SMP): 6 orang

Dari jumlah tersebut di atas, beberapa orang diantaranya adalah tenaga fungsional tertentu, berupa:

- a. Fungsional Polisi Kehutanan: 140 orang
- b. Fungsional Penyuluh Kehutanan: 62 orang
- c. Calon Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan: 2 orang
- d. Fungsional Perencana: 1 orang
- e. Calon Fungsional Pranata Komputer: 1 orang

1.6.2 Kondisi yang Diharapkan

Sesuai dengan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, pelaksanaan pembangunan kehutanan diarahkan untuk mencapai kondisi yang mendukung bagi terciptanya kelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, baik secara ekologi, sosial/ekonomi, maupun secara kelembagaan. Secara rinci, kondisi dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1.6.2.1 Ekologi

Kondisi ekologi yang diinginkan antara lain adalah seimbangnya ekosistem hutan dalam menyangga kehidupan manusia, khususnya melalui pemantapan batas kawasan hutan dan meningkatnya pengakuan keberadaan kawasan hutan oleh para pihak, sehingga diharapkan dapat : (1) menurunnya praktek-praktek *illegal logging*, perambahan hutan, kebakaran hutan dan lahan serta perdagangan kayu ilegal, (2) terkendalinya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, (3) terciptanya prakondisi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan (4) meningkatnya fungsi hutan dan lahan yang telah terdegradasi melalui dukungan informasi dan perencanaan kehutanan yang lengkap dan terpadu.

1.6.2.2 Sosial/Ekonomi

Kondisi sosial/ekonomi yang diinginkan antara lain adalah : (1) meningkatnya pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, (2) meningkatnya minat dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pemahaman para pihak terkait hutan dan kehutanan, (3) terciptanya prakondisi mitigasi perubahan iklim sehingga diharapkan masyarakat sekitar hutan dapat meningkatkan pendapatan perkapita mereka melalui skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), (4) meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam di dalam dan di sekitar kawasan hutan, (5) terpenuhinya penyediaan kayu dari hutan tanaman, restrukturisasi industri dan optimalisasi industri perikanan dan hasil hutan lainnya yang berorientasi pada pengoptimalan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan efisiensi penggunaan bahan baku hasil hutan, dan (6) berkembangnya usaha-usaha kehutanan seperti HHBK serta pembibitan dan perbenihan tanaman hutan.

1.6.2.3 Kelembagaan

Kondisi kelembagaan yang diinginkan antara lain : (1) meningkatnya kemampuan struktural dan fungsional organisasi, (2) tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, dan (3) terciptanya koordinasi yang mantap dengan pusat dan kabupaten/kota dalam pembangunan kehutanan.

1.7 PENINGKATAN SISTEM AKIP dan INOVASI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Demi meningkatkan kinerja dan pelayanan publik pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maka dilakukan inovasi sebagai kunci pencapaian peningkatan tersebut. Salah satu upaya peningkatan sistem AKIP yang dikembangkan adalah melakukan monitoring dan evaluasi APBD secara berkala, yang langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan setiap bulannya atau minimal setiap tiga bulan. Di samping itu, upaya lainnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja minimal setiap enam bulan.

Inovasi peningkatan mutu pelayanan publik juga dikembangkan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui implementasi ISO 9001:2015. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya sertifikat ISO 9001:2015 dari Tuv Rheinland yang merupakan lembaga sertifikasi ISO pada bulan Januari 2018. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik dengan patuh pada Sistem Operasional Prosedur (SOP) seperti yang tertuang dalam dokumen Standar Manual Mutu ISO 9001:2015 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan memenuhi seluruh sasaran mutu waktu pelayanan yang juga tertuang pada dokumen di atas. Setiap masyarakat yang hendak mendapatkan layanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat melihat Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan tata waktu penyelesaian layanan yang terpampang pada setiap unit kerja sesuai dengan jenis layanannya. Hal ini dilakukan agar masyarakat pengguna layanan mengetahui dengan jelas alur proses layanan yang mereka mohonkan

sehingga meyakinkan mereka bahwa layanan mereka akan selesai sesuai mutu waktu yang tertera pada SOP setiap jenis layanan. Hal ini menguatkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk selalu menerapkan *Good Governance and Clean Government*. Inovasi lain yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mulai tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Perhutanan Sosial (PS) adalah suatu upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan dalam skema Hutan Nagari (HN), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Kemasyarakatan (HKm).
2. Penyusunan Perda Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengamanan dan Perlindungan Hutan, yang diimplementasikan dengan dibentuknya Satgas Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PPHBN) dan Masyarakat Peduli Api (MPA).
3. Peta Indikatif Simpanan Karbon (Pinsica) merupakan peta indikatif yang menginformasikan jumlah simpanan karbon pada areal kelola Perhutanan Sosial Sumatera Barat. Peta ini dapat menginformasikan jumlah simpanan karbon untuk setiap jenis tutupan lahan. Peta ini dapat diakses melalui website <http://arcg.is/PGef5>.

1.8 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018, meliputi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis pada tahun 2018.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 ditujukan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditetapkan kerangka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Madani** adalah suatu masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, dan moral yang ditopang oleh keimanan.
2. **Sejahtera** adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi dan hiburan, terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2016-2021. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah *“adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”*;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan visi, misi, dan agenda tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM, dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Dari sepuluh prioritas di atas yang sangat terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah **prioritas 10 yaitu pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.**

2.2 RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

Rencana Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana telah diubah dengan Revisi Rencana Strategis Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Barat 2016-2021 melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang memuat, visi, misi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam

pelaksanaannya. Secara ringkas, Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 TUJUAN DAN SASARAN

2.2.2.1 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan satu tujuan berdasarkan rekomendasi Tim Penguatan SAKIP melalui Surat Keputusan Gubernur yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu 2016-2021 yaitu:

No.	Tujuan Organisasi Awal	Tujuan Organisasi Setelah Evaluasi Kementerian PAN-RB	Tujuan Organisasi sesuai rekomendasi tim penguatan SAKIP November 2018
1.	Memberikan kepastian dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan lestari.	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan
2.	Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal	Meningkatkan kemampuan hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan fungsinya.	Meningkatnya kinerja organisasi
3.	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan	
4.	Memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan,	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	

2.2.2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam empat sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Revisi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 serta Perubahan RPJMD Sumatera Barat 2016-2021. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode 2016-2021 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Sasaran Periode 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	%	80	81	82	83	84	85
			Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan	%	80	81	82	83	84	85
		Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	Persentase penurunan luas lahan kritis	%	0,18	0,43	1,09	2,00	2,21	2,26
			Persentase penurunan laju kerusakan hutan	%	-	4,15	5,15	6,15	7,15	8,15
			Persentase penurunan jumlah titik panas (<i>hotspot</i>) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	%	5	10	15	20	25	30
		Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	%	5,32	8,50	11,68	14,86	18,03	21,21
2.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

2.2.3 CARA MENCAPAI SASARAN

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan pembangunan kehutanan yang dikerjakan secara bertahap per tahun. Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari kebijakan Pembangunan Kehutanan Nasional melalui Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Langkah-langkah Strategis Pencapaian Sasaran

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Pemantapan Kawasan Hutan	Percepatan Proses Penyelesaian RTRW Subtansi Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	1. Program Perencanaan makro dan Pemantapan Kawasan Hutan (APBD)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan • Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan • Pengendalian Perencanaan dan Tata Hutan • Sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial
	Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja Pengusahaan dan Penatausahaan Hasil Hutan serta Industri Kehutanan	2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN) 3. Program Pemanfaatan Potensi SDH (APBD)	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi/koordinasi Operasional KPH • Optimalisasi PNBK • Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Industri Kehutanan • Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH • Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah KPH

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kemitraan Kehutanan
<p>Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat</p>	<p>Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Mitigasi Perubahan Iklim</p>	<p>Penegakan Hukum dalam Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Penguatan Partisipasi Masyarakat untuk Menunjang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</p>	<p>1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan dan Perlindungan Hutan • Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA • Pengukuran Simpanan Karbon • Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH • Penyusunan Peta Rawan Bencana Kawasan Hutan • Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem • Pengendalian Dampak Perubahan Iklim • Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
	<p>Percepatan Rehabilitasi Hutan dan lahan</p>	<p>Penyediaan bibit dan Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p>	<p>1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p> <p>2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</p> <p>3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN)</p> <p>4. Program Pengendalian Kebakaran Hutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Bibit Tanaman Hutan • Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan • Konservasi Sumber Daya Genetik • Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Luar Kawasan Hutan • Monitoring dan Pembinaan Kegiatan RHL • Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) • Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi oleh Tim Provinsi • Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Peningkatan Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Skema HTR, HN dan HKm	<ol style="list-style-type: none"> Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN) 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pengembangan Hutan Mangrove Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Sekolah Lapangan Penyuluhan Kehutanan untuk Mendukung Perhutanan Sosial (HKm) Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan
Meningkatnya tata kelola organisasi	Percepatan Proses SPJ, Pelaporan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Internal Dinas Kehutanan	Peningkatan Kinerja Dinas Kehutanan pada Setiap Bidang dan Perencanaan Setiap Kegiatan yang Lebih Baik	<ol style="list-style-type: none"> Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
			2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi • Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur • Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD • Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional • Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan kantor • Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor • Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan • Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Pembangunan Gedung Kantor • Pengadaan Meubelair • Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess • Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
			3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
			4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
			5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Penatausahaan Keuangan SKPD • Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
			6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan • Pengembangan Data

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
			Alam dan Lingkungan Hidup	dan Informasi Kehutanan <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP • Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan

Sumber: Revisi Rencana Strategis Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah, yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dengan pemberi amanah, yaitu Gubernur Sumatera Barat, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang telah ditetapkan dan telah sesuai dengan arahan tim evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, indikator dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	a. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%
	b. Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	82%
	c. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan	82%
Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	a. Persentase penurunan luas lahan kritis	1,09%
	b. Persentase penurunan laju kerusakan hutan	10%
	c. Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	45%
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	a. Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	11,68%
Meningkatnya tata kelola organisasi	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB
	b. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	95%

2.4 RENCANA KINERJA SASARAN

Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah rencana pencapaian target sasaran yang menjadi sarana bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun. Tahun 2018 adalah tahun ketiga untuk Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2016-2021 yang lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6. Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No	SASARAN			CARA MENCAPAI SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	Target	KEBIJAKAN STRATEGIS	PROGRAM
1	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	1. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	Percepatan Proses Penyelesaian RTRW subtransi kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	1. Program Perencanaan makro dan Pemantapan Kawasan Hutan (APBD) 2. Program Dukungan Manajemen dan

No	SASARAN			CARA MENCAPAI SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	Target	KEBIJAKAN STRATEGIS	PROGRAM
		2. Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu 3. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan	82% 82%	Peningkatan Kinerja perusahaan dan penatausahaan hasil hutan serta industri kehutanan	Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN) 3. Program Pemanfaatan Potensi SDH (APBD)
II	Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	1. Persentase penurunan luas kerusakan hutan 2. Persentase penurunan luas lahan kritis 3. Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	5,15% 1,09% 15%	Penegakan hukum dalam pengamanan dan perlindungan hutan. Penguatan partisipasi masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Penyediaan bibit dan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan	1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 5. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
III	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	11,68%	Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema HTR, HN dan HKm	1. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
IV	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	Peningkatan kinerja dinas kehutanan pada setiap bidang dan perencanaan setiap kegiatan yang lebih baik	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan

No	SASARAN			CARA MENCAPAI SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	Target	KEBIJAKAN STRATEGIS	PROGRAM
					Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sumber: Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

2.5 RENCANA KINERJA KEGIATAN

Dalam implementasinya, Rencana Kinerja Sasaran di atas akan dicapai dengan melaksanakan Program Pembangunan Kehutanan maupun Program Pendukung lainnya yang terdiri atas Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Kehutanan maupun Kegiatan Pendukung sehingga Pencapaian Kinerja Sasaran akan ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Kinerja Kegiatan. Secara ringkas, Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 yang akan dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.

Tabel 7. Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
1	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh msyarakat	11,68 %
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan	Terlaksananya Musrenbanghutda, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota	10 UPTD /KPH
2	Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat Kemitraan	Meningkatnya kelompok/ lembaga masyarakat yang mengelola hutan (HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan)	25 Kelompok
3	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan Hutan Rakyat Kemitraan	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan	180 Orang
4	Penguatan Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Sumatera Barat	Terjalinnnya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR, dan HR Kemitraan)	110 Orang

	5	Pengembangan Hutan Mangrove	Terlaksananya koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove	6 Kali
	6	Pengembangan unit percontohan penyuluh kehutanan	Terbangunnya Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	5 Unit
	7	Peningkatan Kapasitas Penyuluh kehutanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di Sumatera Barat	75 Orang
2		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Optimalisasi PNBPN sektor kehutanan dari HHK dan HHBK	82 %
	1	Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Termonitornya produksi hasil hutan dan PNBPN sektor kehutanan	10 Kab/Kota
	2	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Industri Kehutanan	Termonitornya izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu	13 Kab/Kota
	3	Perencanaan dan pemanfaatan hutan pada wilayah KPH	Hutan pada wilayah kelola KPH terencana dan termanfaatkan	5 Petak
	4	Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan	Potensi hasil hutan di wilayah KPH yang terkelola	2 Komoditi
	5	Pengembangan Kemitraan Kehutanan	Jumlah unit kemitraan	4 Unit
3		Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100 %
	1	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	Terpeliharanya batas kawasan hutan	70 km
	2	Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali	23 Unit
	3	Pengendalian perencanaan dan tata hutan	Tersusunnya buku pengendalian perencanaan dan tata hutan	1 Buku
	4	sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial	Terlaksananya Sosialisasi Identifikasi Hutan Adat dan Penanganan Konflik Tenurial	20 Kali
4		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningkatnya ketersediaan jumlah bibit yang berkualitas	250.000 Batang
	1	Pembuatan Bibit Tanaman Hutan	Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas dan terlaksananya pembinaan terhadap penangkar benih	250.000 Batang
	2	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Sertifikasi mutu benih/ bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan	7 Unit

	3	Konservasi Sumberdaya Genetik	Terbangunnya dan terpeliharanya sumber daya genetic	4 Unit
5		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100 %
	1	Monitoring pelaksanaan pembangunan kehutanan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan kehutanan	10 UPTD/KPH
	2	Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP	Terlaksananya implementasi ISO 9000:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	2 Laporan
	3	Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	Terlaksananya pengembangan data dan informasi kehutanan	2 laporan
	4	penyusunan neraca sumber daya hutan	Tersedianya data neraca sumber daya hutan	1 Buku
	5	Peningkatan kapasitas SDM	Kebutuhan peningkatan SDM yang terpenuhi	24 Kali
6		Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	5,15 %
	1	Pengamanan dan perlindungan hutan	Kasus tindak pidana hutan yang ditindak lanjuti	100%
	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam	450 Orang
	3	Pengukuran simpanan karbon	Tersedianya data simpanan karbon	20 Petak
	4	Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH	Wilayah kelola KPH yang di konservasi	1 Lokasi
	5	Penyusunan peta rawan bencana kawasan hutan	Peta rawan bencana kawasan hutan	6 Peta
	6	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Terbentuknya kawasan ekosistem esensial	1 Unit
	7	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terlaksananya Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan	1 Laporan
	8	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Terlaksananya fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan	1 Lokasi
7		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Indeks tutupan Hutan	62,69%
			Persentase penurunan luas lahan kritis	1,09 %

	1	Rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan	Terehabilitasinya lahan kritis diluar kawasan hutan	180 Ha
	2	Monitoring dan pembinaan kegiatan RHL	Terlaksananya monitoring dan pembinaan RHL/ Reklamasi	10 Lokasi
	3	Pengendalian pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Daerah aliran sungai yang terkendali	2 DAS
8		Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase penurunan jumlah titik panas (<i>hotspot</i>) dari angka rerata periode tahun sebelumnya (2011-2015)	15 %
	1	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan	15%
9		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi	12 Bulan
	2	Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi OPD yang terpenuhi	12 Bulan
	3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Pembayaran tagihan rekening pajak bumi dan bangunan terpenuhi	12 Bulan
	4	Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor yang terpenuhi	12 Bulan
	5	Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi	12 Bulan
	6	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	12 Bulan
	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Bulan
	8	Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kebutuhan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 Bulan
	9	Penyediaan makanan dan minuman	Pertemuan atau rapat yang diselenggarakan	12 Bulan
	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti	12 Bulan
	11	Penyediaan jasa informasi, dokumenter, dan publikasi	Publikasi kegiatan OPD yang tersedia	12 Bulan
	12	Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur	Wirid kantor dan kegiatan senam dikantor	12 Bulan
10		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100 %

	1	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	Honorium pengelola aset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset	12 Bulan
	2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	12 Bulan
	3	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	53 Unit
	4	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Gedung kantor yang terpelihara	3 Unit
	5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi dan Jaringan	Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara	6 Bulan
	6	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	26 Unit
	7	Pembangunan gedung kantor	Gedung kantor yang terbangun	1 Unit
	8	Pengadaan meubelair	Kebutuhan meubelair yang terpenuhi	15 Unit
	9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Mess	Rumah jabatan/ rumah dinas/ mess yang terpelihara	2 Unit
	10	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kebutuhan kendaraan operasional yang terpenuhi	1 Unit
11		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rata-rata lama PNS mengikuti diklat	100 %
	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Aparat sipil negara yang mengikuti bimbingan teknis	6 kali
12		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100 %
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kebutuhan pakaian dinas PNS/ Non PNS yang terpenuhi	573 Orang
13		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD	100 %
	1	Penatausahaan keuangan SKPD	Honor KPA, PPTK, dan PA serta Pengelola keuangan OPD lainnya yang terbayarkan	12 Bulan
	2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Lapoan Tahunan yang tersusun	5 Dokumen
	3	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja, dan Renstra yang tersusun	6 Dokumen

Sumber: Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

2.6 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Jumlah pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk pembangunan bidang kehutanan pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 114.858.550.391,- dan berubah menjadi Rp.103.168.994.701,67,- atau naik 24,68%, yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci, Rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Rencana Anggaran Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	45.776.541.797,67	44,37
2	Belanja Langsung	57.392.452.904	55,63
Jumlah		103.168.994.701,67	100,00

Sumber: APBD Perubahan Sumbar 2018

Dari alokasi anggaran belanja di atas, Belanja Langsung dibanding dengan tahun 2018 naik sebesar Rp. 19.626.823.915,- atau sekitar 51,97%. Dilihat dari proporsi antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2018, porsi Belanja Langsung pada tahun 2018 naik sebesar 9,99% dari 45,64% pada tahun 2017 menjadi 55,63% pada tahun 2018. Sementara Belanja Tidak Langsung turun sekitar 9,99% dari 54,36% pada tahun 2017 menjadi 44,37% pada tahun 2018. Hal ini berarti alokasi untuk pembangunan kehutanan pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2017, yang ditandai dengan semakin bertambahnya proporsi anggaran untuk belanja modal dan pembangunan kehutanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan (Belanja Langsung) dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk belanja pegawai (Belanja Tidak Langsung).

Alokasi anggaran Belanja Langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang kehutanan dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Alokasi Dana per Sasaran Tahun Anggaran 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Anggaran (%)
1.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	- Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	1.184.109.440	2,06
		- Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	9.564.265.060	16,66
		- Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan	315.900.000	0,55

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Anggaran (%)
2.	Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat	- Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	17.064.554.835	29,73
		- Persentase penurunan laju kerusakan hutan	4.519.931.510	7,88
		- Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	12.298.000.000	21,43
3.	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat	- Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	4.937.286.025	8,60
4.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	565.932.950	0,99
		- % Capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	6.942.473.084	12,10
Jumlah Belanja Langsung			57.392.452.904	100,00

Pada Tabel 9 di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 57.392.452.904,- dengan persentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat yaitu sebesar 59,04%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yaitu sebesar 19,27%. Sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan sebesar 8,60% dan Terwujudnya Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yaitu sebesar 13,09% dari total anggaran Belanja Langsung.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumberdaya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*), maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Untuk membangun akuntabilitas kinerja, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mengimplementasikan ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya penyempurnaan dari ISO 9001:2015 dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kehutanan yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik yang dilakukan melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi.

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai Permen PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai arahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, skala penilaian terhadap kinerja pemerintah dapat dilihat pada Tabel 10.

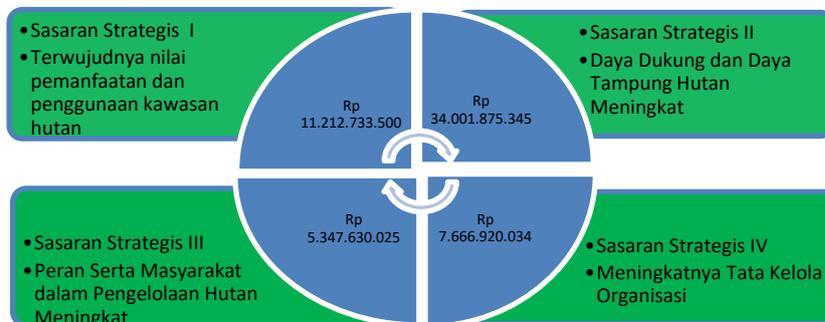
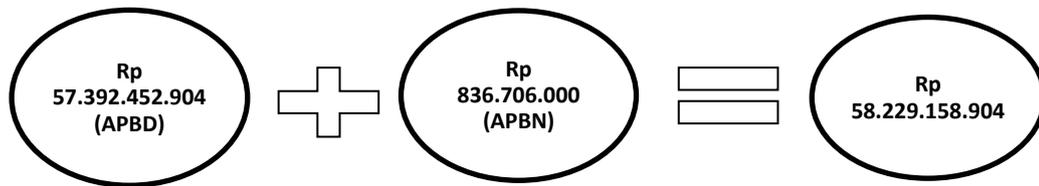
Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Klasifikasi	Predikat	Kode
1.	85% - 100%	Sangat Baik	
2.	69% - 84%	Baik	
3.	53% - 68%	Cukup	
4.	< 53%	Gagal	

Sumber: Arahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

ANGGARAN 2018



Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas, pengukuran kinerja dilakukan dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk persentase, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, dan membandingkan realisasi kinerja dengan standar serta membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja provinsi lain yang berdekatan. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam Tabel 10 akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018. Pencapaian target Indikator

Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh Tabel 11.

Tabel 11. Pencapaian IKU Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Kode
1.	Terwujudnya nilai pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100	
		Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	82%	92,93%	113,33	
		Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan	82%	76,26%	93,00	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi I					102,11	
2.	Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	Persentase penurunan luas lahan kritis	1.09%	1,10%	100,92	
		Persentase penurunan luas kerusakan hutan	10%	19,22%	192,20	
		Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	45%	86,32%	191,82	
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategi II					161,65	
3.	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	11,68%	16,62%	142,29	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategi III					142,29	
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	100	
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	95%	94,36%	99,33	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategi IV					99,67	
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I s/d IV					126,43	

Sumber: Diolah dari data primer, penetapan kinerja, dan monev pembangunan kehutanan 2018

Dari Tabel 11 diatas, hasil pengukuran kinerja menunjukkan 4 (empat) sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2018 berhasil mencapai tingkat capaian yang telah ditetapkan dengan rata-rata pencapaian sasaran strategis sebesar 126,43% yang termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

Dari sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis yang terdapat pada tabel diatas dapat dilihat secara umum bahwa pencapaian kinerja pada kategori berhasil (sesuai bahkan beberapa indikator capaiannya melebihi target). Capaian realisasi indikator tertinggi adalah persentase penurunan jumlah *hotspot* dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015). Selain sebagai dampak dari kebijakan/program/kegiatan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara intensif, hal ini juga didukung dengan kondisi cuaca dan iklim di Sumatera Barat pada tahun 2018 yang lebih banyak musim hujannya.

Hasil pencapaian kinerja pada Tabel 11 diatas merupakan kumulatif dari pencapaian program yang bersumber pada realisasi target kinerja kegiatan yang secara lengkap dapat diilustrasikan pada realisasi capaian kinerja kegiatan. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran pembangunan kehutanan diatas merupakan hasil realisasi program/kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bersama oleh Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan.

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Tabel 11, selanjutnya sub bab ini akan menguraikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran strategis. Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja (*outcome*) sasaran dengan melihat secara lebih rinci pada capaian target indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dengan dukungan data atau informasi hasil sasaran secara menyeluruh.

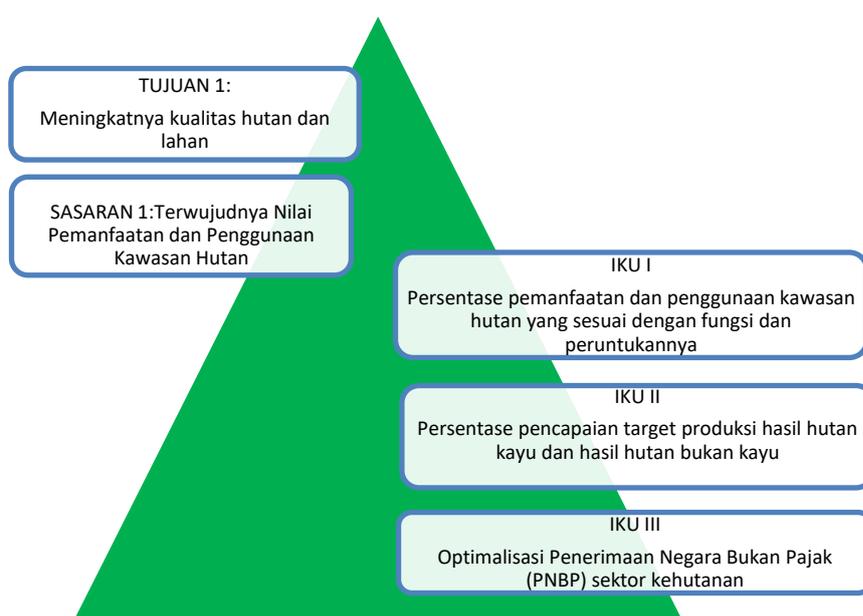
Capaian sasaran strategis diperoleh dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2016-2021.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut:

I. Meningkatkan Kualitas Hutan dan Lahan

Tujuan **Meningkatkan Kualitas Hutan dan Lahan** dicapai dengan menetapkan tiga Sasaran Strategis. Sasaran Strategis I yaitu **Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan** dan diukur dengan tiga indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian diatas dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Tujuan dan Sasaran Strategis I

“Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan” merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi untuk lestarnya pengelolaan hutan khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Luas kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat adalah $\pm 2.380.057$ Ha atau 56,27% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat ($\pm 4.229.730$ Ha) dengan fungsi kawasan hutan yang terbesar yaitu Hutan Lindung (± 791.671 Ha) dan Hutan Produksi (± 360.608 Ha), memiliki potensi hutan yang harus dimanfaatkan, baik hasil hutan maupun penggunaan kawasan hutan secara optimal. Nilai pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan merupakan satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan. Jika produktivitas hutan meningkat maka diharapkan hutan lestari dan

masyarakat sejahtera dapat terwujud. Indikator kinerja, target, dan realisasi dari sasaran 1 disajikan dalam Tabel 12.

Tabel 12. Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100
		Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK	82%	92,93%	113,33
		Nilai PNBK sektor kehutanan	82%	76,26%	93,00
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%)					102,11

Dari Tabel 12 tersebut terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis I pada Tahun 2018 berhasil dicapai. Rata-rata capaian sasaran 102,11% atau turun 0,56% dari tahun sebelumnya termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 102,11% diatas adalah potensi kawasan hutan Sumatera Barat telah termanfaatkan dengan optimal dan sesuai target yang ditetapkan oleh Gubernur kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 dan Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2018	Realisasi	
			2017 (n-1)	2018 (n)
Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK	82%	82,87%	92,93%
	Nilai PNBK sektor kehutanan	82%	85,63%	76,26%

Dari Tabel 13 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja masing-masing indikator diatas untuk indikator kinerja 1 yaitu Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya terealisasi sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. Indikator kinerja 2 yaitu Persentase Pencapaian Target Produksi HHK dan HHBK terealisasi 92,93% lebih tinggi 10,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator kinerja 3 yaitu Nilai

PNBP Sektor Kehutanan terealisasi 76,26% atau turun 9,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari realisasi ketiga indikator kinerja di atas artinya pada Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan tahun 2018 yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sudah optimal dan melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2018.

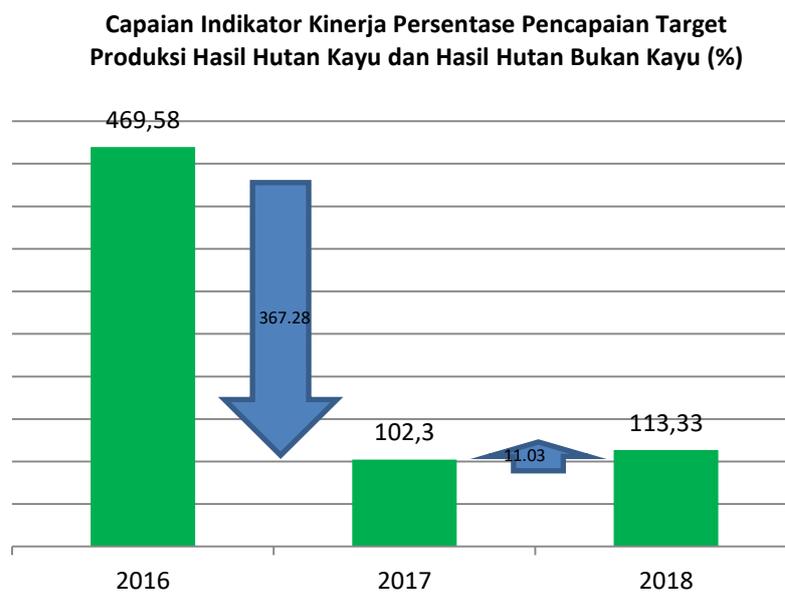
Capaian kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2016 s.d Tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 3, 4, dan 5.

IKU 1



Gambar 3. Capaian kinerja Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya (%) Tahun 2016 - 2018

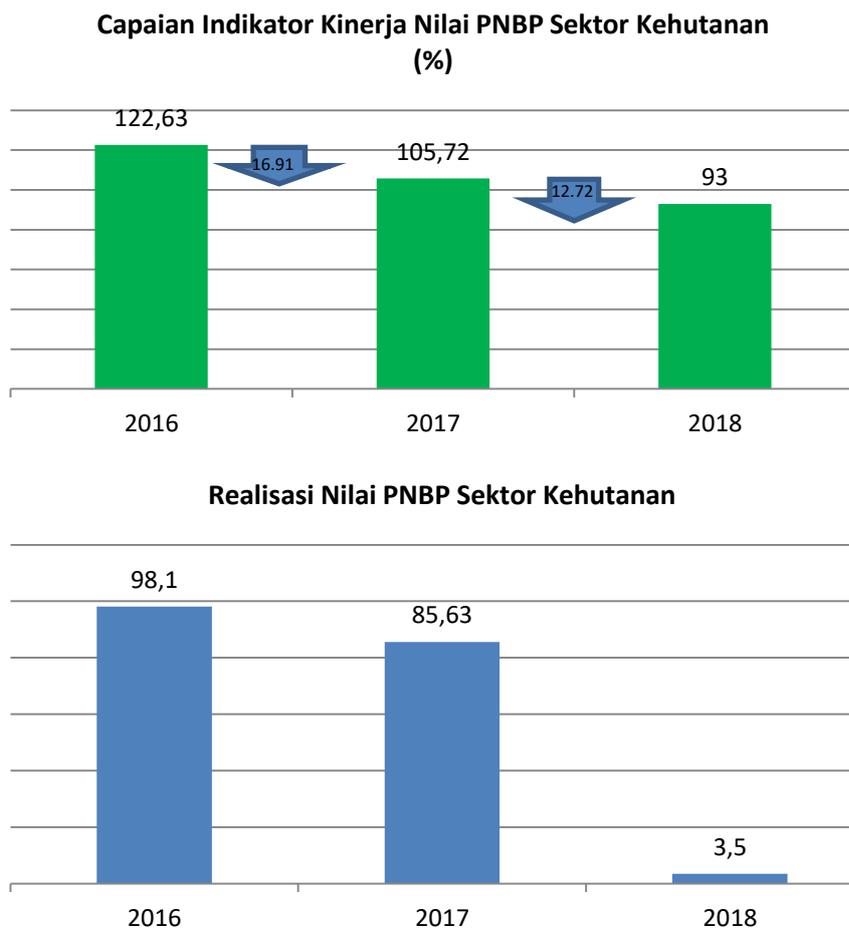
IKU 2





Gambar 4. Capaian kinerja Pencapaian Target Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (%) Tahun 2016 - 2018

IKU 3



Gambar 5. Capaian kinerja Nilai PNB Sektor Kehutanan (%) Tahun 2016 - 2018

Tabel 14. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan sampai Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target akhir Renstra/ RPJMD	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan (%)
Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100
	Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK	85%	92,93%	109,33
	Nilai PNBP sektor kehutanan	85%	76,26%	89,72

Tabel 14 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja masing-masing indikator di atas jika dibandingkan dengan target kinerja pada akhir RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari uraian capaian masing-masing indikator kinerja terhadap capaian akhir RPJMD Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- Indikator kinerja 1 yaitu Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya pada tahun ketiga Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tingkat kemajuannya 100% sesuai dengan target akhir Renstra yaitu 100%, hal ini disebabkan hingga akhir Renstra target capaian indikator kinerja di atas tetap 100%.
- Indikator kinerja 2 yaitu Persentase Pencapaian Target Produksi HHK dan HHBK pada tahun ketiga Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tingkat kemajuannya 109,33% atau melebihi target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Indikator kinerja 3 yaitu Nilai PNBP sektor kehutanan pada tahun ketiga Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tingkat kemajuannya 89,72% atau masih dibawah target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Seharusnya, tingkat kemajuan indikator

kinerja 3 tahun 2018 ini adalah 96,47%, lebih rendah 6,75% dari tingkat kemajuan yang seharusnya dicapai tahun ini.

Dari realisasi ketiga indikator kinerja di atas artinya, pada tahun 2018, capaian indikator kinerja 1 dan 2 pada sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan sudah melebihi tingkat kemajuan terhadap target kinerja akhir RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Sedangkan, indikator kinerja 3 masih dibawah tingkat kemajuan yang seharusnya.

Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja RPJMN (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi			Ket
		Sumbar 2018	Sumbar 2017	KemenLHK 2017	
Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	100%	100%	Sama
	Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK	92,93%	82,87%	-	-
	Nilai PNBP sektor kehutanan	76,26%	85,63%	170,65%	Lebih rendah

Dari Tabel 15 dapat dilihat bahwa capaian kinerja masing-masing indikator diatas jika dibandingkan dengan target kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja 1 yaitu persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sama dengan capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Artinya, hutan di Provinsi Sumatera Barat dan seluruh hutan Indonesia pada Tahun 2017 telah diupayakan dimanfaatkan dan digunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pengawasan izin usaha terhadap industri, prasarana dan jasa, kehutanan, dan sumberdaya alam selama tahun 2015 - 2017 telah dilakukan pencabutan izin (4 izin), pembekuan izin (21 izin), paksaan pemerintah (231 izin), teguran tertulis (23 izin) dan surat peringatan (155 izin).

- b. Indikator kinerja 2 yaitu Persentase Pencapaian Target Produksi HHK dan HHBK. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menjadikan indikator ini sebagai Indikator Kinerja Utama sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat.
- c. Indikator kinerja 3 yaitu nilai PNBPN sektor kehutanan, capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dikarenakan nilai PNBPN yang dihitung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih banyak variabelnya dibandingkan dengan variabel yang dihitung oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghitung PNBPN yang bersumber dari pendapatan jasa layanan umum dari program dana bergulir, iuran dan denda, pendapatan jasa dan pendapatan kehutanan, sedangkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat hanya menghitung PNBPN dari hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (pinus, rotan, wallet, karet, manau, dan tabu-tabu).

Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2018		Ket
		Sumbar	Riau	
Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	-	-
	Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK	82,87%	-	-
	Nilai PNBPN sektor kehutanan	85,63%	-	-

Dari Tabel 16 dapat dilihat bahwa capaian kinerja masing-masing indikator diatas untuk tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau hingga Januari 2019 tidak memberikan data di atas.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui dua program yang terdiri atas dua program dengan pembiayaan APBD dan satu program dengan pembiayaan APBN. Program dimaksud adalah:

1. Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan (APBD) yang terdiri atas lima kegiatan yaitu:
 - a. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan
 - b. Pengendalian Perencanaan dan Tata hutan
 - c. Pengendalian Penggunaan Pemanfaatan Kawasan Hutan
 - d. Sosialisasi Identifikasi Hutan Adat dan Penanganan Konflik Tenurial
 - e. Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK yang terdiri atas satu kegiatan, yaitu Konsultasi/Koordinasi Operasional KPH
3. Program Pemanfaatan Potensi SDH yang terdiri atas delapan kegiatan yaitu:
 - a. Pembinaan PNPB Sektor Kehutanan
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Industri Kehutanan
 - c. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH
 - d. Pengembangan Kemitraan Kehutanan
 - e. Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah KPH
 - f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH-Resort (DAK)
 - g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH-Wisata (DAK)
 - h. Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Tani Hutan-Alat Ekonomi Produktif (DAK)

Secara keseluruhan, kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik, kecuali kegiatan pembangunan sarana dan prasarana operasional KPH-Wisata yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini bisa dilihat dari realisasi capaian target indikator sasaran melalui hasil dan capaian indikator kinerja kegiatan yang dapat dilihat dari Tabel 17.

Tabel 17. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis I Tahun 2018

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
1.	Terwujudnya nilai pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	- Terpeliharanya batas kawasan hutan	70 km	70 km	100%	
			Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	- Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali	23 unit	23 unit	100%	

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
			Pengendalian perencanaan dan tata hutan	- Tersusunnya buku pengendalian perencanaan dan tata hutan	1 buku	1 buku	100%	
			Sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial	- Terlaksananya Sosialisasi Identifikasi Hutan Adat dan Penanganan Konflik Tenurial	20 Kali	20 Kali	100%	
			Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (DBH-DR)	- Jumlah konflik hutan adat yang teridentifikasi dan terfasilitasi	15 Buah	15 Buah	100%	
		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN)	Konsultasi/Koordinasi Operasional KPH	- Laporan konsultasi/koordinasi operasional KPH	1 Lap	1 Lap	100%	
		Program Pemanfaatan Potensi SDH	Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	- Termonitornya produksi hasil hutan dan PNBP sektor kehutanan	10 kab/kota	10 kab/kota	100%	
			Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Industri Kehutanan	- Termonitornya izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu	13 kab/kota	13 kab/kota	100%	
			Perencanaan dan pemanfaatan hutan pada wilayah KPH	- Hutan pada wilayah kelola KPH terencana dan termanfaatkan	5 petak	5 petak	100%	
			Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan	- Potensi hasil hutan diwilayah KPH yang terkelola	2 Komoditi	2 Komoditi	100%	
			Pengembangan Kemitraan Kehutanan	- Jumlah unit kemitraan	4 Unit	4 Unit	100%	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH-Resort (DAK)	- Operasionalisasi KPH dan TAHURA untuk peningkatan PAD melalui wisata	10 Unit	10 Unit	100%	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH-Wisata (DAK)	- Operasionalisasi KPH dan TAHURA untuk peningkatan PAD melalui wisata	1 Paket	1 Paket	100%	
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan-Alat Ekonomi	Peningkatan masyarakat desa sekitar hutan untuk penurunan indeks Gini	6 Unit	6 Unit	100%	

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
			Produktif (DAK)					

Uraian capaian IKU Sasaran Strategis I adalah sebagai berikut:

1. Indikator Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya" memiliki target sebesar 100%, terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator tersebut diatas dihitung dengan formula luas pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan perizinannya pada tahun 2018 dibagi dengan luas kawasan hutan yang dibebani izin pada tahun 2018 dikalikan angka 100%.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Perencanaan Makro, Pemantapan Kawasan Hutan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK seperti terlihat pada Tabel 17 di atas. Capaian Target IKU persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya Tahun 2018 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 18 berikut ini.

Tabel 18. Capaian Target IKU Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya per Triwulan Tahun 2018.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	Capaian %	TRW II	Capaian %	TRW III	Capaian %	TRW IV	Capaian %
Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	a Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	16%	55%	87%	100%	25,60%	160	50,54%	91,89	100%	100	100%	100

Dari Tabel 18 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut diatas setiap triwulannya dapat dicapai sesuai bahkan melebihi target triwulan yang ditetapkan, kecuali triwulan II dari target 55% direalisasi 50,54%. Hal ini

dikarenakan alasan teknis yang menyebabkan tim merubah jadwal monev pada triwulan III. Tercapainya target setiap triwulan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya dilakukan dengan baik.

Untuk mencapai target kinerja indikator "Persentase Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya" Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi terhadap unit penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan, unit pemanfaatan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri, unit pemanfaatan kawasan hutan untuk Hutan Nagari (HN), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang sesuai dengan perizinan yang diberikan atas hak penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Pesatnya perkembangan pembangunan kegiatan non kehutanan pada kawasan hutan, pengelolaan hutan melalui IUPHHK-HA/HTI, dan pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam skema Perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat mendorong perlunya dilakukan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan Hutan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan di wilayah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peruntukan dan perizinannya.

Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan harus dimonitor agar sesuai dengan fungsi dan peruntukannya serta sesuai dengan mekanisme dan prosedur perizinan yang berlaku dalam rangka mewujudkan kepastian dalam penggunaan kawasan hutan. Pada tahun 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 122 unit penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan seperti disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Hasil Monitoring Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat

No	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Kesesuaian Izin
1.	Bupati Pasaman Barat	Pembangunan Pelabuhan Umum dan jalan Teluk Tapang – Air Bangis	122,01	HP dan HL	Sesuai
2.	PT. Gamindra Mitra Kesuma	Operasi Produksi Biji Besi dan Jalan Tambang	102,22	HPT	Sesuai
3.	LAPAN	Lokasi pengamatan Atmosfer	17,17	HPT	Sesuai
4.	Bupati Lima Puluh Kota	Pembangunan jalan menuju Transmigrasi Koto Tangah	8,37	HPK	Sesuai
5.	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Pembangunan jalan menuju lokasi Transmigrasi Padang Tarok	14,48	HPK	Sesuai
6.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok	Pembangunan jalan ruas Aie Luo – Kipek	184,25	HPK	Sesuai
7.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok	Pembangunan jalan ruas Sapan - Air Dingin	0,571	HPT	Sesuai
8.	Bupati Solok	Pembangunan jalan ruas Garabak Data-Batu Bajanjang	11	HL Batang Palangki	Sesuai
9.	Walikota Padang	Pembangunan jalan Bungus-Kalampaian	17,05	HL	Sesuai
10.	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Padang Pariaman	Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Air Bersih	0,0575	HL Barisan I	Sesuai
11.	PT Galian Endapan Buana	Pertambangan galena	153,89	HP	Sesuai
12.	Bupati Kepulauan Mentawai	Pembangunan Instalasi Listrik Biomassa	5,29	HP	Sesuai
13.	PT Semen Padang	Tambang Batu Kapur	242,3	HPT	Sesuai
14.	PT Hitay Daya Energy	Eksplorasi Panas Bumi (Geothermal)	679	HL	Sesuai
15.	PT Allied Indo Coal Jaya	Tambang Batubara	368,96	HP Serasah	Sesuai
16.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto	Pembangunan Embung	3,65	HPK	Sesuai
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Prov. Sumbar	Rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi Batang Sangki I	2	HL	Sesuai
18.	PT. PLN (PERSERO) PIKITRING SBS	Pembangunan PLTU	51,19	HL	Sesuai
19.	PT PLN (Persero)	SUTT dan Tapak	18,37	HL & HP	Sesuai

No	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Kesesuaian Izin
		Tower Ombilin - Kiliran Jao			
20.	PT Multi Energi Dinamika	PLTM Tarusan	4,5	HL	Sesuai
21.	PT PLN (Persero)	Transmisi SUTET 275 Kv GI Padang Sidempuan - GI Payakumbuh	25,78	HL dan HP	Sesuai
22.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Sumbar	Pembangunan terowongan jalan Balingka-Sianok	2,7	HL	Sesuai
23.	PT ANDALAS MERAPI TIMBER Camp Barikan – sangir Jujuhan Solse	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Alam	± 28.840	HP	Sesuai
24.	PT. SALAKI SUMMA SEJAHTERA Camp Tiniti – Siberut Barat	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Alam	± 47.605	HP	Sesuai
25.	PT. MULTIKARYA LISUN PRIMA Camp Padang Tarok – Sijunjung	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Alam	± 28.885	HP	Sesuai
26.	PT. MINAS PAGAI LUMBER Camp Pulaga – Sikakap	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Alam	± 78.000	HP	Sesuai
27.	PT. BUKIT RAYA MUDISA Km. 7 Camp Muara Takung – Sjjg	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Tanaman	± 28.617	HP	Sesuai
28.	PT. DHARA SILVA LESTARI Kenagarian Bonjol – Koto Baru	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Tanaman	± 15.357	HP	Sesuai
29.	PT. SUKSES JAYA WOOD Kenagarian Lunang – Silaut	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan- Hutan Tanaman	1.583,90	HP	Sesuai
30.	1. LPHN Simanau 2. LPHN Sirukam 3. LPHN Sungai Abu 4. LPHN Sariak Alahan Tigo 5. LPHN Simancuang 6. LPHN Pulakek Koto Baru 7. LPHN Pakan Rabaa 8. LPHN Pasir Talang Timur 9. LPHN Koto Baru	Hutan Nagari (HN)	167.062	HL,HP	Sesuai

No	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Kesesuaian Izin
10.	LPHN Ranah Pantai Cermin				
11.	LPHN Padang Limau Sundai				
12.	LPHN Sako Utara Pasie Talang				
13.	LPHN Lubuk Gadang Selatan				
14.	LPHN Pakan Rabaa Timur				
15.	LPHN Padang Air Dingin				
16.	LPHN Padang Gantiang				
17.	LPHN Pakan Rabaa Tengah				
18.	LPHN Lubuk Malako				
19.	LPHN Paru				
20.	LPHN Muaro Takung				
21.	LPHN Lubuk Tarantang				
22.	LPHN Manganti				
23.	LPHN Sungai Betung				
24.	LPHN Aie Angek				
25.	LPHN Langki				
26.	LPHN Sisawah				
27.	LPHN Timbulun				
28.	LPHN Pulasan				
29.	LPHN Silongo				
30.	LPHN Kampung Dalam				
31.	LPHN Sumpur Kudus				
32.	LPHN Tanjuang Bonai Aur				
33.	LPHN Unggan				
34.	LPHN Buluh Kasok				
35.	LPHN Lubuk Tarok				
36.	LPHN Air Bangis				
37.	LPHN Katiagan				
38.	LPHN Simpang				
39.	LPHN Muaro Sei Lolo				
40.	LPHN Tanjung Betung				
41.	LPHN Ganggo Mudiak				
42.	LPHN Padang Mentinggi				
43.	LPHN Muara Tais				

No	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Kesesuaian Izin
44.	LPHN Alahan Mati				
45.	LPHN Silayang				
46.	LPHN Koto Nopan				
47.	LPHN Jambak				
48.	LPHN Lubuk Gadang				
49.	LPHN Gunung Selasih				
50.	LPHN Lubuk Karak				
51.	LPHN Pagadih				
52.	LPHN Padang Tarok				
53.	LPHN Simarasok				
54.	LPHN Koto Kaciak				
55.	LPHN Lubuk Basung				
56.	LPHN Baringin				
57.	LPHN Kamang Hilia				
58.	LPHN Sitalang				
59.	LPHN Koto Rantang				
60.	LPHN Pasia Laweh				
61.	LPHN Kamang Mudiak				
62.	LPHN Sungai Buluh				
63.	LPHN Sungai Rimbang				
64.	LPHN Taeh Bukik				
65.	LPHN Kubang				
66.	LPHN Taram				
67.	LPHN Kurai				
68.	LPHN Sungai Balantiak				
69.	LPHN Pandam Gadang				
70.	LPHN Banja Laweh				
71.	LPHN VII Koto Talago				
72.	LPHN Sialang				
73.	LPHN Baruah Gunung				
74.	LPHN Harau				
75.	LPHN Koto Tinggi				
76.	LPHN Simpang Kapuak				
77.	LPHN Batipuah Baruah				

No	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Kesesuaian Izin
	78. LPHN Kambang Timur 79. LPHN Lunang 80. LPHN Lunang Tengah 81. LPHN Kapujan Koto Berapak 82. LPHN Barung2 Belantai Selatan 83. LPHN Pondok Parian Lunang				
31.	1. HKm Maju Bersama 2. HKm Gunung Leco 3. HKm Ingin Makmur 4. HKm ICU 5. HKm Pasada Roha Bulu Laga 6. HKm Marguna Alam 7. HKm Situak 8. HKm Roba Julu 9. HKm Gunung Sigantang 10. HKm Suka Menang Aia Kacang 11. HKm Saiyo 12. HKm Rap Hita Saiyo 13. HKm Tombang Pinang 14. HKm Harapan Baru 15. HKm Karya Setia 16. HKm Pangduhu Maju 17. HKm Sontra 18. HKm Beringin Sakti 19. HKm Bukit Lestari 20. HKm Patamuan Saiyo 21. HKm Musus Saiyo 22. HKm Harapan Jaya Batu Ampar 23. HKm Wana Lestari 24. HKm KSU Solok Rajo	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	28.418	HL,HP	Sesuai

No	Nama Perusahaan/ Pengguna	Jenis Kegiatan	Pemanfaatan dan Penggunaan		
			Luas (Ha)	Fungsi Hutan	Kesesuaian Izin
	25. HKm KSU-ED Tabek				
	26. HKm Aur Serumpun				
	27. HKm Leter W				
	28. HKm Sialangan				
	29. HKm Sungai Tuo				
	30. HKm Batu Bapayuang				
	31. HKm Lurah Basuang				
	32. HKm Tak Boncah Batu Badaguak				
	33. HKm Padang Janiah				
	34. HKm Sikayan Balumuik				
	35. HKm Simpang Tanjuang				
	36. HKm Sungai Abu Mandiri				
	37. HKm Saiyo Sakato				
	38. HKm Rambaian Manduang				
	39. HKm Kubuak				
	40. HKm Kampuang Malayu Saiyo				
	41. HKm Tetesan Embun				
	42. HKm Agroforestri Aro Sepakat				
32.	KTH Minang Saiyo, KTH Giat Bersama, KTH Mekar Jaya, KSU Air Bangis	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	6.935	Hutan Produksi	Sesuai
JUMLAH			433.525,02		

Dari Tabel 19 di atas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 158 unit/perusahaan yang melakukan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri atas 22 unit menggunakan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan, 4 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA), 3 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri, 83 unit

memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Nagari (HN), 42 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan 4 unit memanfaatkan kawasan hutan untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Sebanyak 158 unit/perusahaan yang memanfaatkan dan menggunakan kawasan hutan tersebut diatas, berdasarkan hasil evaluasi tim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, telah menggunakan dan memanfaatkan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sesuai aturan yang berlaku.

2. Indikator persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu" memiliki target sebesar 82%, terealisasi sebesar 92,93% dengan tingkat capaian 113,33% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator tersebut diatas dihitung dengan membandingkan realisasi produksi HHK dan HHBK tahun N dan target produksi HHK dan HHBK tahun N dikalikan 100%.Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Pemanfaatan Potensi SDH seperti terlihat pada Tabel 17 di atas.

Capaian Target IKU persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu tahun 2018 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 20.

Tabel 20. Capaian Target IKU Persentase Pencapaian Target Produksi HHK dan HHBK

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	a Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK	20%	40%	60%	82%	5,79%	28,95	42,86%	107,15	61,88%	103,13	92,93%	113,33

Dari Tabel 20 diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut diatas setiap triwulannya dapat dicapai sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan, kecuali pada Triwulan I hanya terealisasi 5,79%. Hal ini disebabkan pada Triwulan I tersebut pemegang izin tidak beroperasi dikarenakan kondisi curah hujan yang tinggi. Tercapainya target pada triwulan II,II dan III menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

realisasi produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dilakukan dengan baik.

Untuk mencapai target kinerja indikator "Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK", Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pemegang izin pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sesuai dengan target produksi yang ditetapkan.

Produksi HHK dan HHBK harus dimonitor agar sesuai dengan target produksi yang ditetapkan serta sesuai dengan mekanisme dan prosedur perijinan yang berlaku. Pada tahun 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi produksi HHK dan HHBK di Provinsi Sumatera Barat dengan uraian seperti pada Tabel 21.

Tabel 21. Target dan Realisasi Produksi HHK dan HHBK di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

NO	KABUPATEN / KOTA	TARGET TAHUN 2018			REALISASI HASIL HUTAN KAYU					REALISASI HASIL HUTAN NON KAYU				
		PROD			Indah	Meranti	Campuran	KBK	Acasia	Manau	Tabu2	Walet	G. Karet	G. Pinus
		HHK	ACASIA	HHBK	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(M3)	(Btg)	(Btg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Kabupaten Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lelang kayu	-	-	-	-	1,29	3,07	-	-	-	-	-	-	-
	G. Pinus	-	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lelang kayu	-	-	-	-	268,81	324,03	-	-	-	-	-	-	-
	G. Pinus	-	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
	Manau	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	2.000,00	-	-	-
	Tabu-tabu	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Semambu	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rotan Lainnya	-	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Limapuluh Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	G. Pinus	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.090,00
4	Kabupaten Solok	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HHK Sarima Dasnir	-	-	-	-	120,39	504,26	-	-	-	-	-	-	-
	Kel. Meranti	6.000,00	-	-	-	931,06	156,07	-	-	-	-	-	-	-
	Kel. Campuran	9.000,00	-	-	-	16,09	1.906,33	-	-	-	-	-	-	-
	Gedah Pinus	-	-	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425.690,00
	Manau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lelang Wiki Maida Riski	-	-	-	-	-	10,83	-	-	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Pesisir Selatan	2.275,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hak KSU Wana Lestari	-	-	-	-	66,65	118,00	17,28	-	-	-	-	-	-
	Kel. Meranti	25,00	-	-	-	77,53	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kel. Campuran	250,00	-	-	-	-	49,47	-	-	-	-	-	-	-
	KBK	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PTSIW (Karet)	-	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,31	-
	G. Pinus	-	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.086,00
	Manau	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tabu-tabu	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dari Tabel 21 diatas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2018, realisasi produksi HHK dan HHBK terhadap target terealisasi rata-rata sebesar 92,93% dengan uraian sebagaimana Tabel 22.

Tabel 22. Realisasi Produksi HHK dan HHBK terhadap Target Tahun 2018

No.	Target	Satuan	Realisasi	Satuan	% Realisasi terhadap target	
I	HHK :					
	Kayu	170.714,45	m ³	130.690,77	m ³	76,56
II	HHBK :					
1	Acasia	113.400,00	m ³	3.163,62	m ³	2,79
2	Rotan	10,00	ton	-	ton	-
3	Manau	195.000,00	batang	75.000,00	batang	38,46
4	Tabu-Tabu	40.000,00	batang	29.300,00	batang	73,25
5	Walet	600,00	kg	1.666,00	kg	277,67
6	Getah Karet	60,00	ton	100,31	ton	167,18
7	Getah Pinus	800,00	ton	860,53	ton	107,57
		Persentase HHK & HHBK				743,47
	Rata-rata					92,93

Rata-rata realisasi produksi hasil hutan terhadap target adalah: 92,93 %.

3. Indikator Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan" memiliki target sebesar 82%, terealisasi sebesar 76,26% dengan tingkat capaian 93% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator tersebut diatas dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan negara sektor kehutanan tahun N dan target penerimaan negara sektor kehutanan tahun N dikalikan 100%.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Pemanfaatan Potensi SDH seperti terlihat pada Tabel 17 di atas. Capaian Target IKU persentase Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan Tahun 2018 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 23.

Tabel 23. Capaian Target IKU Nilai PNBP Sektor Kehutanan per Triwulan Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	A Nilai PNBP sektor kehutanan	20%	40%	60%	82%	15,86%	79,30	37,73%	94,32	72,14%	120,23	76,26%	93

Dari Tabel 23 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut setiap triwulannya tidak dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, kecuali pada Triwulan III dapat direalisasi melebihi target. Tidak terealisasinya nilai PNBP sektor kehutanan sesuai target disebabkan produksi hasil hutan kayu tidak banyak dikarenakan pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu tidak melaksanakan produksi hasil hutan sesuai target. Kendala di lapangan mengakibatkan setoran PSDH-DR juga berkurang. Tidak optimalnya pencapaian target setiap triwulan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kehutanan perlu ditingkatkan.

Untuk mencapai target kinerja indikator "Nilai PNBP Sektor Kehutanan", Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pemegang izin pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sesuai dengan target PNBP yang ditetapkan.

PNBP sektor kehutanan harus dimonitor agar sesuai dengan target PNBP yang ditetapkan serta sesuai dengan mekanisme dan prosedur perizinan yang berlaku. Pada tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi PNBP sektor kehutanan di Provinsi Sumatera Barat dengan uraian seperti pada Tabel 24.

Tabel 24. Target dan Realisasi PNPB Sektor Kehutanan di Sumatera Barat Tahun 2018

NO	KABUPATEN / KOTA	TARGET TAHUN 2018						REALISASI PSDH - DR Jan 2018 s/d November 2018 Tambah Nov-Des 2017			
		PROD			PSDH	DR	DR	PSDH	DR	DR	
		HHK	ACASIA	HHBK	(Rp)	US \$	(Rp. 13.000)	(Rp)	US \$	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Kabupaten Agam	-	-	-	2.520.000,00	-	-	-	-	-	-
	Lelang kayu	-	-	-	-	-	-	208.740,00	-	-	-
	G. Pinus	-	-	60,00	2.520.000,00	-	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Pasaman	-	-	-	10.810.500,00	-	-	-	-	-	-
	Lelang kayu	-	-	-	-	-	-	28.220.860,00	-	-	-
	G. Pinus	-	-	60,00	2.520.000,00	-	-	252.000,00	-	-	-
	Manau	-	-	35.000,00	6.300.000,00	-	-	1.140.000,00	-	-	-
	Tabu-tabu	-	-	10.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-
	Semambu	-	-	10.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-
	Rotan Lainnya	-	-	5,00	190.500,00	-	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Limapuluh Kota	-	-	-	16.800.000,00	-	-	-	-	-	-
	G. Pinus	-	-	400,00	16.800.000,00	-	-	13.048.632,00	-	-	-
4	Kabupaten Solok	15.000,00	-	-	771.720.000,00	199.500,00	2.593.500.000,00	-	-	-	-
	HHK Sarima Dasnir	-	-	-	-	-	-	24.535.740,00	7.970,38	103.614.940,00	
	Kel. Meranti	6.000,00	-	-	414.000.000,00	87.000,00	1.131.000.000,00	133.358.170,00	36.047,78	468.621.140,00	
	Kel. Campuran	9.000,00	-	-	351.000.000,00	112.500,00	1.462.500.000,00	8.235.040,00	2.882,28	37.469.640,00	
	Gedah Pinus	-	-	160,00	6.720.000,00	-	-	17.878.980,00	-	-	
	Manau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lelang Wki Maida Riski	-	-	-	-	-	-	422.370,00	-	-	
5	Kabupaten Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kabupaten Pesisir Selatan	2.275,00	-	-	73.475.000,00	11.487,50	149.337.500,00	-	-	-	
	Hak KSU Wana Lestari	-	-	-	-	-	-	3.068.230,00	686,98	8.930.740,00	
	Kel. Meranti	25,00	-	-	1.725.000,00	362,50	4.712.500,00	3.255.310,00	628,44	8.169.720,00	
	Kel. Campuran	250,00	-	-	9.750.000,00	3.125,00	40.625.000,00	2.260.440,00	420,04	5.460.520,00	
	KBK	2.000,00	-	-	62.000.000,00	8.000,00	104.000.000,00	-	-	-	
	PT SJIW (Kareit)	-	-	60,00	9.000.000,00	-	-	15.627.300,00	-	-	
	G. Pinus	-	-	20,00	840.000,00	-	-	256.600,00	-	-	
	Manau	-	-	30.000,00	5.400.000,00	-	-	-	-	-	
	Tabu-tabu	-	-	10.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	
7	Kabupaten Tanah Datar	-	-	-	1.680.000,00	-	-	-	-	-	
	G. Pinus	-	-	40,00	1.680.000,00	-	-	4.185.900,00	-	-	
8	Kabupaten Sijunjung	27.137,59	-	-	1.559.126.310,00	372.547,90	4.843.122.635,00	-	-	-	
	IUPHHK-HA PT MLP	-	-	-	-	-	-	258.583.069,00	59.581,16	774.555.080,00	
	Kel. Meranti	16.664,01	-	-	1.149.816.690,00	241.628,15	3.141.165.885,00	-	-	-	
	Kel. Campuran	10.473,58	-	-	408.469.620,00	130.919,75	1.701.956.750,00	-	-	-	
	KBK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Indah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IPK PT AIR GANING CITY	-	-	-	-	-	-	104.198.900,00	27.313,24	355.072.120,00	
	Lelang Sudi	-	-	-	-	-	-	5.689.529,00	-	-	
	Lelang Guziman	-	-	-	-	-	-	2.379.810,00	-	-	
	G. Pinus	-	-	20,00	840.000,00	-	-	336.000,00	-	-	
9	Kabupaten Kep. Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IUPHHK-HA PT MPL	58.937,65	-	-	3.981.915.150,00	848.943,75	11.036.268.685,00	2.410.599.410,00	514.740,41	6.691.625.330,00	
	Kel. Meranti	56.111,56	-	-	3.871.697.640,00	813.617,62	10.577.029.060,00	1.681.540.720,00	353.217,56	4.591.828.280,00	
	Kel. Campuran	2.826,09	-	-	110.217.510,00	35.326,13	459.239.625,00	-	-	-	
	KBK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IUPHHK-HA PT SSS	67.364,21	-	-	4.617.757.590,00	974.756,19	12.671.830.405,00	2.345.753.750,00	506.750,81	6.587.760.530,00	
	Kel. Meranti	66.351,78	-	-	4.578.272.820,00	962.100,81	12.507.310.530,00	1.366.763.720,00	287.391,10	3.736.084.300,00	
	Kel. Campuran	1.012,43	-	-	39.484.770,00	12.655,38	164.519.875,00	-	-	-	
	KBK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IPHHBK	-	-	-	19.390.500,00	-	-	-	-	-	
	Manau	-	-	100.000,00	18.000.000,00	-	-	12.600.000,00	-	-	
	Tabu-tabu	-	-	10.000,00	1.200.000,00	-	-	3.276.000,00	-	-	
	Rotan	-	-	5,00	190.500,00	-	-	-	-	-	
10	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-	603.020.390,00	-	-	
11	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Kota Sawahlunt	-	-	-	1.680.000,00	-	-	-	-	-	
	G. Pinus	-	-	40,00	1.680.000,00	-	-	294.000,00	-	-	
13	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IPPKH PT Semen Padang	-	-	-	-	-	-	31.990.120,00	6.214,73	80.791.490,00	
	Lelang Slamet Triyono	-	-	-	-	-	-	469.200,00	-	-	
15	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Kabupaten Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hak Kelten Sungai Pauh Duo	-	-	-	-	-	-	105.669.090,00	21.397,73	278.170.490,00	
	IUPHHK-HT PT BRM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IUPHHK-HTPT DHARA SILVA LESTARI	-	-	-	-	-	-	6.706.700,00	1.401,40	18.218.200,00	
18	Kabupaten Solok Selatan	-	113.400,00	-	952.560.000,00	-	-	-	-	-	
	IUPHHK-HT PT BRM	-	113.400,00	-	952.560.000,00	-	-	26.574.408,00	-	-	
	KUD Lubuk Ulang Aling Mandiri	-	-	-	-	-	-	29.289.624,00	-	-	
19	Kabupaten Pasaman Barat	-	-	-	42.600.000,00	-	-	-	-	-	
	KSU HB Tombang	-	-	600,00	36.000.000,00	-	-	70.980.000,00	-	-	
	Manau	-	-	30.000,00	5.400.000,00	-	-	-	-	-	
	Tabu-tabu	-	-	10.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	
	J U M L A H	170.714,45	113.400,00	-	12.068.475.050,00	2.407.235,33	31.294.059.225,00	9.322.667.752,00	1.826.644,04	23.746.372.520,00	
	JUMLAH TOTAL						43.362.534.275,00			33.069.040.272,00	

Dari Tabel 24 di atas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2018, realisasi PNBP terhadap target terealisasi rata-rata sebesar 76,26% dengan penghitungan

REALISASI :	$\frac{33,069,040,272.00}{43,362,534,275.00}$	x 100 %	= 76.26 %
-------------	---	---------	-----------

Permasalahan:

1. Belum pahamnya masyarakat dan perusahaan terhadap aturan pemanfaatan dan pengelolaan hutan;
2. Rendahnya partisipasi perusahaan untuk melakukan kewajibannya sebagai pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
3. Masih lemahnya pemantauan terhadap aktivitas pemanfaatan dan penggunaan kawasan pada areal-areal konsesi.

Solusi:

1. Melakukan sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan kepada masyarakat maupun perusahaan;
2. Melakukan pembinaan terhadap pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
3. Melakukan identifikasi, monitoring, dan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar kehutanan di kabupaten/kota.

Sasaran Strategis II yaitu **Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat**, diukur dengan tiga indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis II

Daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam dapat dicapai diantaranya dengan menurunkan luas lahan kritis dan mempertahankan kelestarian hutan melalui beberapa cara, diantaranya menjaga hutan dari *illegal logging* dan kebakaran hutan yang merupakan penyebab kerusakan hutan. Provinsi Sumatera Barat memiliki kawasan hutan seluas ± 2.380.057 ha dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor: SK.4/V-DAS/2015 tentang Penetapan Peta dan Data Hutan dan Lahan Kritis Nasional Tahun 2015, total lahan kritis di Provinsi Sumatera Barat adalah 630.695 ha artinya 26,50% dari kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat yang diidentifikasi mengalami penurunan daya dukung ekologi dan ekosistem (kritis). Luas lahan kritis seluas 630.695 ha yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini merupakan tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk menurunkan angka tersebut. Selain menurunkan luas lahan kritis, sasaran “Meningkatnya Kemampuan Hutan dalam Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Fungsinya” dicapai dengan menurunkan laju kerusakan hutan, meningkatkan persentase penurunan jumlah *hotspot* dari angka periode tahun sebelumnya (2011-2015), dan menurunkan luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 25. Pencapaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat Tahun 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	1,09 %	1,10%	100,92
		Persentase penurunan laju kerusakan hutan	10%	19,22%	192,20
		Persentase penurunan jumlah titik panas (<i>hot spot</i>) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	45%	86,32%	191,82
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%)					161,65

Dari Tabel 25 tersebut terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis II pada Tahun 2018 berhasil dicapai. Rata-rata capaian sasaran adalah 161,65%, yang termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Capaian kinerja Sasaran Strategis II yang tinggi bukan dikarenakan kesalahan penetapan target kinerja, tapi lebih didorong oleh progresifnya inovasi Perhutanan Sosial (PS) dan

Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PPHBN) dalam 2 tahun terakhir, yang mampu menekan aktivitas-aktivitas yang cenderung merusak kawasan hutan. Argumen lainnya adalah metode analisis spasial untuk mengukur indikator kinerja “Persentase penurunan laju kerusakan hutan” juga sudah menerapkan penelaahan citra resolusi tinggi. Sementara itu, khusus untuk indikator kinerja “Persentase Penurunan Jumlah *HotSpot* dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)” merupakan indikator yang bersifat situasional, sangat tergantung pada kasus perambahan dan *illegal logging* serta keadaan iklim dan cuaca, disamping sudah makin membaiknya sistem pengendalian kerusakan dan kebakaran hutan yang bersifat preventif sampai ke tingkat tapak (masyarakat). Indikator kinerja “Persentase penurunan laju kerusakan hutan” dan indikator kinerja “Persentase Penurunan Jumlah *Hotspot* dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)” sesuai dengan hasil evaluasi RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Evaluasi Renja, dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 bahwa capaian indikator kinerja tersebut terlalu tinggi maka melalui surat Nomor 050/4940/Sekr-2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Perubahan Target Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan perubahan target indikator tersebut diatas sebagai berikut:

1. Target indikator kinerja “Persentase penurunan laju kerusakan hutan” semula 5.15% menjadi 10%.
2. Target indikator kinerja “Persentase Penurunan Jumlah *Hotspot* dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)” semula 15% menjadi 45%.

Sasaran kinerja ini cenderung bersifat teknokratis dan metodologis mengingat beberapa indikator yang dipakai memiliki parameter yang bersifat kasuistis (situasional) dan tergantung pada faktor yang tidak dapat dikontrol dalam perencanaan.

Tabel 26. Perbandingan Capaian Kinerja Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan Tahun 2017 dan Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2018	Realisasi	
			2017 (n-1)	2018 (n)
Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	1.09%	0,43%	1,10%
	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	10%	9,92%	19,22%
	Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	45%	88,21%	86,32%

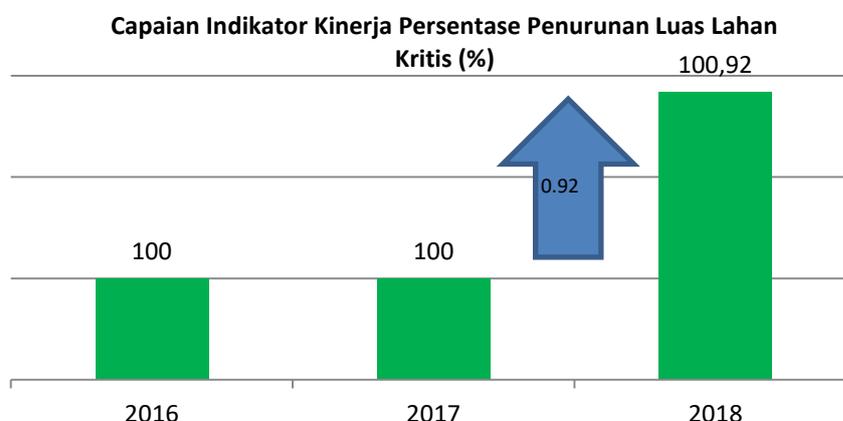
Dari Tabel 26 di atas dapat diketahui bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya indikator kinerja 4 yaitu persentase penurunan luas lahan kritis terealisasi 1,10% atau mengalami peningkatan 0,67% dari realisasi tahun lalu. Indikator kinerja 5 yaitu persentase penurunan laju kerusakan hutan terealisasi 19,22% atau mengalami peningkatan 9,30% dari realisasi tahun lalu.

Indikator kinerja 6 yaitu persentase penurunan jumlah titik panas (*hotspot*) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015) terealisasi 86,32% atau mengalami penurunan 1,89% dibanding tahun lalu dikarenakan adanya penyesuaian indikator kinerja.

Dari realisasi ketiga indikator kinerja di atas, artinya pada tahun 2018, daya dukung dan daya tampung hutan di Provinsi Sumatera Barat sudah optimal dan melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2018.

Capaian kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan Tahun 2016 - 2018 dapat dilihat pada Gambar 7, 8, dan 9.

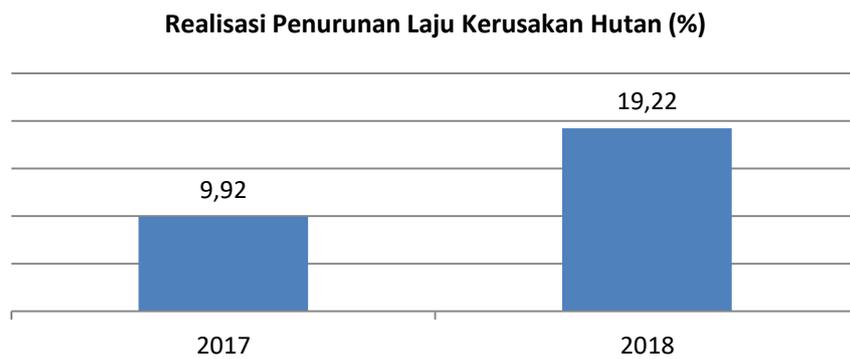
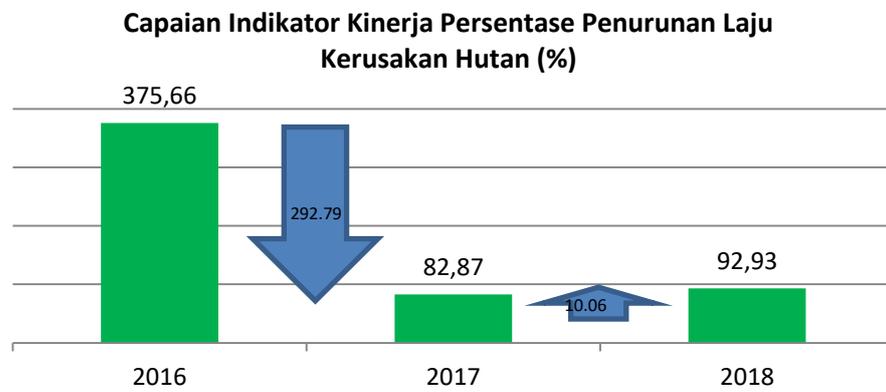
IKU 4





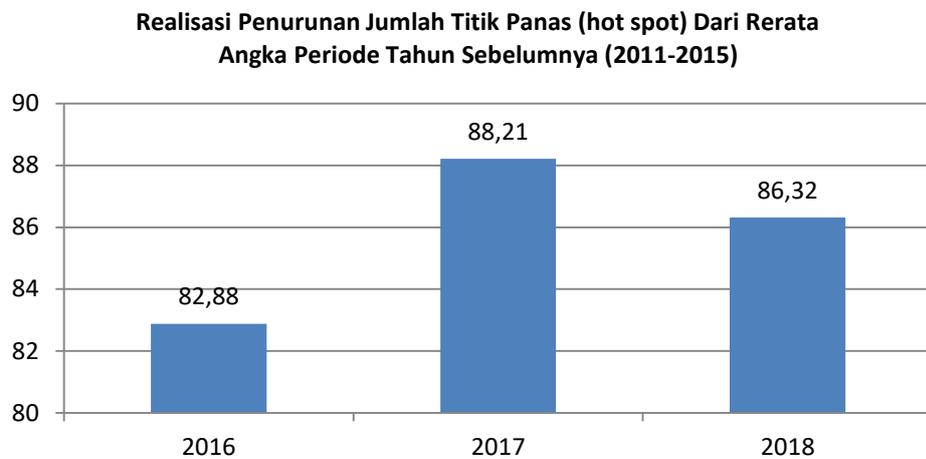
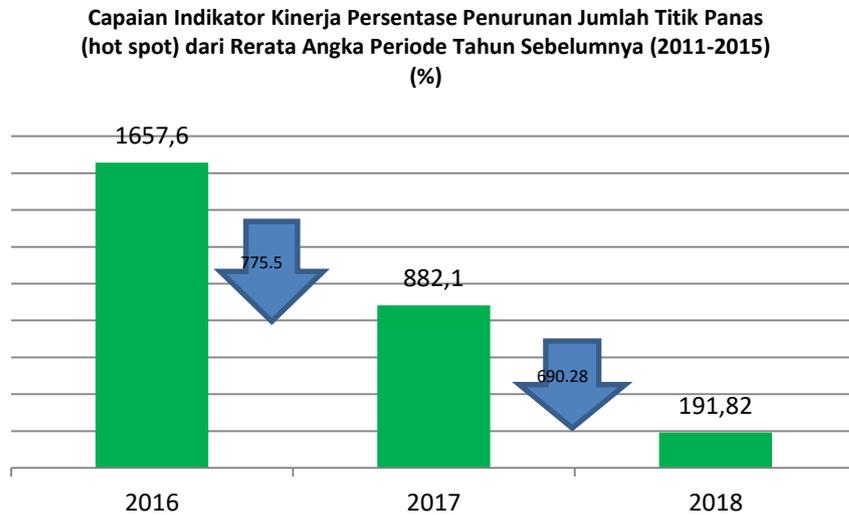
Gambar 7. Capaian Kinerja Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis Tahun 2016 - 2018

IKU 5



Gambar 8. Capaian Kinerja Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan Tahun 2017 - 2018.

IKU 6



Gambar 9. Capaian Kinerja Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (*Hotspot*) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015) Tahun 2016 – 2018

Tabel 27. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan s.d akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target akhir Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan (%)
Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan	Persentase penurunan luas lahan kritis	2,26%	1,10%	48,67
	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	15%	19,22%	128,13
	Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	30%	86,32%	287,73

Tabel 27 di atas memperlihatkan bahwa capaian masing-masing indikator kinerja terhadap capaian akhir RPJMD Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja “Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis” belum memenuhi tingkat kemajuan yang baik. Sebaiknya, tingkat kemajuan capaian indikator kinerja pada tahun ketiga RPJMD atau Renstra adalah 50% dari capaian kinerja akhir RPJMD dan Renstra karena RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat periodenya enam tahun yaitu 2016-2021, sedangkan tingkat kemajuan indikator kinerja “Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis” tahun 2018 adalah 48,67%. Hal ini disebabkan penanaman tahun 2013 luasannya lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun setelahnya. Namun capaian kinerja “Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis” melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2018 dengan capaian 100,92%.
- b. Indikator “Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan” tercapai melebihi target RPJMD dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu 19,22 % dengan tingkat kemajuan 128,13%. Artinya, setiap tahun laju kerusakan kawasan hutan dapat dikendalikan dengan pelaksanaan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan, pengendalian kebakaran, dan upaya preventif lainnya yang dapat memperlambat laju kerusakan hutan di Provinsi Sumatera Barat.

c. Indikator “Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (*Hotspot*) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)” capaian kinerja indikator ini pada Tahun 2018 sudah melebihi target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Namun jika pada tahun selanjutnya jumlah titik panas meningkat secara signifikan maka tidak menutup kemungkinan akan mengurangi pencapaian target pada akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Untuk itu, capaian kinerja indikator ini setiap tahunnya harus tetap dicapai dengan baik.

Dari realisasi ketiga indikator kinerja di atas, artinya pada tahun 2018, capaian indikator kinerja 5 dan 6 pada sasaran “Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan” sudah melebihi tingkat kemajuan terhadap target kinerja akhir RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Sedangkan, indikator kinerja 4 masih dibawah tingkat kemajuan yang seharusnya.

Tabel 28. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja RPJMN (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi			Ket
		Sumbar 2018	Sumbar 2017	KemenLHK 2017	
Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan	Persentase penurunan luas lahan kritis	1.10%	0.43%	-	-
	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	19.22%	9.92%	16.67%	Lebih rendah
	Persentase penurunan jumlah titik panas (<i>hotspot</i>) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	86.32%	88.21%	91.28%	Lebih rendah

Dari Tabel 28 dapat dilihat bahwa capaian kinerja masing-masing indikator diatas jika dibandingkan dengan target kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Indikator kinerja 4 yaitu persentase penurunan luas lahan kritis, capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 tidak dapat dibanding dengan capain kinerjaKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya menghitung luas dan sebaran reboisasi, belum melakukan penghitungan keberhasilan tumbuh tanaman yang ditanam lima tahun sebelumnya yang digunakan sebagai salah satu variabel untuk menghitung luas penurunan lahan kritis.

- b. Indikator kinerja 5 yaitu persentase penurunan laju kerusakan hutan, capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat lebih rendah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laju deforestasi Indonesia tahun 2016 - 2017 sebesar 0,5 juta, turun 16,67% dari deforestasi 2015-2016. Angka ini didapatkan dari deforestasi bruto yang merupakan perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan berhutan menjadi kelas penutupan lahan tidak berhutan, dikurangi dengan perubahan kondisi tak berhutan menjadi berhutan (reforestasi). Perbaikan tutupan hutan dan lahan telah menyumbangkan indeks tutupan hutan dan lahan. Dari 7 pulau besar, Kalimantan menyumbangkan angka deforestasi paling besar (229,8 ribu ha), diikuti oleh Sumatera (127 ribu ha), Sulawesi (70,8 ribu ha), Papua (48,6 ribu ha), dan Maluku (23 ribu ha). Kondisi yang terbalik terjadi di Jawa dan Nusa Tenggara. Reforestasi yang terjadi di kedua pulau ini lebih besar dari angka deforestasi brutonya. Penutupan lahan berhutan pada tahun 2017 di Jawa bertambah seluas 5,5 ribu ha dan Nusa Tenggara seluas 14,5 ribu ha. Laju kerusakan hutan Sumatera Barat tahun 2017 turun sebesar 9,92% dari tahun 2016. Jika dilihat dari perubahan tutupan lahannya, yang banyak mengalami perubahan tutupan lahan dari hutan sekunder dan hutan primer menjadi semak belukar, areal pertanian/perkebunan, dan areal terbuka adalah Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Perubahan tutupan lahan di Kabupaten Solok Selatan meningkat akibat penyesuaian perubahan batas administrasi kabupaten yang menyebabkan sebagian besar kawasan hutannya masuk ke wilayah Kabupaten Solok. Perubahan tutupan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan meningkatnya aktivitas budidaya pertanian lahan kering. Perubahan tutupan lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan adanya perubahan penggunaan kawasan untuk areal budidaya pertanian/perkebunan masyarakat.

- c. Indikator kinerja 6 yaitu persentase penurunan jumlah titik panas (*hotspot*) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015), capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dikarenakan penurunan titik panas (*hotspot*) di Indonesia secara keseluruhan cukup signifikan, turun dari 3.884 titik panas pada tahun 2016 menjadi 2.370 titik panas pada tahun 2017. Sedangkan, penurunan titik di Sumatera Barat panas tidak terlalu signifikan dari 69 titik api pada tahun 2016 menjadi 50 titik api pada tahun 2017.

Tabel 29. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Thn 2018		Ket
		Sumbar	Riau	
Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan	Persentase penurunan luas lahan kritis	1.10%	-	-
	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	19.22%	-	-
	Persentase penurunan jumlah titik panas (<i>hot spot</i>) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	86.32%	92.45	Lebih Rendah

Dari Tabel 29 terlihat bahwa dari tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran “Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan” di atas ada 1 indikator yang dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Provinsi Riau yaitu indikator kinerja “Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (*Hotspot*) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)”. Sedangkan untuk indikator persentase penurunan lahan kritis dan persentase penurunan laju kerusakan hutan tidak bisa dibandingkan karena ada perbedaan dalam menentukan formula penghitungan pencapaian target indikator.

Capaian kinerja terhadap indikator “Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (*Hotspot*) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)” Provinsi Riau lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat namun capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2018. Indikator ini bersifat situasional sehingga capaian kinerja lebih banyak dipengaruhi oleh faktor alam.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui empat program dengan pembiayaan APBD, yaitu:

1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang terdiri atas empat kegiatan yaitu:
 - a. Pembuatan Bibit Tanaman Hutan
 - b. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan
 - c. Konservasi Sumberdaya Genetik
 - d. Pengembangan Kualitas Bibit dan Benih Tanaman Hutan (DBH-DR)
2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam yang terdiri atas enam kegiatan yaitu:
 - a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Luar Kawasan Hutan
 - b. Monitoring dan Pembinaan Kegiatan RHL
 - c. Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
 - d. Pembuatan Tanaman (DAK)
 - e. Pembangunan DAM Penahan (DAK)
 - f. Rehabilitasi Lahan dan Penghijauan Lingkungan
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang terdiri atas delapan kegiatan yaitu:
 - a. Pengamanan dan Perlindungan Hutan
 - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
 - c. Pengukuran Simpanan Karbon
 - d. Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH
 - e. Penyusunan Peta Rawan Bencana Kawasan Hutan
 - f. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
 - g. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
 - h. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
4. Program Pengendalian Kebakaran Hutan yang terdiri atas sepuluh kegiatan yaitu:
 - a. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 - b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)
 - c. Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Berbagai Ragam Metode (DBH-DR)
 - d. Pelatihan/Pembekalan/*In House Training*/Penyegaran/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)

- e. Monitoring dan Evaluasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)
- f. *Ground Check Hotspot* dan/atau Informasi Kebakaran (DBH-DR)
- g. Pemadaman Kebaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)
- h. Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)
- i. Peningkatan Koordinasi melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja, dan lain-lain (DBH-DR)
- j. Patroli Terpadu Bersama Masyarakat dan Pihak/Instansi Terkait Lainnya (DBH-DR)

Seluruh kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kerjanya sangat baik. Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 30.

Tabel 30. Realisasi Capaian Kinerja Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan Kegiatan Sasaran Tahun 2018

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
1.	Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkatkan Indikator Sasaran: 1. Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis 2. Persentase penurunan laju kerusakan hutan 3. Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pembuatan Bibit Tanaman Hutan	- Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas dan terlaksananya pembinaan terhadap penangkar benih	250.000 batang	250.000 batang	100%	
			Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	- Sertifikasi mutu benih/ bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan	7 unit	7 unit	100%	
			Konservasi Sumberdaya Genetik	- Terbangunnya dan terpeliharanya sumber daya genetik	4 unit	4 unit	100%	
			Pengembangan Kualitas Bibit dan	Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas	400.000 batang dan 3 sumber	400.000 batang dan 3 sumber	100%	

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
			Benih Tanaman Hutan (DBH-DR)	dan terlaksananya pembinaan terhadap penangkar benih	benih tanaman hutan	benih tanaman hutan		
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan	- Terehabilitasinya lahan kritis diluar kawasan hutan	180 ha	180 ha	100%	
			Monitoring dan Pembinaan kegiatan RHL	- Terlaksananya monitoring dan pembinaan RHL/ Reklamasi	10 lokasi	10 lokasi	100%	
			Pengendalian Pengelolaan Daerah Airan Sungai	- Daerah aliran sungai yang terkendali	2 DAS	2 DAS	100%	
			Pembuatan Tanaman (DAK)	- Penurunan jumlah lahan kritis, banjir dan tanah longsor	1.086 ha	1.086 ha	100%	
			Pembangunan DAM Penahan (DAK)	- Penurunan jumlah lahan kritis, banjir dan tanah longsor	12 Unit	12 Unit	100%	
			Rehabilitasi Lahan dan Penghijauan Lingkungan	- Terlaksananya penanaman pada lahan kritis	10 KPH	10 KPH	100%	
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pengamanan dan perlindungan hutan	- Kasus tindak pidana hutan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi		- Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan dan konservasi	450 orang	450 orang	100%	

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
			SDA	sumber daya alam				
			Pengukuran simpanan karbon	- Tersedianya data simpanan karbon	20 petak	20 petak	100%	
			Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH	- Wilayah kelola KPH yang di konservasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	
			Penyusunan peta rawan bencana kawasan hutan	- Peta rawan bencana kawasan hutan	6 peta	6 peta	100%	
			Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	- Terbentuknya kawasan ekosistem esensial	1 Unit	1 Unit	100%	
			Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	- Terlaksananya Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan	1 Lap	1 Lap	100%	
			Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	- Terlaksananya fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan	1 Lokasi	1 Lokasi	100%	
		Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Terlaksananya pemantauan titik panas, patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan,	33 kali	33 kali	100%	

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
				pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta bimbingan teknis kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)				
			Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Jumlah sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan	406 Unit	406 Unit	100%	
			Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Berbagai Ragam Metode	- Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	450 Orang	300 Orang	66,67%	
			Pelatihan/ Pembekalan /In House Training/ Penyegaran/ Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Jumlah peserta bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	375 Orang	375 Orang	100%	
			Monitoring dan Evaluasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan	- Jumlah monitoring dan evaluasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan	40 Kali	1 Kali	2,5%	
			Ground Check Hotspot dan/atau Informasi Kebakaran	- Jumlah ground check hotspot	10 Kali	0 Kali	0%	
			Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	- Jumlah pemadaman kebakaran hutan dan lahan	15 Kali	1 Kali	6,67%	

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
			Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	- Jumlah patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	10 Kali	10 Kali	100%	
			Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat koordinasi, Kunjungan Kerja dan Lain-Lain	- Jumlah koordinasi melalui kunjungan kerja pencegahan kebakaran hutan dan lahan	30 Kali	29 Kali	96,67%	
			Patroli Terpadu bersama Masyarakat dan Pihak/Instansi Terkait Lainnya	- Jumlah patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan	25 Kali	23 Kali	92,00%	

Uraian capaian IKU Sasaran Strategis II adalah sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis" memiliki target sebesar 1,09%, terealisasi sebesar 1,10% dengan tingkat capaian 100,92% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Indikator Kinerja "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis" diukur dengan rumus jumlah tanaman yang tumbuh pada tahun N-5 dibagi luas lahan kritis dikalikan angka 100%. Dengan asumsi tanaman yang baik pertumbuhannya 80% dari jumlah yang ditanam angka jumlah tanaman yang tumbuh ditanam pada tahun 2013.

Capaian Target IKU Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis tahun 2018 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 31.

Tabel 31. Capaian Target IKU Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis per Triwulan Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	Capaian %	TRW II	Capaian %	TRW III	Capaian %	TRW IV	Capaian %
Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	a Persentase penurunan luas lahan kritis	0.27%	0.55%	0,82%	1.09%	0.79%	292.59	0.79%	143.64	1.10%	134.15	1.10	100.92

Dari Tabel 31 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut di atas setiap triwulannya dapat dicapai sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan. Untuk mencapai target kinerja indikator "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis", Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanaman yang dilakukan pada tahun 2013. Hal ini sesuai dengan saran tim Kemen-PANRB yang menyarankan agar penurunan lahan kritis dilakukan dengan menghitung luasan kawasan hutan dan lahan hasil reboisasi di dalam dan di luar kawasan hutan dan lahan pada lima tahun yang lalu, mengingat lahan kritis tidak mungkin tertangani pada saat penanaman. Pohon dengan umur lima tahun dianggap telah memiliki kanopi tajuk yang cukup untuk berkontribusi menangani pengurangan lahan kritis. Untuk itu indikator kinerja Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis Tahun 2018 dihitung dengan menghitung luasan hasil penanaman pada tahun 2013 seperti pada Tabel 32.

Tabel 32. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Penanaman Tahun 2013

NO	KABUPATEN	LOKASI	LUAS YANG DIEVALUASI (Ha)	HASIL EVALUASI (Ha)	
				LUAS TANAMAN BERHASIL	LUAS TANAMAN GAGAL
1	2	3	4	5	7
I	PESISIR SELATAN Hutan Rakyat	1. Koto Taratak (Nanggalo Indah)	400	200	200
		2. Koto Taratak(Selang Pandang)	100	0	100
		3. Punggasan Timur	100	0	100
		4. Air Aji	100	100	0
			100	100	0
II	TANAH DATAR		750	750	-

III	Reboisasi Pengkayaan	1. Guguak Malalo Batipuh Selatan	250	250	0
	Hutan Rakyat	2. Guguak Malalo Batipuh Selatan	250	250	0
		3. Jrg Lasuang Batu Nag. Batu Bulek Lintau Buo	50	50	0
		4. Sungai Salak Kec. Tanjung Emas	100	100	0
		5. Sungai Salak Kec. Tanjung Emas	100	100	0
		A G A M	800	750	50
	Reboisasi Pengkayaan	1. Pasar palupuah Nag. Pasia Laweh	100	100	0
	Hutan Rakyat	2. Lurah dalam Nag Pasia Laweh	100	100	0
		3. Jrg Sonsang Nag Koto Tengah	150	150	0
		4. Jrg Halalang Nag Kamang Mudiak	150	150	0
5. Jrg Sidang tengah Nag, Matua		50	0	50	
6. Jrg Sonsang Nag. Koto Tengah Til. Kamang		50	50	0	
7. Jrg Halalang Nag kamang Mudiak Kec. Kamang Mngk		50	50	0	
8. Jrg Kampuang jambu Nag bayur Kec Tanjung Raya		50	50	0	
9. Binuang sati Muaro palintangan nag. Sei Puar Plmbyan		50	50	0	
10. Kel tani rantau alai Sei Puar Kec Palembang		50	50	0	
IV		SOLOK	397	397	-
Reboisasi	1. Gantiang Nag. Sirukam Kec Payung Sekaki	150	150	0	
	2. kubang Nag Indudua Kec. X Koto Sei Lasi	75	75	0	
	3. Baringin sakti Nag. Siaro aro Kec. X Sei lasi	75	75	0	
	Hutan Rakyat	4. Koto Baru Nag tanjung Alai X Koto Singkarak	40	40	0
		5. Batu Api nag. Tikalak Kec. X Koto Singkarak	25	25	0
		6. Kebun Bibit Rakyat	32	32	0
V	LIMAPULUH KOTA	1.750	908	842	
	Reboisasi Pengkayaan	1. Blok A 1 Nagari Lubuk Alai Kec Kapur IX	300	204	96
		2. Blok A 2 Nagari Lubuk Alai Kec Kapur IX	300	210	90
		3. Blok B 1 Bonca lowe Nagari Gn Malintang Pangkalan KB	325	94	231

		4. Blok B2 Nagari Lubuk Alai Kec Kapur IX	325	108,5	216,5
		5. Blok B3 Nagari Lubuk Alai Kec Kapur IX	300	169,6	130,4
		6. Muaro Paeti Kapur IX	200	122	78
			365	331	34
	Pengkayaan Hutan	1, Kel tani Berkat Bersama Simpang Sugiran Kec Guguk	25	25	0
	Rakyat	2. Kel Tani Sehati Nagari Batu Hampar Kec Akabiluru	25	25	0
		3. Kel Tani Agro Harapan Jrg landai Nagari Harau	50	50	0
		4. Kel tani Sinar Harapan Sei Datar Kec Harau	25	25	0
		5. Kel tani Sarumpun Kampung Dalam Muaro Peiti	25	23	2
		6. Kel Tani Sopang Bersatu Sopang Nagari Pankln Koto Baru	50	38	12
		7. Kel Tani Harapan Bersama Koto Bangun Kapur IX	25	23	2
		8, Kel tani Sinar Harapan Bersama Nagari Kurai Suliki	25	21	4
		9. Kel Tani Lereng Indah Lambuak Nagari Halaban	25	25	0
		10. Kel Tani Bersaudara Jrg Pd Laweh Koto Tangah Bk Barisan	25	22	3
		11. Kel tani Gonggo Lestari Jaya Kurai suliki	25	22	3
		12. Tanaman Hasil Kebun Bibit Rakyat Jrg Botuan Kurai Suliki	40	32	8
	PADANG PARIAMAN		410	346	64
VI	Reboisasi Hutan Rakyat	1. Nagari Salibutan Lb alung	50	40	10
		2. Kel Tani Makmur jaya Malai V Suku	80	64	16
		3. Tanaman Hasil Kebun Bibit Rakyat Kel tani Bina Mandiri	80	66	14
		4. Kel Tani Pinang Sabatang Malai V Suku	50	44	6
		5. kel Tani Karya Maju Nagari Malai Barat	50	46	4
		6. Kel Tani sipinang Jaya Aur Malintang	50	40	10
		7. Kel tani Harapan Jaya Aur Malintang Utara	50	46	4
1	2	3	4	5	6

VII	PASAMAN BARAT		202	104	98
	Reboisasi	1. Desa Baru Ranah Batahan	80	40	40
		2. Air Bangis Kec Sungai Beremas	122	64	58
VIII	PASAMAN		440	440	0
	Reboisasi	1. Bukit Batang Bakasampik Nagari Lansek Kadok	140	140	0
		2. Kuamang Nagari Panti Timur	300	300	0
		J U M L A H (Ha)	5.514	4.226	1.288

Dari Tabel 32 terlihat bahwa penanaman yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari dana APBD dan DAK Tahun 2013 adalah seluas 5.514 ha. Pada tahun 2017 dilakukan monitoring dan evaluasi hasil penanaman tahun 2013 tersebut dan diperoleh dari 5.514 ha yang ditanam pada tahun 2013, luas tanaman yang tumbuh adalah 4.226 ha. Jika angka 4.226 ha dibagi dengan angka luas lahan kritis yaitu 630.695 ha, kemudian dikalikan dengan angka 100%, maka diperoleh angka 0,67%. Angka 0,67% ditambahkan dengan persentase penurunan lahan kritis pada tahun 2017 sebesar 0,43% inilah yang menjadi hasil capaian indikator "Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis" pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,10%. Artinya dengan diketahui jumlah pohon yang hidup dan tumbuh baik hingga tahun 2018, maka hasil penanaman selama lima tahun yang lalu dapat mengurangi luas lahan kritis hingga tahun 2018. Pohon dengan usia lima tahun dianggap telah mampu melaksanakan fungsinya sebagai penyangga ekologi dan ekosistem dengan baik.

2. Indikator Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan" memiliki target sebesar 10%, terealisasi sebesar 19,22% dengan tingkat capaian 192,20% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan

Renja Tahun 2017 maka dilakukan perubahan target indikator kinerja dari 5,15% menjadi 10%.

Hal ini disebabkan:

1. Penyesuaian penutupan lahan dengan batas kawasan hutan menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.35/Menhut-II/2013.
2. Hasil merupakan pencermatan ulang terhadap penutupan lahan oleh Tim Penyusunan Peta Laju Kerusakan Hutan dengan menginterpolasikan dan pemutakhiran seri data tahun 2000 – 2015.
3. Penggunaan citra resolusi tinggi dalam digitasi dan pencermatan penutupan lahan.

Indikator kinerja tersebut di atas diukur dengan menghitung dengan formula ((laju kerusakan hutan tahun n - laju kerusakan tahun 2016 (data base))/laju kerusakan hutan tahun 2016 (data base)) X 100%. Dari perubahan tutupan lahan tahun 2016 dan tahun 2018 diperoleh laju kerusakan hutan Sumatera Barat adalah 24.235 ha dalam 2 (dua) tahun, yang juga berarti laju kerusakan hutan adalah setara dengan 12.117 ha/tahun. Sesuai dengan dokumen SRAP REDD+ yang disusun oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan analisis data Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, laju kerusakan hutan tahun 2016 terhitung adalah sekitar 15.000 ha/tahun, di mana angka ini merupakan data base untuk penghitungan penurunan laju kerusakan hutan hingga tahun 2021.

Capaian Target IKU Persentase penurunan laju kerusakan hutan Tahun 2018 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti yang terdapat pada Tabel 33.

Tabel 33. Capaian Target IKU Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan per Triwulan Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat	b. Persentase penurunan laju kerusakan hutan	0%	0%	0%	10%	0%	100	0%	100	0%	100	19.22%	192.20

Dari Tabel 33 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut setiap triwulannya dapat dicapai sesuai dengan target triwulan yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target indikator “Persentase

Penurunan Laju Kerusakan Hutan” merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan, seperti patroli simpatik pengamanan hutan, penyusunan perda pengamanan dan perlindungan hutan, penyidikan dan pengamanan hutan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan satuan tugas pengamanan dan perlindungan hutan melalui kerangka PPHBN (Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Masyarakat).

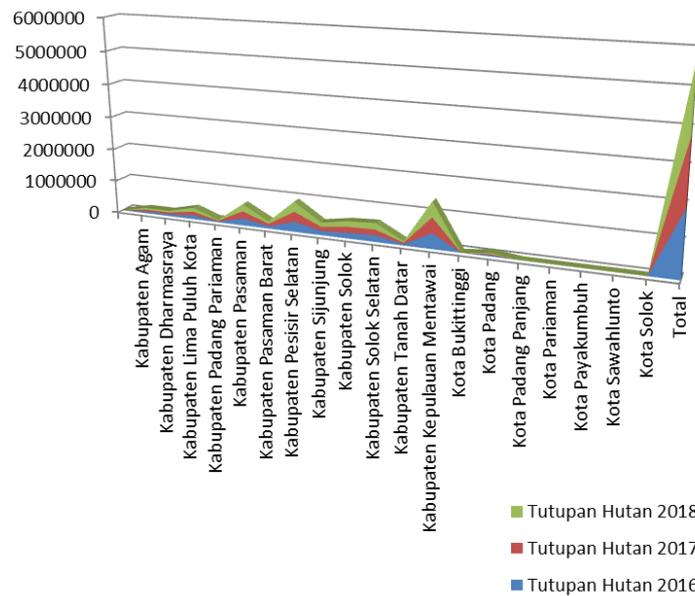
Berdasarkan rekapitulasi data tutupan lahan tahun 2016 hingga Tahun 2018, secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 34.

Tabel 34. Tutupan Lahan Kawasan Hutan Tahun 2015 hingga Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Tutupan Hutan 2016	Tutupan Hutan 2017	Tutupan Hutan 2018	Selisih 2018-2017
1	Kabupaten Agam	56,314	55,466	56,451	985
2	Kabupaten Dharmasraya	59,300	57,988	53,594	(4,393)
3	Kabupaten Lima Puluh Kota	120,418	114,936	124,285	9,349
4	Kabupaten Padang Pariaman	25,361	25,810	26,210	399
5	Kabupaten Pasaman	219,868	219,762	216,920	(2,842)
6	Kabupaten Pasaman Barat	73,120	74,427	75,874	1,447
7	Kabupaten Pesisir Selatan	313,911	299,127	307,485	8,359
8	Kabupaten Sijunjung	131,262	124,884	128,839	3,955
9	Kabupaten Solok	171,506	180,676	172,292	(8,384)
10	Kabupaten Solok Selatan	203,598	168,407	195,308	26,900
11	Kabupaten Tanah Datar	42,716	41,214	42,416	1,202
12	Kabupaten Kepulauan Mentawai	466,882	463,094	462,263	(831)
13	Kota Bukittinggi	-	-	-	-
14	Kota Padang	34,061	33,394	32,174	(1,221)
15	Kota Padang Panjang	354	705	349	(356)
16	Kota Pariaman	-	-	-	-
17	Kota Payakumbuh	198	199	198	(2)
18	Kota Sawahlunto	2,190	2,319	2,318	(1)
19	Kota Solok	1,087	1,128	934	(195)
	Total	1,922,146	1,863,538	1,897,911	34,373

Sumber: Hasil penghitungan Tim Penghitung Laju Kerusakan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Dari Tabel 34 di atas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2018, laju kerusakan hutan sebesar 12.117 ha/tahun ((1.922.146 ha -1.897.911 ha)/2 tahun). Jika dilihat dari perubahan tutupan lahannya yang banyak mengalami perubahan tutupan lahan dari hutan sekunder dan hutan primer menjadi semak belukar, areal pertanian/perkebunan, dan areal terbuka adalah Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman. Hal ini dimungkinkan karena pada Kabupaten Solok terjadi perubahan tutupan hutan dari hutan sekunder menjadi semak belukar dan areal terbuka, perubahan tutupan lahan di Kabupaten Dharmasraya disebabkan adanya perambahan dan perladangan masyarakat. Perubahan tutupan lahan di Kabupaten Pasaman disebabkan adanya perubahan penggunaan kawasan untuk areal budidaya pertanian/perkebunan masyarakat. Laju penurunan kerusakan kawasan hutan di Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Perkembangan Perubahan Penutupan Lahan Kawasan Hutan di Sumatera Barat Tiga Tahun Terakhir

Dari Gambar 10 di atas diketahui bahwa, berdasarkan perubahan penutupan lahan kawasan hutan pada tahun 2016 dan 2018, laju kerusakan hutan pada tahun 2018 adalah 12.117 haa/tahun atau mengalami penurunan yaitu dari angka 15.000 pada tahun 2016. Artinya pada tahun 2018, jumlah lahan kawasan hutan yang terbuka/berubah menjadi semak belukar dan areal perladangan/perkebunan berkurang dibandingkan dengan tahun 2016. Sehingga laju kerusakan hutan dikatakan menurun dari tahun sebelumnya. Nilai minus mengartikan penutupan lahan kawasan hutan berubah menjadi semak belukar, areal pertanian, atau perkebunan. Indikator kinerja “Persentase penurunan laju kerusakan hutan” capaiannya melebihi target yaitu 192,20%.

Menurunnya laju kerusakan hutan pada tahun 2018 merupakan hasil positif sebagai upaya untuk menekan kerusakan hutan akibat dari penebangan hutan ilegal dan perambahan. Untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditentukan dalam sasaran ini, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya diantaranya yang paling efektif adalah pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pengamanan dan perlindungan hutan melalui Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis

Nagari (PPHBN). Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2011 hingga tahun 2018 juga telah berhasil membentuk 159 kelompok PPHBN yang tersebar di 159 nagari yang terdiri atas 620 personil satgas seperti disajikan pada Tabel 35.

Tabel 35. Jumlah Kelompok Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari hingga Tahun 2018 di Sumatera Barat

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH NAGARI	JUMLAH ANGGOTA PPHBN (Org)
1.	SOLOK SELATAN	23	30
2.	SOLOK	20	80
3.	KEP. MENTAWAI	8	32
4.	PADANG PARIAMAN	9	31
5.	50 KOTA	9	20
6.	AGAM	6	38
7.	PESISIR SELATAN	12	45
8.	SIJUNJUNG	7	35
9.	PASAMAN	33	173
10.	TANAH DATAR	6	37
11.	PASAMAN BARAT	5	22
12.	SAWAHLUNTO	18	57
13.	DHARMASRAYA	1	10
14.	KOTA SOLOK	2	10
	JUMLAH	159	620

3. Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (*Hotspot*) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (*Hot Spot*) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)" memiliki target sebesar 45%, terealisasi sebesar 86,32% dengan tingkat capaian 191,82% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Indikator Kinerja Utama "Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (*Hotspot*) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015)" diukur dengan menghitung penurunan titik panas (*hotspot*) di tahun 2018 dibagi jumlah rerata titik panas (*hotspot*) pada periode lima tahun sebelumnya (2011-2015) dikalikan angka 100%.

Capaian Target IKU "Persentase penurunan jumlah titik panas (*hot spot*) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)" tahun 2018 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 36.

Tabel 36. Capaian Target IKU Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (*hotspot*) dari Rerata Angka Periode Tahun Sebelumnya (2011-2015) Tahun 2018 Setiap Triwulannya

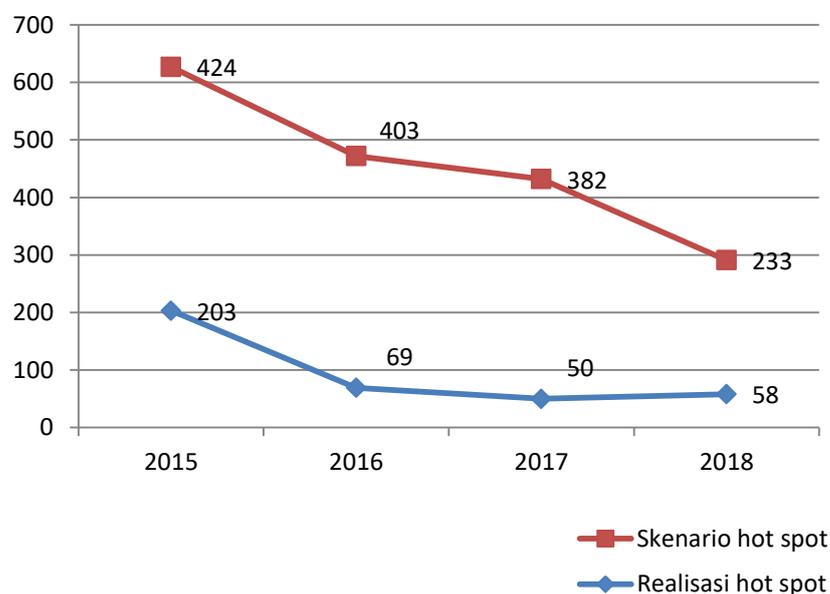
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat	A Persentase penurunan jumlah titik panas (<i>hot spot</i>) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	10%	20%	35%	45%	97,40%	974	93,63%	468,15	87,25%	249,29	86,32%	191,82

Dari Tabel 36 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut di atas setiap triwulannya dapat dicapai melebihi target triwulan yang ditetapkan. Pada tahun 2018 tidak terjadi kebakaran hutan maupun lahan dalam skala yang besar. Upaya pengawasan dan pencegahan dini yang optimal dilakukan oleh Satuan Tugas Pemadam Kebakaran hutan dan Lahan (SATGAS DAMKARHUTLA) maupun pemantauan melalui satelit NOAA dalam mendeteksi titik api yang terjadi dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat telah memberikan kontribusi yang maksimal dalam pencapaian target indikator sasaran ini. Selain iklim dan curah hujan yang tinggi, penambahan sumber daya berupa anggaran sumber dana DBH-DR juga berkontribusi positif terhadap pencapaian target indikator kinerja ini.

Koordinasi yang dilakukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor kehutanan menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kotasesantiasa menyiapkan diri dalam mengantisipasi terjadinya hal tersebut, baik dalam upaya pencegahan maupun pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana yang ada.

Hasil pantauan *hotspot* di Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, yang dipengaruhi oleh kondisi musim/iklim yang erat kaitannya dengan isu pemanasan global. Skenario penurunan *hotspot* dimulai dengan angka 424, angka ini merupakan angka rerata *hotspot* tahun 2011-2015. Selanjutnya, sesuai target indikator sasaran yaitu penurunan titik panas (*hotspot*) sebanyak 45% dari angka tahun sebelumnya

maka diperoleh angka toleransi titik panas (*hotspot*) untuk tahun 2018 dalam bentuk skenario *hotspot* seperti Gambar 11.



Gambar 11. Angka *Toleransi Titik Panas (Hot Spot)* dan *Realisasi Hot Spot* Tahun 2015-2018

Dari Gambar 11 di atas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2018, titik api mengalami penurunan dari 203 titik api di tahun 2015 menjadi 69 titik api di tahun 2016, menjadi 50 titik api di tahun 2017, dan 58 titik api di tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh faktor iklim dan cuaca yang terjadi sepanjang tahun 2015, disamping usaha-usaha pencegahan dan deteksi dini seperti pemasangan larangan pembakaran hutan dan lahan serta kebijakan pembukaan kebun tanpa bakar. Dari periode lima tahun yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, rata-rata jumlah titik panas (*hotspot*) yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat adalah 424 titik api. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja “Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (*Hotspot*) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)” adalah menurunkan jumlah titik api sebanyak 45% pada tahun 2018 dari rerata jumlah titik api pada periode tahun 2011-2015 (424 titik api) tersebut. Berdasarkan skenario penurunan titik api yang terlihat pada Gambar 11, penurunan titik api sebanyak 45% dicapai jika jumlah titik api pada tahun 2018 adalah 233 titik api, namun ternyata pada tahun 2018, titik api berhasil diturunkan hingga 86.32% atau 58 titik api.

Jumlah titik api berdasarkan satelit NOAA yang berhasil dipantau oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 37.

Tabel 37. Jumlah *Hotspot* (Titik Api) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 berdasarkan Pantauan Satelit NOAA

No	Kabupaten/ Kota	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	
1	KAB. AGAM													0
2	KAB. DHARMASRAYA	1			1			4		3	3		1	13
3	KAB. KEP. MENTAWAI		1	1			1							3
4	KAB. LIMAPULUH KOTA	2			1			1	4					8
5	KAB. PADANG PARIAMAN								3					3
6	KAB. PASAMAN	1					1	2	1					5
7	KAB. PASAMAN BARAT						2		1	1				4
8	KAB. PESISIR SELATAN	1		2	2	4	2	5	2					18
9	KAB. SIJUNJUNG						1							1
10	KAB. SOLOK													0
11	KAB. SOLOK SELATAN	1	1			1								3
12	KAB. TANAH DATAR													0
13	KOTA BUKITTINGGI													0
14	KOTA PADANG													0
15	KOTA PADANG PANJANG													0
16	KOTA PARIAMAN													0
17	KOTA PAYAKUMBUH													0
18	KOTA SAWAHLUNTO													0
19	KOTA SOLOK													0
	JUMLAH	6	2	3	4	5	7	12	11	4	3	0	1	58
	JUMLAH KUMULATIF		8	11	15	20	27	39	50	54	57	57	58	

Sumber data: pengolahan data dari satelit NOAA oleh Bidang PHKSDAE

Dari Tabel 37 di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan kabupaten dengan jumlah *hotspot* tertinggi. Umumnya lokasi terjadinya titik api berada pada lahan diluar kawasan hutan dan ada beberapa titik yang berada dalam kawasan hutan. Titik api yang terjadi diluar kawasan hutan merupakan akibat aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan dengan cara membakar hutan. Pembukaan lahan (*land clearing*) dengan cara membakar hutan merupakan pilihan untuk pembukaan lahan karena tidak memerlukan biaya tinggi.

Jika dilihat perkembangan *hotspot* per bulan, pada saat musim penghujan jumlah *hotspot* relatif rendah. Hal ini dapat dilihat mulai bulan September hingga Maret/April, titik panas (*hotspot*) mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jumlah *hotspot* mengalami peningkatan pada musim kemarau pada puncaknya yaitu pada bulan Juli. Dengan melihat data tersebut di atas, kesiapsiagaan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui pemantauan titik panas (*hotspot*) pada tahun yang akan datang, jika

trend musim kemarau sama dengan tahun 2018, sudah harus dimulai pada awal tahun dan harus lebih intensif pada bulan-bulan di musim kemarau.

Pemantauan titik panas(*hotspot*) merupakan upaya awal untuk mendeteksi kebakaran hutan secara dini. Luas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2018 seluas 1.036,77 ha atau naik 602,89% dari luas kebakaran tahun lalu seperti dapat dilihat pada Tabel 38.

Tabel 38. Luas Kebakan Hutan dan Lahan di Sumatera Barat Tahun 2018

No.	Kota/Kabupaten	Kecamatan	Luas (Ha)	Fungsi Kawasan
1.	Padang	Lubuk Begalung	2.3	APL
2	Padang	Koto Tengah	1	APL
3.	Limapuluh Kota	Pangkalan	3.5	APL
4.	Sijunjung	Padang Sibusuk	1	APL
5.	Pesisir Selatan	Silaut	590	HL
6.	Agam	Baso	1	APL
7.	Pesisir Selatan	Balai Ampek Basa	437.97	HPK
			1.036,77	

Permasalahan :

1. Dana DBH-DR untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan baru dapat disahkan pada akhir Agustus 2018. Sehingga, penyerapan dana dan pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan secara optimal.
2. Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) masih sangat terbatas sehingga penyelesaian kasus tidak bisa ditangani secara komprehensif.
3. Instrumen penegakan hukum belum maksimal untuk menangani pelanggaran dibidang kebakaran hutan dan lahan.
4. *Hotspot* banyak terdapat di luar kawasan hutan, sementara partisipasi para pihak di daerah (kabupaten/kota) belum maksimal sampai ke tingkat nagari/desa.
5. MPA dan kelompok tani belum dilengkapi dengan sarana prasarana pemadaman kebakaran yang memadai.

Solusi:

1. Melakukan pencermatan kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam sesuai tata waktu yang ditetapkan.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

3. Mengusulkan penambahan jumlah PPNS.
4. Peningkatan peran dan kerjasama dalam peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan seperti: apel siaga, kampanye, dan lain-lain.
5. Melengkapi MPA dan kelompok tani pengamanan swadaya dengan sarana prasarana pemadam kebakaran, berupa gebyok dan alat pemadam sederhana lainnya.

III. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan

Tujuan **Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan** dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu **Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat** dan diukur dengan satu indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Tujuan dan Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis **Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat** merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan yang selama ini belum memiliki akses terhadap sumberdaya alam, terutama kawasan hutan. Implementasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) atau Perhutanan Sosial (PS) melalui skema Hutan Nagari (HN), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat memberikan pengakuan sosial dan pengakuan status hukum bagi masyarakat serta memberikan kejelasan dalam pengelolaan kawasan hutan serta meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik tenurial dan adat. Pencapaian

kinerja sasaran “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan” tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 39.

Tabel 39. Pencapaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Tahun 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	11,68%	16,62%	142,29
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%)					142,29

Dari Tabel 39 di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis III pada tahun 2018 berhasil dicapai. Rata-rata capaian sasaran 142,29% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 142,29% di atas adalah luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat melalui pola HTR, HKm, dan HN pada tahun 2018 telah melebihi target yang ditetapkan.

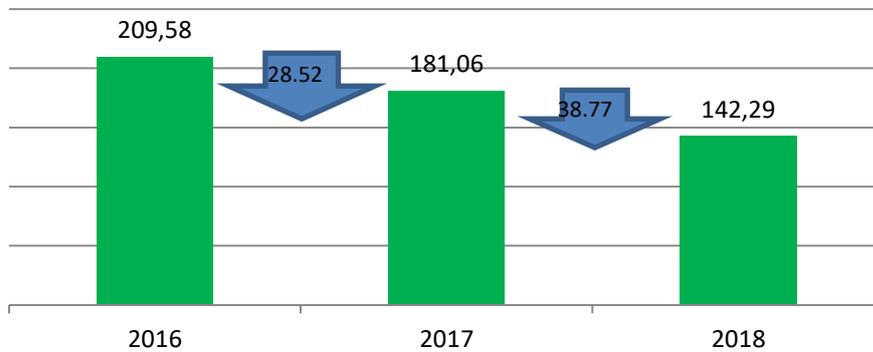
Tabel 40. Perbandingan Capaian Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Tahun 2017 dan Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2018	Realisasi	
			2017 (n-1)	2018 (n)
Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	11.68%	15.39%	16.62%

Dari Tabel 40 dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja “Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat” tahun 2018 terealisasi 16,62% atau meningkat 1,23% dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2017. Capaian kinerja Sasaran “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan” tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 13.

IKU 7

Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat(%)



Tabel 41. Perbandingan Capaian Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan sampai dengan Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	21,21%	16,62%	78,36

Tabel 41 memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja “Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat” diatas pada tahun 2018 telah mendukung capaian indikator kinerja target akhir RPJMD dan atau Renstra yaitu sebesar 78,36%. Memperhatikan tingkat kemajuan hasil capaian maka diperkirakan sasaran “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan” pada target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan dapat dicapai.

Tabel 42. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan pada Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja RPJMN (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2017 dan 2018			Ket
		Sumbar 2018	Sumbar 2017	KemenLHK 2017	
Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	16,62%	15,39%	0,68%	Lebih tinggi

Dari Tabel 42 dapat dilihat bahwa capaian kinerja masing-masing indikator diatas jika dibandingkan dengan target kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja 7 yaitu persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat, capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Masyarakat sekitar hutan kini merasakan kehadiran pemerintah, yaitu dengan adanya Perhutanan Sosial. Diakhir Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 12,7 juta ha kawasan hutan dapat diakses oleh masyarakat di 25.863 desa yang sebagian besar kehidupannya tergantung pada hutan. Lima skema Perhutanan Sosial, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), Hutan Adat (HA), dan yang terakhir adalah skema Kemitraan Kehutanan, dimana adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. Kinerja Perhutanan Sosial pada tahun 2017 adalah kawasan hutan yang sudah diakses oleh masyarakat seluas 666.359 ha. Dengan jumlah luas hutan lindung dan hutan produksi Indonesia sekitar 98.492.323,73 ha, maka diketahui bahwa persentase luas hutan yang dikelola oleh masyarakat adalah 0,68%. Sumatera Barat dengan luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi 1.573.129 ha dan luas hutan yang sudah dikelola oleh masyarakat seluas 261.467 ha, maka persentase luas hutan yang dikelola oleh masyarakat Sumatera Barat adalah 16,62%. Keberhasilan Sumatera Barat akan berkontribusi pada target pencapaian pada tingkat nasional.

Tabel 43. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan di Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Thn 2017		Ket
		Sumbar	Riau	
Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	15,39%	-	-

Dari Tabel 43 dapat dilihat, capaian indikator tersebut di atas tidak dapat dibandingkan karena Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau hingga Januari 2019 tidak memberi data.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui dua program yang terdiri atas satu program dengan pembiayaan APBD dan satu program dengan pembiayaan APBN. Program dimaksud adalah:

1. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan (APBD) yang terdiri atas tujuh kegiatan yaitu:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan
 - b. Penyiapan, Pembinaan, dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat Kemitraan
 - c. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR, dan Hutan Rakyat Kemitraan
 - d. Penguatan Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Sumatera Barat
 - e. Pengembangan Hutan Mangrove
 - f. Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan
 - g. Peningkatan Kapasitas Penyuluh kehutanan
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Komponen Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tiga sub komponen yaitu:
 - a. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
 - b. Sekolah Lapangan Penyuluhan Kehutanan untuk Mendukung Perhutanan Sosial (HKm)
 - c. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan

Seluruh kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik. Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 44.

Tabel 44. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis III Tahun 2018

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
1.	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Indikator Sasaran: Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan	- Terlaksananya Musrenbanghutda, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota	10 UPTD /KPH	10 UPTD/KPH	100%	
			Penyiapan, Pembinaan, dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat Kemitraan	- Meningkatnya kelompok/ lembaga masyarakat yang mengelola hutan (HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan)	25 Kelompok	25 Kelompok	100%	
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan Hutan Rakyat Kemitraan	- Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan	180 Orang	180 Orang	100%	
			Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	- Terjalinnnya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan)	110 Org	110 Org	100%	
			Pengembangan Hutan Mangrove	- Terlaksananya koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis	6 Kali	6 Kali	100%	

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
				pengelolaan hutan mangrove				
			Pengembangan unit percontohan penyuluh kehutanan	- Terbangunnya Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	5 Unit	5 Unit	100%	
			Peningkatan Kapasitas Penyuluh kehutanan	- Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di Sumatera Barat	75 orang	75 orang	100%	
			Penyiapan Perhutanan Sosial	- Jumlah kelompok perhutanan social yang terusulkan	10 Kelompok	10 Kelompok	100%	
			Pemberdayaan KTH melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha	- Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya dari pemula menjadi madya	6 KTH	6 KTH	100%	
			Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan	- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan temu teknis	160 orang	160 orang	100%	
				- Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha	80 orang	80 orang	100%	
			Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan	- Jumlah peserta yang mengikuti penyusunan programa	90 orang penyuluh	90 orang penyuluh	100%	

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
				penyuluh kehutanan PNS dan PKSM				
			Sosialisasi Kebijakan RHL oleh Penyuluh Kehutanan	- Jumlah penyuluh kehutanan yang mengikuti bimbingan teknis RHL	85 orang	85 orang	100%	
				- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi RHL bagi masyarakat sekitar RHL kebijakan	90 orang	90 orang	100%	
			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	- jumlah kelompok pengelola hutan yang dilatih dalam pengembangan usaha perhutanan sosial	50 kelompok	50 kelompok	100%	
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Pengembangan Perhutanan Sosial	- Terlaksananya pengembangan Perhutanan Sosial	1 Lap	1 lap	100%	
			Sekolah Lapangan Penyuluhan Kehutanan untuk Mendukung Perhutanan Sosial (HKm)	- Terlaksananya sekolah lapangan penyuluhan kehutanan untuk mendukung perhutanan sosial (HKm)	1 lap	1 Lap	100%	
			Biaya Operasional Penyuluh	- Terbayarkannya BOP Penyuluh Kehutanan	60 Orang	60 Orang	100%	

Uraian capaian IKU sasaran strategis “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan” adalah sebagai berikut:

1. Indikator Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat” memiliki target sebesar 11,68%, terealisasi sebesar 16,62% dengan tingkat capaian 142,29% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator Kinerja Utama “Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat” dihitung dengan formula luas kawasan hutan yang diusulkan hingga tahap verifikasi untuk dapat dikelola oleh masyarakat/kemitraan pada tahun N dibagi jumlah luas Hutan Lindung dan Hutan Produksi dikalikan angka 100%.

Capaian Target IKU “Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat” tahun 2018 setiap triwulannya dapat diuraikan pada Tabel 45.

Tabel 45. Capaian Target IKU Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Masyarakat Per Triwulan Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	Capaian %	TRW II	Capaian %	TRW III	Capaian %	TRW IV	Capaian %
Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan	a. Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Masyarakat	5%	8%	10%	11,68%	15,51	310,2	15,65	195,63	15,65	156,50	16,62	142,29

Dari Tabel 45 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut di atas setiap triwulannya dapat dicapai melebihi target triwulan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm dilakukan dengan baik. Untuk mencapai target kinerja indikator “Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan”, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR, dan HR Kemitraan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan, Penguatan Forum PHBM Provinsi Sumatera Barat, dan melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Kelembagaan, Pengendalian PHBM. Capaian kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari realisasi seluruh proses perizinan mulai dari usulan, proses verifikasi, penetapan areal

kerja, dan Hak Pengelolaan Hutan Nagari/Izin Pemanfaatan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat/Perhutanan Sosial, yang meliputi skema Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat di luar Hutan Rakyat yang berada pada hutan hak yang secara kumulatif hingga pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 46.

Tabel 46. Rekapitulasi Luas Areal Kelola Perhutanan Sosial

No	SKEMA	PROGRES								Total
		Usulan		Verifikasi		PAK*		HPHD/ IUPH		
		Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	
1	Hutan Nagari	28	19.394	12	19.813	0	0	83	167.062	123/ 206.233
2	Hutan Kemasyarakatan	8	3.217	1	386	4	3.342	42	28.418	55 / 35.363
3	Hutan Tanaman Rakyat	0	0	2	800	0	0	4	6.935	6/ 7.735
4	Kemitraan Kehutanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0/ 0
5	Hutan Adat**	3	12.100	0	0	0	0	0	0	3/ 12.100
	TOTAL***	39	34.711	15	20.999	4	3.342	129	202.415	187/ 261.467

Catatan:

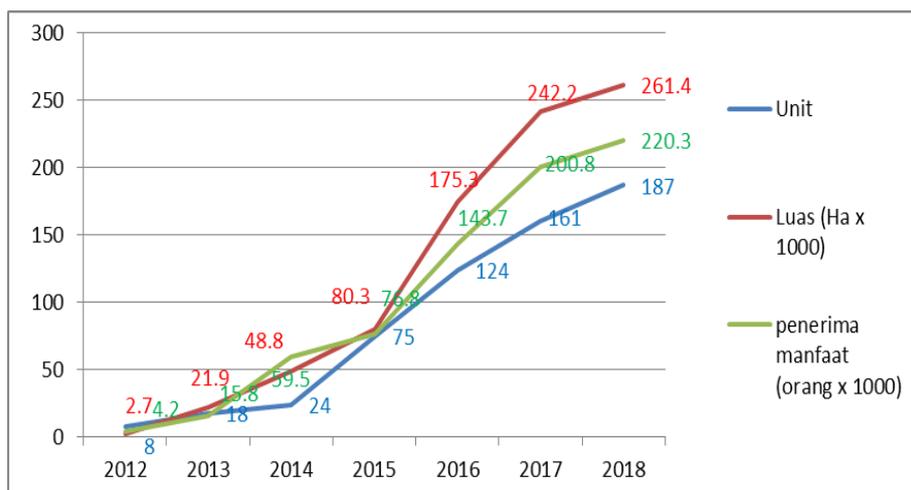
* PAK (Penetapan Areal Kerja) terhitung awal 2017 sudah tidak ada lagi, tetapi ada beberapa Unit Perhutanan Sosial yang Telah PAK tahun sebelumnya tetapi IUPHKm belum Keluar.

**Hutan adat dalam proses mendorong usulan.

***Rincian Unit, luas dan lokasi Perhutanan Sosial secara keseluruhan

Sumber data: data olahan Bidang PPMHA

Dari Tabel 46 diatas terlihat bahwa untuk skema Hutan Adat masih dalam proses mendorong usulan ditingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Merunut progresnya dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dalam Gambar 14.



Gambar 14. Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Tujuh Tahun Terakhir

Dari Gambar 14 di atas menggambarkan perkembangan Perhutanan Sosial di seluruh tahapan proses baik usulan, verifikasi, PAK dan Hak Pengelolaan/Izin pemanfaatan secara kumulatif dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, perkembangan menggembirakan pada komponen luas areal kelola dan penerima manfaat dari pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat. Dua komponen ini erat kaitannya dengan skema perhutanan sosial yang ada. Peningkatan unit hutan nagari akan berkorelasi lurus dengan luas areal kelola dan penerima manfaat, mengingat batasan luasan untuk skema hutan nagari bisa seluruh kawasan hutan lindung dan produksi di wilayah administrasi nagarinya, disamping personal/masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan hutan nagari akan lebih terbuka dibanding dengan skema HKm dan HTR yang memang terbatas pada jumlah anggota kelompok masing-masing HKm atau HTR. Peningkatan perkembangan yang nyata di tiga tahun terakhir merupakan hasil kontribusi dari berbagai pihak terkait yang tergabung dalam Kelompok Kerja Pengembangan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Faktor lain yang mendukung percepatan perluasan dan pengembangan Perhutanan Sosial di tahun 2018 adalah dukungan dari berbagai lembaga dan LSM yang memungkinkan Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat mendorong percepatan fasilitasi usulan Perhutanan Sosial melalui penyelenggaraan monitoring dan

evaluasi progres fasilitasi usulan, *workshop* fasilitasi usulan, rapat koordinasi Pokja, pengembangan usaha, pelatihan dan sekolah lapang peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pendamping Perhutanan Sosial, pengukuran karbon, pohon asuh, penyelenggaraan kampanye Perhutanan sosial melalui jurnalisme warga, peliputan dan dokumentasi praktek-praktek pengelolaan hutan yang baik serta fasilitasi pembayaran insentif jasa komunal yang menjaga kawasan hutan melalui fasilitasi pengembangan usaha di Perhutanan Sosial yang berdampak positif bagi kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Secara ekologis, studi primer di beberapa Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Nagari menunjukkan bahwa setelah mendapatkan perijinan Perhutanan Sosial, kepedulian masyarakat setempat akan kelestarian hutan jauh lebih meningkat, pemahaman akan pentingnya hutan bagi penyediaan air dan pencegahan bencana longsor dan banjir juga berkembang dimasyarakat luas, dan memiliki kecenderungan untuk melakukan penanaman pohon baik kayu kayuan terlebih lagi pohon buah buahan (MPTS). Hal ini bisa dilihat dari permintaan bibit tanaman dari lembaga/kelompok Perhutanan Sosial yang cenderung meningkat tiap tahunnya berdasarkan laporan UPTD BSPTH dan UPT BPDAS.

Secara sosial, di nagari yang mengembangkan perhutanan sosial juga berlangsung proses penyepakatan dan konsolidasi sosial sehingga menghasilkan kepastian pengelolaan terhadap tanah (hutan) yang dapat meminimalisir konflik tenurial dan mempererat hubungan sesama anggota masyarakat yang pada akhirnya menciptakan ketahanan sosial.

Dampak dan manfaat lain yang bersentuhan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, terutama dari aktivitas pasca perijinan melalui fasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial, dapat diilustrasikan dari studi kasus primer secara langsung melalui wawancara dengan pengelola di beberapa Hutan Nagari dan Hutan kemasyarakatan sebagai berikut:

1. Studi pendapatan dari usaha ekowisata LPHN Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, semenjak usaha ekowisata Rumah Pohon Puncak Kayu Manang dan Air Terjun Sarasah Kuo

dibuka, rata-rata kunjungan wisata perbulan kurang lebih 1.050 orang dengan rincian pengunjung hari kerja kurang lebih 50 orang dan hari libur sabtu/minggu antara 100 sampai dengan 300 orang, dengan membayar retribusi Rp. 5.000,- per orang dan jasa pemandu Rp. 30.000,- per kelompok (2 sampai 8 orang) sekali trip perjalanan maka LPHN telah mendapatkan penghasilan antara Rp. 9.000.000,- sampai dengan Rp. 13.200.000,- perbulannya. Nilai ini belum dihitung dari penjualan cenderamata gelang rasam, konsumsi, minuman, dan makanan yang dijual oleh masyarakat. Bila ada paket wisata menginap akan lebih tinggi lagi pendapatan masyarakat Sungai Buluh.

2. Studi pendapatan usaha penyewaan kapal boat dan penyediaan listrik melalui pembangkit listrik mikro hidro di HKm Patamuan, berdasarkan hitungan kasar Ketua Kelompok HKm, penghematan dari belanja BBM untuk penerangan per hari per KK yang telah dialiri listrik antara 2,5 hingga 6 liter perminggu, tergantung jenis lampu yang di pakai. Bila rata-rata konsumsi BBM sebesar 3 liter pada masing-masing 48 KK yang teraliri perminggu, artinya mereka menghabiskan 144 liter perminggu atau 576 liter per bulan. Bila harga BBM di Patamuan sekitar Rp. 15.000,- maka per bulan telah dihemat belanja Rp. 8.640.000,-. Jika ditambah usaha penyewaan boat yang rata-rata 2 trip perhari x Rp. 800,000 – Rp.1.000.000, maka dalam satu bulan kelompok mendapatkan tambahan penghasilan antara Rp. 48.000.000,- sampai dengan Rp. 60.000.000,-. Bila dikurangi biaya operasional per tripnya sebesar Rp. 600.000,-, maka kelompok mendapatkan tambahan penghasilan antara Rp.6.000.000 hingga Rp. 12.000.000 perbulan.
3. Studi Pendapatan Usaha gula Aren di HKm Karya Setia berdasarkan pengakuan Ketua Kelompok (Desrawardi), Kelompok mendapat tambahan pendapatan dari proses gula semut kurang lebih antara Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 8.000.000,- perbulan setelah dikurangi biaya produksi.
4. Studi Pengembangan Ternak Sapi/Kerbau di Hutan Nagari Pekan Rabaa, Pasir Talang Timur, dan Paru serta Hutan Kemasyarakatan Pasir Laweh secara sederhana telah menghasilkan pupuk organik dan tambahan

jumlah ternak antara 3 - 4 ekor pertahun dengan rata rata hasil antara Rp. 20.000.000,-sampai dengan Rp. 35.000.000,- pertahun, disamping pemanfaatan kompos dan pupuk organik dari kotoran ternak.

Dampak peningkatan pendapatan tersebut diatas merupakan bagian kecil dari manfaat yang diterima oleh lembaga/kelompok, disamping manfaat lain yang jauh lebih besar dari usaha-usaha lain, seperti agroforestri, peternakan sapi, beras organik, kemiri, kerajinan, makanan, air mineral, dan lain-lain yang belum diukur peningkatannya sebagai tambahan manfaat yang patut diperhitungkan. Disisi lain, masih banyak lembaga/kelompok yang belum memaksimalkan manfaat secara ekonomi karena masih dalam proses penguatan kelembagaan melalui fasilitasi pengembangan usaha.

Permasalahan:

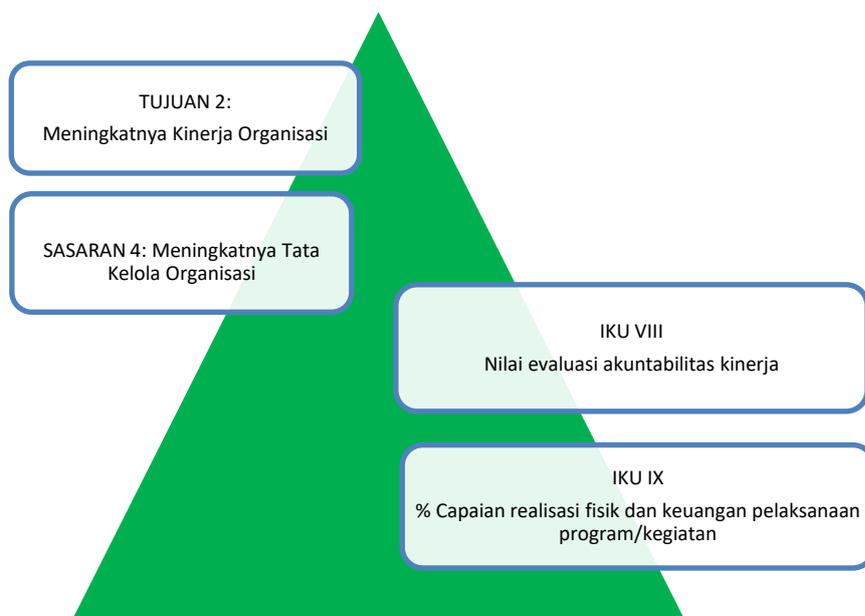
1. Belum dipahaminya secara menyeluruh aspek pemberdayaan masyarakat (Perhutanan Sosial) oleh semua unit kerja lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maupun KPH.
2. Kurangnya tenaga yang memiliki keahlian dalam fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan pengembangan Perhutanan Sosial/pemberdayaan masyarakat.
3. Kurangnya dukungan dan koordinasi lintas bidang dalam pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial.

Solusi:

1. Melakukan sosialisasi Perhutanan Sosial tingkat tapak.
2. Meningkatkan kapasitas penyuluh kehutanan/PKSM melalui *training of trainers* (TOT) sebagai pendamping percepatan Perhutanan Sosial. Mengupayakan pendamping bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, instansi/lembaga terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta mengoptimalkan pemberdayaan penyuluh kehutanan yang memiliki kapasitas untuk hal dimaksud.
3. Meningkatkan koordinasi lintas bidang dan meningkatkan kinerja forum PHBM sebagai salah satu wadah pertemuan penggiat Perhutanan Sosial.

IV. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Tujuan “**Meningkatnya Kinerja Organisasi**” dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan diukur dengan dua indikator kinerja. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Gambar 15.



Gambar 15. Tujuan dan Sasaran Strategis IV.

Tujuan “Meningkatnya Kinerja Organisasi” merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan, termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan (Laporan Kinerja) setiap tahun. Tujuan ini dapat dicapai dengan “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat”. Pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 47.

Tabel 47. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	100
		% Capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%	94,36%	99,33
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%)					99,67

Dari Tabel 47 di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis IV pada tahun 2018 berhasil dicapai. Rata-rata capaian sasaran adalah 99,67% atau naik 4,18% dari rata-rata capaian tahun lalu dan termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 99,67% di atas adalah tata kelola organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah mencapai tata kelola organisasi yang maksimal karena masih dalam kategori sangat baik.

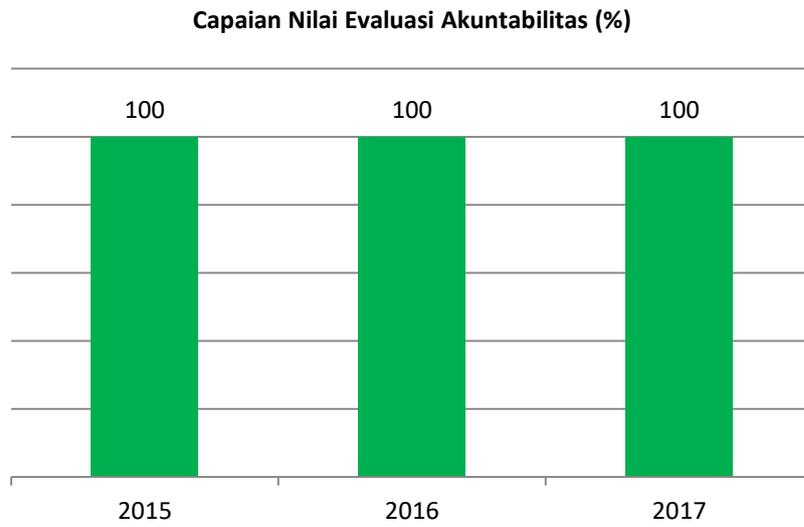
Tabel 48. Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2017 dan Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2018	Realisasi	
			2017 (n-1)	2018 (n)
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	BB
	% Capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%	86,44%	94,36%

Dari Tabel 48 dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” tahun 2018 sama nilainya dengan capaian kinerja pada tahun 2017, yaitu BB. Dan indikator kinerja “Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan” tahun 2018 lebih tinggi 8,35% dibandingkan dengan capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017.

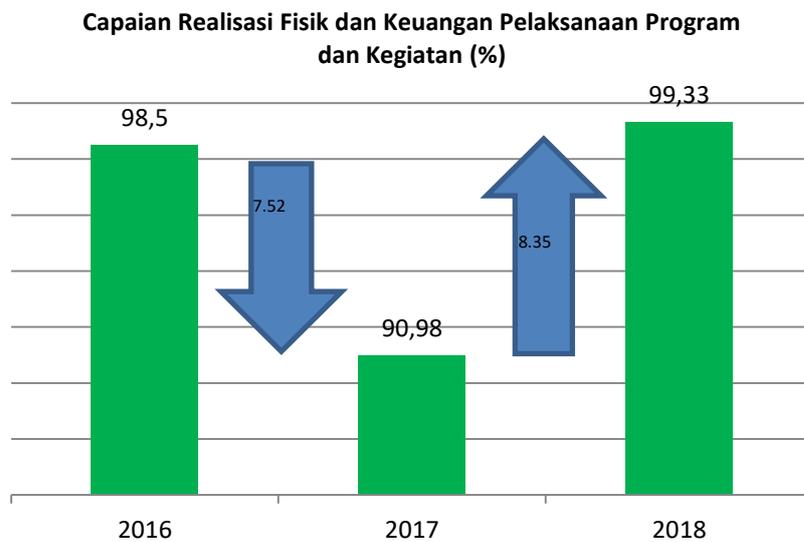
Capaian kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari realisasi seluruh proses tata kelola organisasi yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran. Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 16 dan 17.

IKU 7



Gambar 16. Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas (%) Tahun 2015 s.d Tahun 2017

IKU 8



Gambar 17. Capaian Kinerja Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018

Tabel 49. Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi sampai Akhir Periode RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan atau Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	100
	% Capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%	94,36%	99,33%

Tabel 49 memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja “Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja” pada tahun 2018 telah sesuai dengan capaian indikator kinerja target akhir RPJMD dan atau Renstra yaitu sebesar 100%. Namun, capaian ini tidak berarti capaian akhir RPJMD dan atau Renstra telah tercapai dengan terealisirnya tingkat kemajuan terhadap capaian akhir RPJMD dan atau Renstra sebesar 100%. Karena capaian akhir RPJMD dan atau Renstra akan tercapai, jika hingga tahun 2021, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat minimal BB setiap tahunnya. Capaian indikator kinerja “Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan” pada tahun 2018 belum sesuai dengan target, yaitu 95%, dan jika dibandingkan dengan akhir capaian RPJMD dan atau Renstra tingkat kemajuannya hanya 99,33%. Capaian kinerja ini perlu menjadi perhatian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah untuk pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Sumatera Barat, sehingga kedepannya dapat lebih memperhatikan tingkat kemajuan hasil capaian.

Tabel 50. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Riau

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Thn 2018		Ket
		Sumbar	Riau	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	B	Lebih tinggi
	% Capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	94,36%	-	-

Dari Tabel 50 dapat dilihat bahwa capaian indikator “Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja” Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan Provinsi Riau. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja BB artinya kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 sudah sangat baik, akuntabel, berkinerja

baik, dan memiliki sistem manajemen kerja yang handal. Sedangkan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Provinsi Riau memperoleh nilai B, artinya Dinas KLH Provinsi Riau telah memiliki akuntabilitas kinerja baik dan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja namun perlu sedikit perbaikan untuk sistem dan perlu banyak terfokus pada perbaikan *soft system*. Indikator kinerja “persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan” tidak dapat dibandingkan dikarenakan, hingga penyusunan Laporan Kinerja ini, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Riau belum dapat merilis data tersebut.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui delapan program yang terdiri atas tujuh program dengan pembiayaan APBD dan satu program dengan pembiayaan APBN, program dimaksud adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (APBD) yang terdiri atas dua belas kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah
 - k. Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi
 - l. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri atas sepuluh kegiatan yaitu:
 - a. Pembangunan Gedung kantor
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Pengadaan Mubelair
 - d. Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess

- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor
 - i. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD
 - j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari satu kegiatan yaitu:
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri atas satu kegiatan yaitu:
- a. Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri atas tiga kegiatan yaitu:
- a. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
 - b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Penatausahaan Keuangan SKPD
6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang terdiri atas tiga kegiatan yaitu:
- a. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
 - b. Implementasi ISO Pelayanan dan SPIP
 - c. Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan
7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK, Kegiatan Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Komponen Program, Evaluasi dan Pelaporan, SubKomponen Administrasi Kegiatan.

Seluruh kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kerjanya sangat baik. Realisasi capaian target indikator sasaran dan capaian indikator kinerja kegiatan secara lengkap dapat dilihat dari Tabel 51.

Tabel 51. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis IV Tahun 2018

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket		
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	- kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	100%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi OPD yang terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	100%			
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	- pembayaran tagihan rekening pajak bumi dan bangunan terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	100%			
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor	- jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor yang terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	100%		
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	- kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	100%		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	- kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	100%		
				Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	- kebutuhan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 bulan	12 bulan	100%		
				Penyediaan Makanan dan Minuman	- Pertemuan atau rapat yang diselenggarakan	12 bulan	12 bulan	100%		
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	- rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti	12 Bulan	12 Bulan	100%		
				Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	- publikasi kegiatan OPD yang tersedia	12 bulan	12 bulan	100%		
				Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	- wirid kantor dan kegiatan senam dikantor	12 Bulan	12 Bulan	100%		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung kantor	- Gedung kantor yang terbangun	1 Unit	1 Unit	100%	
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- kebutuhan kendaraan operasional yang terpenuhi	1 Unit	1 Unit	100%	
					Pengadaan Mubelair	- kebutuhan meubelair yang terpenuhi	15 Unit	15 Unit	100%	
					Pengadaan peralatan/perengkapan kantor	- kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	26 Unit	26 Unit	100%	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	- Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Mess yang terpelihara	2 Unit	2 Unit	100%	

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi Capaian (target)	Persentase Pencapaian (target)	Ket
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	100%	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	- Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	100%	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	- peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	53 Unit	53 Unit	100%	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	- Instalasi dan Jaringan kantor yang terpelihara	6 Bulan	6 Bulan	100%	
			Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	Honarium pengelola aset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset	12 Bulan	12 Bulan	100%	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	- kebutuhan pakaian dinas PNS/ Non PNS yang terpenuhi	573 Orang	573 Orang	100%	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- aparat sipil negara yang mengikuti bimbingan teknis	6 Kali	6 Kali	100%	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Lapoan Tahunan yang tersusun	5 Dok	5 Dok	100%	
			Penatausahaan Keuangan SKPD	- Honor KPA, PPTK, dan PA serta Pengelola keuangan OPD lainnya yang terbayarkan	12 Bulan	12 Bulan	100%	
			Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	- Dokumen RKA, DPA , DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	- Terlaksananya pengembangan data dan informasi kehutanan	2 Lap	2 lap	100%	
			Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP	- Terlaksananya implementasi Sosialisasi ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	2 Lap	2 Lap	100%	
			Monitoring pelaksanaan pembangunan kehutanan	- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan kehutanan	10 UPTD/KPH	10 UPTD/KPH	100%	
		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Komponen Program, Evaluasi dan Pelaporan sub komponen administrasi kegiatan	- Terlaksananya administrasi kegiatan	1 Lap	1 Lap	100%	

Uraian capaian IKU sasaran strategis “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” adalah sebagai berikut:

1. Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” memiliki target BB, terealisasi BB dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan aset seperti terlihat pada Tabel 51 di atas.

Indikator Kinerja Utama “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017. Akuntabilitas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan dan Sasaran yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Rencana tata kelola harus mengandung visi dan misi yang jelas, sebagai acuan untuk menyusun tujuan dan sasaran tata kelola.
2. Struktur kelembagaan yang solid untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Penetapan kebijakan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis, dan transparan.
4. Perencanaan yang realistis, terinci dan sesuai dengan kebutuhan, transparan dan partisipatif, akomodatif terhadap sosial budaya masyarakatsekitar hutan, dan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
5. Penetapan prosedur kerja yang tepat dan jelas, mudah dilaksanakan, mudah dimengerti dan transparan, serta mempertimbangkan peraturan perundangan yang terkait yang sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 065/097/Sekr-

2017 tentang Standar Operasional Prosedur Aparatur Pemerintah pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Januari 2017. SOP AP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 135 prosedur yang meliputi seluruh unit kerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

6. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, professional, dan bermoral.
7. Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, tertib administrasi, transparan, baik dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset daerah, dan pengelolaan barang inventaris.
8. Sistem pencatatan yang jelas, akurat, dan sederhana.

Laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) tata kelola akan mengacu pada prinsip-prinsip objektivitas, transparansi, akurasi yang tinggi, serta profesionalisme yang dapat diandalkan.

Penerapan prinsip transparansi dimaksudkan agar data/informasi kegiatan tata kelola pemerintahan termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerja organisasi dapat diakses oleh publik. Transparansi menumbuhkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan *stakeholders* lainnya sebagaimana yang telah kami lakukan melalui website www.sumbarprov.go.id.

Prinsip partisipasi dimaksudkan agar publik dapat berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pengambilan keputusan tata kelola, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dalam menyampaikan pendapat demi keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran tata kelola pemerintah yang baik dan berkelanjutan sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui mekanisme PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Melalui PPID, masyarakat diberikan akses untuk mengetahui informasi dan dokumentasi yang terdapat pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Capaian Target IKU “Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” Tahun 2018 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 52.

Tabel 52. Capaian Target IKU Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Per Triwulan Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	a Nilai evaluasi akuntabilitas	0%	BB	BB	BB	0%	100	BB	100%	BB	100%	BB	100%

Dari Tabel 52 diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut setiap triwulannya dapat dicapai sesuai target triwulan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan tata kelola organisasi dilakukan dengan baik.

Untuk mencapai target kinerja indikator “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” BB, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan implementasi ISO 9001:2015, melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan melaksanakan kegiatan sesuai Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang disusun.

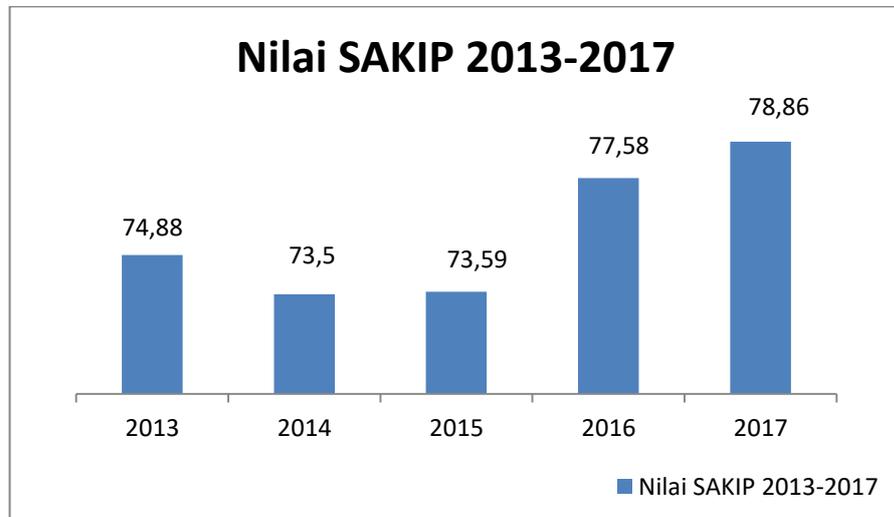
Rekapitulasi hasil evaluasi akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 53.

Tabel 53. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Lima Tahun Terakhir

Tahun	Perencanaan Kinerja (35%)	Pengukuran Kinerja (20%)	Pelaporan (15%)	Evaluasi Kinerja (10%)	Pencapaian Sasaran (20%)	Hasil Evaluasi	Nilai
2013	25,07	14,94	10,88	5,67	18,33	74,88	BB
2014	28,64	15,89	11,47	5,83	11,67	73,50	BB
2015	25,88	17,50	11,32	5,81	13,08	73,59	BB
2016	27,64	16,49	12,68	6,27	14,50	77,58	BB
2017	28,54	18,75	12,23	6,07	13,27	78,86	BB

Dari Tabel 53 di atas terlihat, sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan nilai BB pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini merupakan pemacu semangat seluruh Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tata kelola organisasi yang tertib, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan ISO 9001:2015 secara patuh.

Pencapaian nilai SAKIP pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat empat tahun terakhir dapat dilihat dalam Gambar 18.



Gambar 18. Pencapaian Nilai SAKIP Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Lima Tahun Terakhir

Dari Gambar 18 di atas menggambarkan nilai SAKIP pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam empat tahun terakhir sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, namun perlu ditingkatkan agar tata kelola organisasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menjadi sebuah sistem dengan pengendalian langsung pada sistem manajemen kerjanya untuk meminimalkan kesalahan manusia (*human error*). Dengan tata kelola organisasi yang baik, diharapkan dapat mempermudah sistem kerja organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Aplikasi *e-budgeting* yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga merupakan inovasi yang meningkatkan Sistem Akuntabilitas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

2. Indikator Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan” memiliki target 95%, terealisasi 94,36% dengan tingkat capaian 99,33% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan seperti terlihat pada Tabel 53 di atas.

Indikator Kinerja Utama “Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan” diukur dengan menghitung jumlah realisasi fisik dan realisasi keuangan yang dilaporkan dan dievaluasi setiap bulannya dibagi dengan angka dua dan dikalikan dengan angka 100%. Pada tahun 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan dana DBH-DR sebesar Rp 22.192.968.700,-. Adanya pelimpahan kewenangan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Dana Bagi Hasi-Dana Reboisasi (DBH-DR) yang semula masuk ke kabupaten penghasil dilimpahkan ke provinsi dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK02/2018 tentang Perubahan Dana APBN Tahun 2018 maka seluruh provinsi penghasil kayu mendapatkan dana DBH-DR melalui mekanisme anggaran perubahan.

Capaian Target IKU “Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan” tahun 2018 setiap triwulannya dapat diuraikan seperti pada Tabel 54.

Tabel 54. Capaian Target IKU Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan per Triwulan Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target				Realisasi							
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I	%	TRW II	%	TRW III	%	TRW IV	%
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	a. Persentase Capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	23.92%	65.77%	88.21%	95%	13.57%	56.73	28.59%	43.47	53.19%	60.30	94.36%	99.33

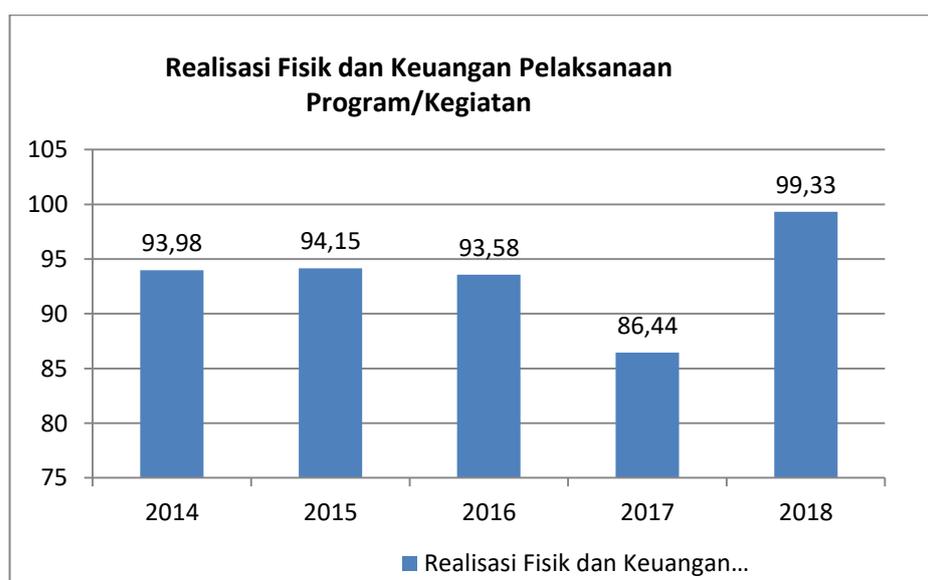
Dari Tabel 54 diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut dari triwulan I sampai IV belum dicapai sesuai target triwulan yang ditetapkan. Hal ini disebabkan dana DBH-DR Tahun Anggaran 2018 yang direncanakan pada awal tahun 2018 baru disahkan pada bulan Agustus 2018. Hal ini akan menjadi perhatian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang akan datang agar lebih menyempurnakan mekanisme perencanaan dan penganggaran.

Capaian kinerja persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 55.

Tabel 55. Rekapitulasi Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Lima Tahun Terakhir

Tahun	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Rata-Rata
2013	87,16	100	93,81
2014	87,96	100	93,98
2015	88,29	100	94,15
2016	87,16	100	93,58
2017	72,89	100	86,44
2018	90,02	98,70	94,36

Dari Tabel 55 diatas terlihat, sejak tahun 2013 hingga tahun 2018, capaian realisasi fisik dan keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat belum mencapai 95%, terakhir rata-rata hanya 94,36%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan beberapa hal diantaranya kendala teknis di lapangan dan efisiensi penggunaan anggaran. Namun, capaian fisik kegiatan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah 100% dan tahun 2018 adalah 98,70%. Pencapaian persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir dapat dilihat dalam Gambar 19.



Gambar 19. Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Lima Tahun Terakhir

Dari Gambar 19 diatas menggambarkan persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir belum sesuai dengan target IKU, sehingga perlu ditingkatkan agar tata kelola organisasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat terlaksana dengan baik.

Permasalahan:

1. Dana DBH-DR Tahun Anggaran 2018 baru ditetapkan pada bulan Agustus 2018 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal mengingat waktu yang sangat singkat.

Solusi:

1. Melakukan koordinasi dengan Bidang dan KPH untuk mematangkan perencanaan dan anggaran.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2018 sebagaimana Tabel 56.

Tabel 56. Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Jumlah Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan	Capaian	Sisa Anggaran
1.	Terwujudnya nilai pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan Indikator: 1. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya 2. Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu 3. Nilai Penerimaan	Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	- Terpeliharanya batas kawasan hutan	214,500,000	208,353,100	97.13	6,146,900
			Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	- Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutar yang terkendali	197,957,250	180,180,800	91.02	17,776,450
			Pengendalian perencanaan dan tata hutan	- Tersusunnya buku pengendalian perencanaan dan tata hutan	446,000,000	349,909,450	78.46	96,090,550
			Sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial	- Terlaksananya Sosialisasi Identifikasi Hutan Adat dan Penanganan Konflik Tenurial	243,200,000	187,586,550	77.13	55,613,450
			Penanganan Konflik Tenurial dan	- Jumlah konflik hutan adat yang teridentifikasi	82,452,190	58,660,350	71.14	23,791,840

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Jumlah Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan	Capaian	Sisa Anggaran
	Negara Bukan Pajak (PNBP) sector kehutanan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN)	Hutan Adat (DBH-DR)	dan terfasilitasi				
			Konsultasi/Koordinasi Operasional KPH	- Laporan konsultasi/koordinasi operasional KPH	148,459,000	142,480,000	95.97	5,979,000
			Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	- Termonitornya produksi hasil hutan dan PNBP sektor kehutanan	315,900,000	290,348,551	91.91	25,551,449
			Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Industri Kehutanan	- Termonitornya izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu	207,497,700	204,650,931	98.63	2,846,769
			Perencanaan dan pemanfaatan hutan pada wilayah KPH	- Hutan pada wilayah kelola KPH terencana dan dimanfaatkan	582,964,294	550,782,745	94.48	32,181,549
			Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan	- Potensi hasil hutan diwilayah KPH yang terkelola	562,033,066	534,447,900	95.09	27,585,166
			Pengembangan Kemitraan Kehutanan	- Jumlah unit kemitraan	199,000,000	176,037,499	88.46	22,962,501
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH-Resort (DAK)	- Operasionalisasi KPH dan TAHURA untuk peningkatan PAD melalui wisata	6,507,010,000	5,214,225,725	80.13	1,292,784,275
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH-Wisata (DAK)	- Operasionalisasi KPH dan TAHURA untuk peningkatan PAD melalui wisata	747,960,000	-	-	747,960,000
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan-Alat Ekonomi Produktif (DAK)	- Peningkatan masyarakat desa sekitar hutan untuk penurunan indeks Gini	757,800,000	750,692,780	99.06	7,107,220
			Sasaran Strategis I					11,212,733,500
2.	Meningkatnya Kemampuan Hutan Dalam Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Fungsinya Indikator Sasaran:	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pembuatan Bibit Tanaman Hutan	- Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas dan terlaksananya pembinaan terhadap penangkar	591,873,600	587,859,450	99.32	4,014,150

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Jumlah Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan	Capaian	Sisa Anggaran
	1.Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis 2.Persentase penurunan laju kerusakan hutan 3.Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)			benih				
			Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	- Sertifikasi mutu benih/ bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan	157,560,000	149,471,950	94.87	8,088,050
			Konservasi Sumberdaya Genetik	- Terbangunnya dan terpeliharanya sumber daya genetik	120,750,000	89,031,200	73.73	31,718,800
			Pengembangan Kualitas Bibit dan Benih Tanaman Hutan (DBH-DR)	- Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas dan terlaksana-nya pembinaan terhadap penangkar benih	3,383,216,335	2,402,554,100	71.01	980,662,235
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan	- Terehabilitasi-nya lahan kritis diluar kawasan hutan	1,372,117,600	1,266,818,170	92.33	105,299,430
			Monitoring dan pembinaan kegiatan RHL	- Terlaksana-nya monitoring dan pembinaan RHL/ Reklamasi	375,873,300	350,067,845	93.13	25,805,455
			Pengendalian Pengelolaan Daerah Airan Sungai	- Tersusunnya rencana pengelolaan DAS	581,330,000	483,280,520	83.13	98,049,480
			Pembuatan Tanaman (DAK)	- Penurunan jumlah lahan kritis, banjir dan tanah longsor	5,271,196,992	4,715,157,720	89.45	556,039,272
			Pembangunan DAM Penahan (DAK)	- Penurunan jumlah lahan kritis, banjir dan tanah longsor	438,613,008	384,089,336	87.57	54,523,672
			Rehabilitasi Lahan dan Penghijauan Lingkungan	- Terlaksana-nya penanaman pada lahan kritis	4,772,024,000	4,594,087,850	96.27	177,936,150
			Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi oleh Tim Provinsi	- Terlaksananya pengendalian kegiatan rehabilitasi oleh tim provinsi	119,389,000	110,351,619	92.43	11,979,762
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Pengamanan dan perlindungan hutan	- Kasus tindak pidana hutan yang ditindak lanjuti	2,531,159,410	2,296,346,723	90.72
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat		- Jumlah masyarakat yang berperan	985,400,000	967,327,575	98.17	18,072,425

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Jumlah Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan	Capaian	Sisa Anggaran
			Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	serta dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam				
			Pengukuran simpanan karbon	- Tersedia-nya data simpanan karbon	328,000,000	283,594,256	86.46	44,405,744
			Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH	- Wilayah kelola KPH yang di konservasi	153,229,850	144,691,430	94.43	8,538,420
			Penyusunan peta rawan bencana kawasan hutan	- Peta rawan bencana kawasan hutan	101,573,500	95,359,900	93.88	6,213,600
			Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	- Terbentuknya kawasan ekosistem esensial	132,260,000	117,117,500	88.55	15,142,500
			Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	- Terlaksananya Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan	137,000,000	122,343,613	89.30	14,656,387
			Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	- Terlaksananya fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan	151,308,750	129,085,219	85.31	22,223,531
		Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Terlaksananya pemantauan titik panas, patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta bimbingan teknis kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)	1,201,500,000	1,003,444,700	83.52	198,055,300
			Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Jumlah sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan	8,918,022,500	8,377,946,250	93.94	540,076,250
			Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan	- Jumlah peserta sosialisasi pencegahan	491,039,500	283,698,450	57.78	207,341,050

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Jumlah Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan	Capaian	Sisa Anggaran
			Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Berbagai Ragam Metode	dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan				
			Pelatihan/ Pembekalan/In House Training/ Penyegaran/ Bi mtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Jumlah peserta bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	292,232,500	269,428,342	92.20	22,804,158
			Monitoring dan Evaluasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan	- Jumlah monitoring dan evaluasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan	88,831,250	8,694,750	9.79	80,136,500
			Ground Check Hotspot dan/atau Informasi Kebakaran	- Jumlah ground check hot spot	61,812,500	412,500	0.67	61,400,000
			Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	- Jumlah pemadaman kebakaran hutan dan lahan	271,420,000	26,680,850	9.83	244,739,150
			Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	- Jumlah patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	174,012,500	163,472,000	93.94	10,540,500
			Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat koordinasi, Kunjungan Kerja dan Lain-Lain	- Jumlah koordinasi melalui kunjungan kerja pencegahan kebakaran hutan dan lahan	245,878,000	151,875,450	61.77	94,002,550
			Patroli Terpadu bersama Masyarakat dan Pihak/Instansi Terkait Lainnya	- Jumlah patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan	553,251,250	490,943,500	88.74	62,307,750
Sasaran Strategis II					34,001,875,345	30,065,232,768	88.42	3,939,584,958
3.	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Indikator Sasaran: Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat Indikator: 1.Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan	- Terlaksananya Musrenbangh utda, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota	198,718,350	178,777,230	89.97	19,941,120
			Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat	- Meningkatnya kelompok/ lembaga masyarakat yang mengelola hutan (HKm, HN,HTR dan HR Kemitraan)	558,986,800	462,096,766	82.67	96,890,034

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Jumlah Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan	Capaian	Sisa Anggaran
			Kemitraan					
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan Hutan Rakyat Kemitraan	- Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan	390,611,200	368,443,400	94.32	22,167,800
			Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	- Terjalinnnya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan)	159,000,000	150,587,500	94.71	8,412,500
			Pengembangan Hutan Mangrove	- Terlaksananya koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove	108,743,500	92,253,000	84.84	16,490,500
			Pengembangan unit percontohan penyuluh kehutanan	- Terbangunnya Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	400,000,000	387,265,650	96.82	12,734,350
			Peningkatan Kapasitas Penyuluh kehutanan	- Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di Sumatera Barat	262,450,000	235,183,900	89.61	27,266,100
			Penyiapan Perhutanan Sosial	- Jumlah kelompok perhutanan sosial yang terusulkan	689,534,000	578,664,800	83.92	110,869,200
			Pemberdayaan KTH melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha	- Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya dari pemula menjadi madya	306,175,475	268,412,000	87.67	37,763,475
			Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan	- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan temu teknis, Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha	361,875,300	359,475,300	99.34	2,400,000
			Penyusunan Programa	- Jumlah peserta yang	236,126,100	227,838,050	96.49	8,288,050

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Jumlah Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan	Capaian	Sisa Anggaran
			Penyuluhan Kehutanan	mengikuti penyusunan program penyuluhan kehutanan PNS dan PKSM				
			Sosialisasi Kebijakan RHL oleh Penyuluh Kehutanan	- Jumlah penyuluh kehutanan yang mengikuti bimbingan teknis RHL, Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi RHL bagi masyarakat sekitar RHL kebijakan	255,065,300	248,220,300	97.32	6,845,000
			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	- jumlah kelompok pengelola hutan yang dilatih dalam pengembangan usaha perhutanan sosial	1,010,000,000	861,784,025	85.33	148,215,975
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	- Terlaksananya pengembangan Perhutanan Sosial	106,544,000	86,855,600	81.52	19,688,400
			Sekolah Lapangan Penyuluhan Kehutanan untuk Mendukung Perhutanan Sosial (HKm)	- Terlaksananya sekolah lapangan penyuluhan kehutanan untuk mendukung perhutanan sosial (HKm)	67,640,000	66,845,000	98.82	795,000
			Biaya Operasional Penyuluh	- Terbayarkannya BOP Penyuluh Kehutanan	236,160,000	236,160,000	100	0
Sasaran Strategis III					5,347,630,025	4,808,862,521	89.93	538,767,504
4.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Indikator: 1.Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja 2.Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	- Terlaksananya pengembangan data dan informasi kehutanan	297,667,363	281,126,925	94.44	16,540,438
			Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP	- Terlaksananya implementasi Sosialisasi ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	231,575,300	211,503,425	91.33	20,071,875
			Monitoring pelaksanaan pembangunan kehutanan	- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pengawasan kegiatan	334,357,650	332,567,870	99.46	1,789,780

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Jumlah Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan	Capaian	Sisa Anggaran
				pembangunan kehutanan				
			Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan	- Tersedianya data neraca sumber daya hutan	119,690,000	103,345,900	86.34	16,344,100
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	- kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi	84,652,000	69,613,480	82.23	15,038,520
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi di OPD yang terpenuhi	725,600,000	402,122,766	55.42	323,477,234
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	- pembayaran tagihan rekening pajak bumi dan bangunan terpenuhi	15,400,000	989,323	6.42	14,410,677
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor	- jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor yang terpenuhi	1,080,194,752	1,041,543,214	96.42	38,651,538
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	- kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi	135,000,000	129,360,000	95.82	5,640,000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	171,800,000	171,284,000	99.70	516,000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	- kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	90,000,000	90,000,000	100.00	-
			Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	- kebutuhan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	33,000,000	22,632,800	68.58	10,367,200
			Penyediaan Makanan dan Minuman	- Pertemuan atau rapat yang diselenggarakan	70,000,000	40,224,000	57.46	29,776,000
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	- rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti	510,632,300	356,058,894	69.73	154,573,406
			Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	- publikasi kegiatan OPD yang tersedia	20,000,000	7,400,000	37.00	12,600,000
			Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan	- wirid kantor dan kegiatan senam dikantor	149,208,669	110,450,000	74.02	38,758,669

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Jumlah Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan	Capaian	Sisa Anggaran
			Fisik Aparatur					
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung kantor	- Gedung kantor yang terbangun	200,000,000	198,598,000	99.30	1,402,000
			Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Kebutuhan kendaraan dinas yang terpenuhi	386,550,000	386,550,000	100.00	-
			Pengadaan Mubelair	- Terlaksananya pengdaan meubelair	100,000,000	99,145,000	99.15	855,000
			Pengadaan peralatan/perengkapan kantor	- Terlaksananya pengadaan peralatan/perengkapan kantor	98,880,000	98,161,600	99.27	718,400
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas	100,000,000	99,685,000	99.69	315,000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	300,000,000	298,924,000	99.64	1,076,000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional	415,000,000	362,867,297	87.44	52,132,703
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	- Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	200,000,000	70,250,000	35.13	129,750,000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	- Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	50,000,000	49,806,500	99.61	193,500
			Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	- Honorium pengelola aset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset	284,891,000	271,182,228	95.19	13,708,772
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	- kebutuhan pakaian dinas PNS/ Non PNS yang terpenuhi	310,000,000	271,781,700	87.67	38,218,300
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- aparat sipil negara yang mengikuti bimbingan teknis	283,142,000	217,533,000	76.83	65,609,000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPI dan Lapoan Tahunan yang tersusun	116,490,000	112,425,000	96.51	4,065,000
			Penatausahaan Keuangan SKPD	- Honor KPA, PPTK, dan PA serta Pengelola keuangan OPD lainnya yang terbayarkan	514,800,000	504,363,280	97.97	10,436,720

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)	Jumlah Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan	Capaian	Sisa Anggaran
			Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	- Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun	79,875,000	74,720,280	93.55	5,154,720
		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Administrasi Kegiatan	- Terlaksananya administrasi kegiatan	158,514,000	150,145,275	94.72	8,368,725
Sasaran Strategis IV					7,666,920,034	6,636,360,757	86.56	1,030,559,277

Dari Tabel 56 diatas dapat dilihat bahwa serapan anggaran tahun 2018 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, DAK, DBH-DR, dan APBN yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 66.398.378.204,- dan menjadi Rp. 58.229.158.904,- pada anggaran perubahan yang terdiri atas:

- a. Anggaran Sumber Dana Alokasi Khusus: Rp. 13.276.000.000,-
- b. Anggaran Sumber Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2018: Rp. 15.557.878.000,-
- c. Anggaran Sumber Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2017: Rp. 6.635.090.000,-
- d. Anggaran Sumber Dana APBD: Rp. 21.923.484.904,-
- e. Anggaran Sumber Dana APBN: Rp. 836.706.000,-

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target kinerja empat sasaran strategis diatas adalah sebesar Rp. 50.358.812.427,- atau 86,48% terhadap alokasi dana perubahan. Artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 7.870.346.477,- atau 13,52%, turun dari efisiensi anggaran pada tahun lalu yaitu 6,43%. Efisiensi ini diiringi dengan efektifnya pencapaian target ke empat sasaran strategis dengan rata-rata sasaran sebesar 126,43% dengan kategori keberhasilan sangat baik.

Rincian serapan anggaran masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya nilai pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis ini dialokasikan dana pada DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebesar Rp. 11.212.733.500. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran

Strategis I adalah sebesar Rp. 8.848.356.381 atau 78,91%. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95% dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap belum sesuai dengan target penyerapan anggaran. Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis I ini secara keseluruhan 100%.

2. Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis ini dialokasikan dana pada DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebesar Rp. 34.001.875.345,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis II adalah sebesar Rp. 30.065.232.768,- atau 88,42%. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95% dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap belum sesuai dengan target penyerapan anggaran. Realisasi semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis II ini secara keseluruhan 88,43%. Kecilnya realisasi pada Sasaran Strategis II diatas disebabkan terdapat 3 (tiga) kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi yang pelaksanaan kegiatannya bersifat situasional sehingga tidak terealisasi optimal, yaitu:

1. *Ground Check Hotspot* dan/atau Informasi Kebakaran
2. Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan
3. Monitoring dan Evaluasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan

Terlambatnya pengesahan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi pada Agustus 2018 menyebabkan dana pada tiga kegiatan tersebut di atas tidak digunakan secara optimal dikarenakan mulai bulan September hingga Desember 2018 curah hujan di Sumatera Barat cukup tinggi.

3. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis III ini dialokasikan dana pada DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebesar Rp. 5.347.630.025,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis III adalah sebesar Rp. 4.808.862.521,- atau 89,93% terhadap alokasi dana perubahan. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95% dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja

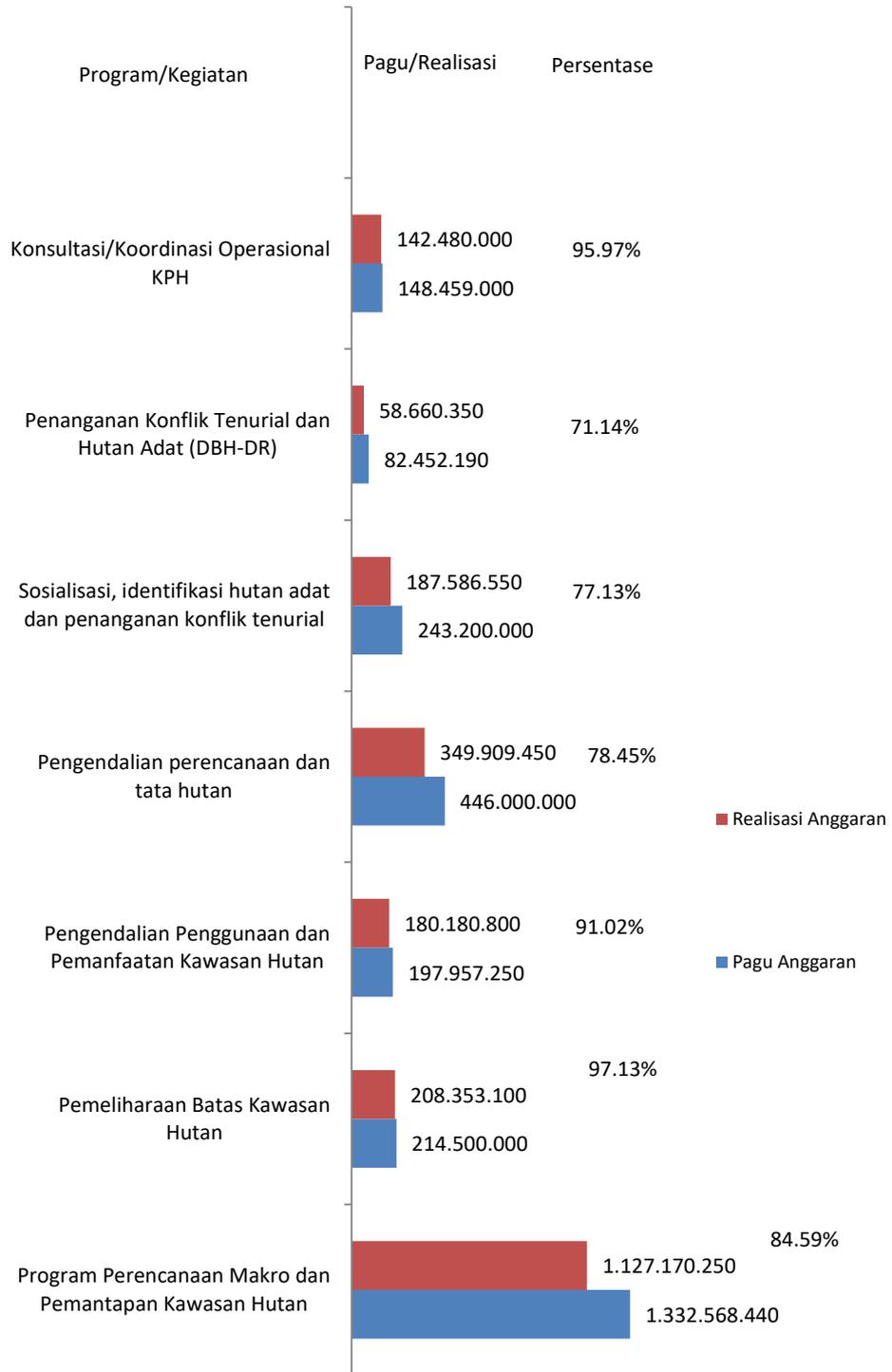
keuangan sasaran ini dianggap belum sesuai dengan target penyerapan anggaran. Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis III ini secara keseluruhan 100%.

4. Meningkatnya tata kelola organisasi

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis IV ini dialokasikan dana pada DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebesar Rp. 7.666.920.034,-. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target Sasaran Strategis IV adalah sebesar Rp. 6.636.360.757,- atau 86,56% terhadap alokasi dana perubahan. Apabila asumsi keberhasilan kinerja keuangan dinilai sekurang-kurangnya 95% dari dana yang dialokasikan terserap maka kinerja keuangan sasaran ini dianggap belum sesuai dengan target penyerapan anggaran. Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis IV ini secara keseluruhan 100%.

Untuk menunjang tercapainya empat sasaran di atas juga didukung oleh belanja tidak langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja tambahan penghasilan pegawai, dan insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp. 45.776.541.798,- dengan realisasi sebesar Rp. 43.304.601.939,- atau sekitar 94,60%. Memperhatikan realisasi serapan anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh sebagaimana yang terdapat pada Tabel 56 di atas maka kinerja keuangan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat belum berhasil untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja keuangan sebesar 90.02%. Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini pada umumnya sudah diatas 85%.

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 1



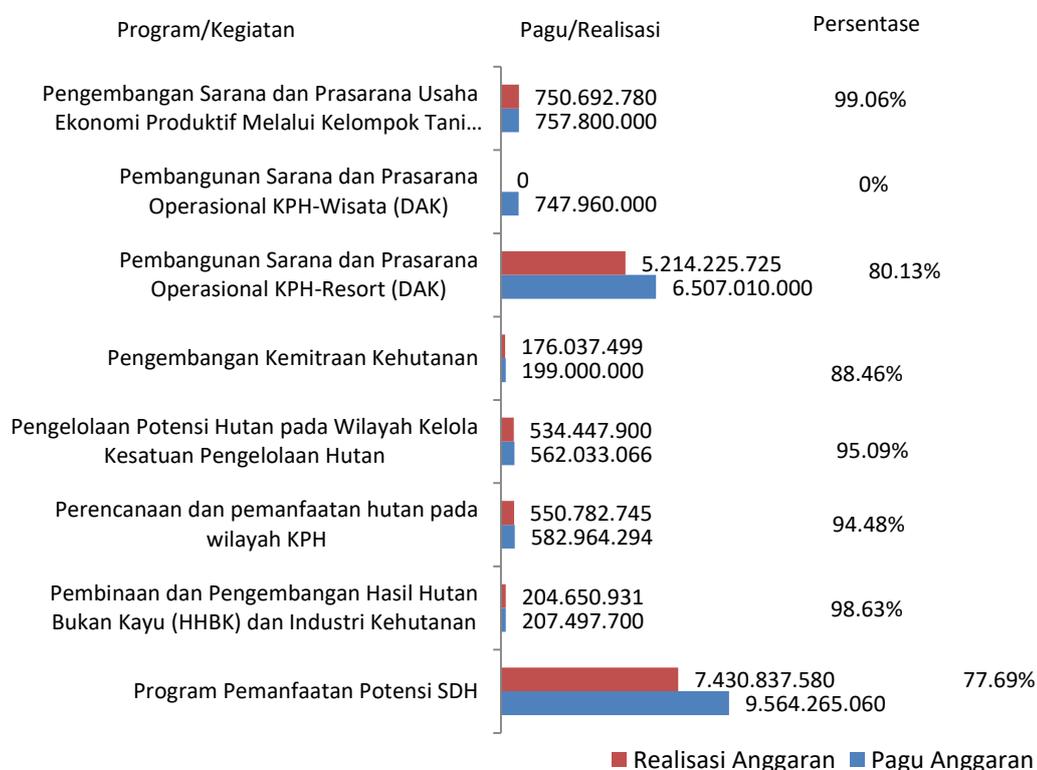
Gambar 20. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 1

Persentase Realisasi Anggaran IKU I (input): 84,59%

Persentase Capaian IKU I (output): 100%

Efisiensi IKU I: Rp. 205.398.190,- (15,41%)

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 2



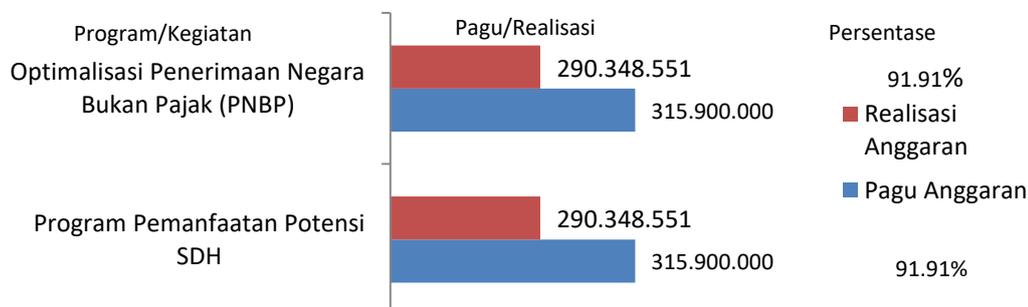
Gambar 21. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 2

Persentase Realisasi Anggaran IKU 2 (input): 77,69%

Persentase Capaian IKU 2 (output): 113,33%

Efisiensi IKU 2: Rp. 2.133.427.480,- (22,31%)

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 3



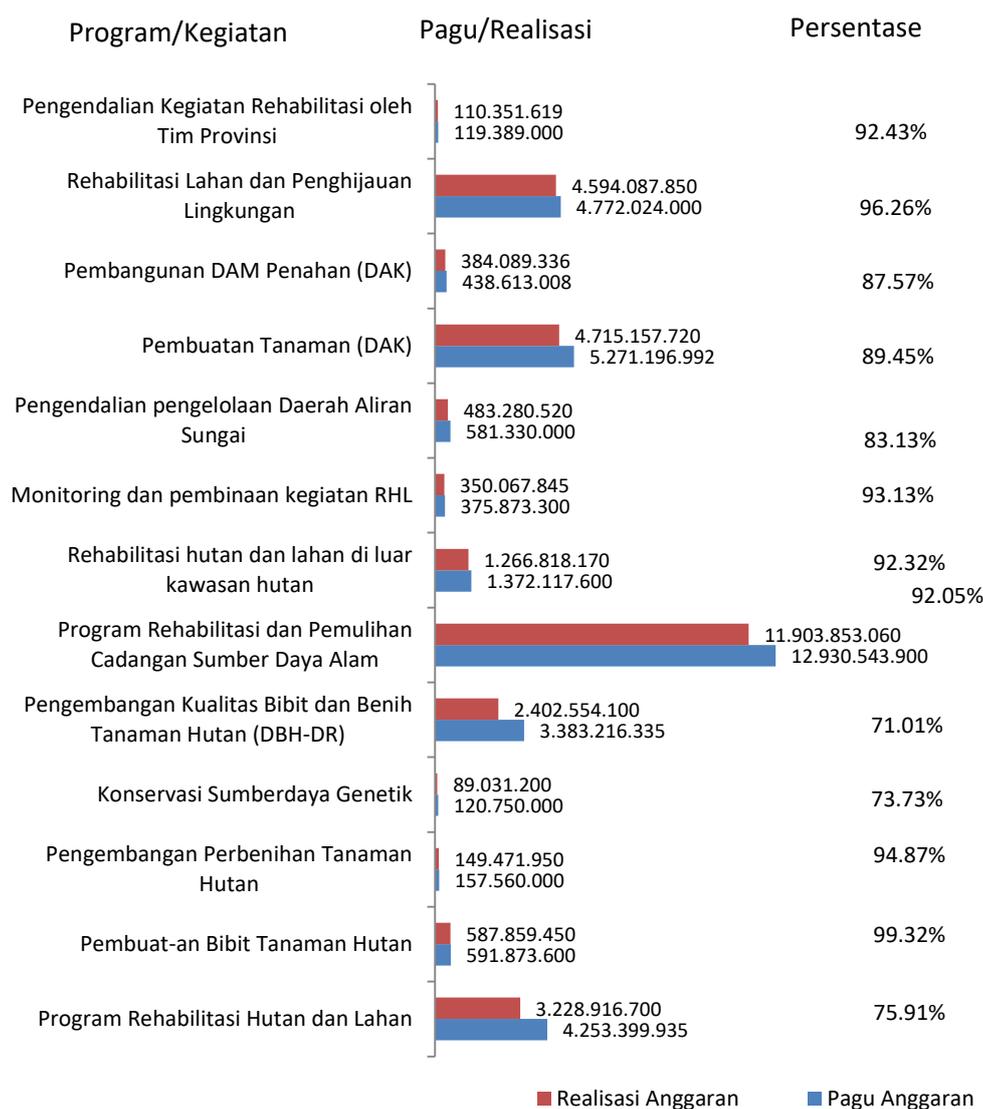
Gambar 22. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 3

Persentase Realisasi Anggaran IKU 3 (input): 91,91%

Persentase Capaian IKU 3 (output): 93%

Efisiensi IKU 3: Rp. 25.551.449,- (8.09%)

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 4



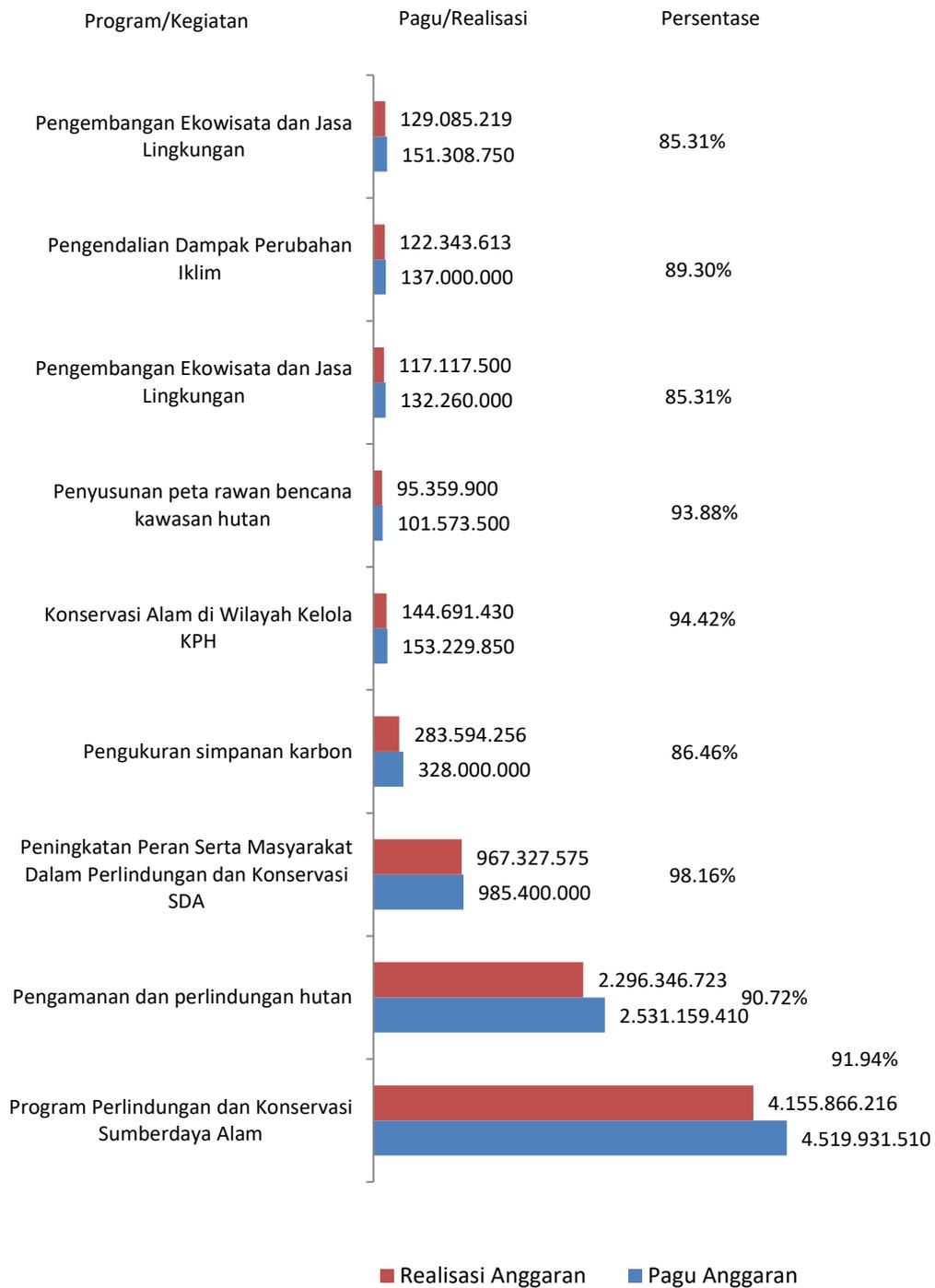
Gambar 23. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 4

Persentase Realisasi Anggaran IKU 4 (input): 88,06%

Persentase Capaian IKU 4 (output): 100,92%

Efisiensi IKU 4: Rp. 2.051.174.075,- (11,94%)

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 5



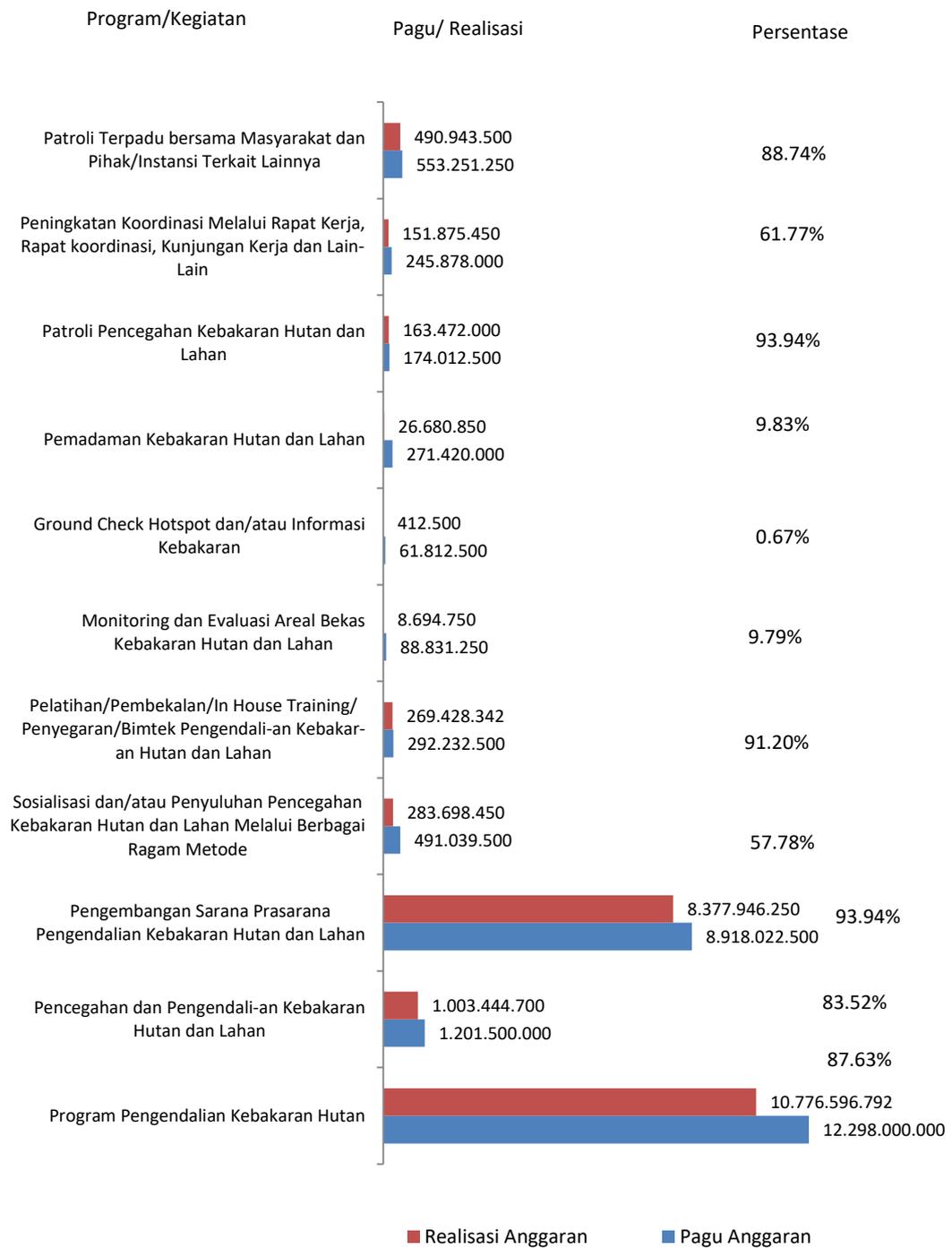
Gambar 24. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 5

Persentase Realisasi Anggaran IKU 5 (input): 91,94%

Persentase Capaian IKU 5 (output): 128,13%

Efisiensi IKU 5: Rp. 364.065.294,- (8,06%)

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 6



Gambar 25. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 6

Persentase Realisasi Anggaran IKU 6 (input): 87,63%

Persentase Capaian IKU 6 (output): 287,73%

Efisiensi IKU 6: Rp. 1.521.403.208,- (12,37%)

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 7



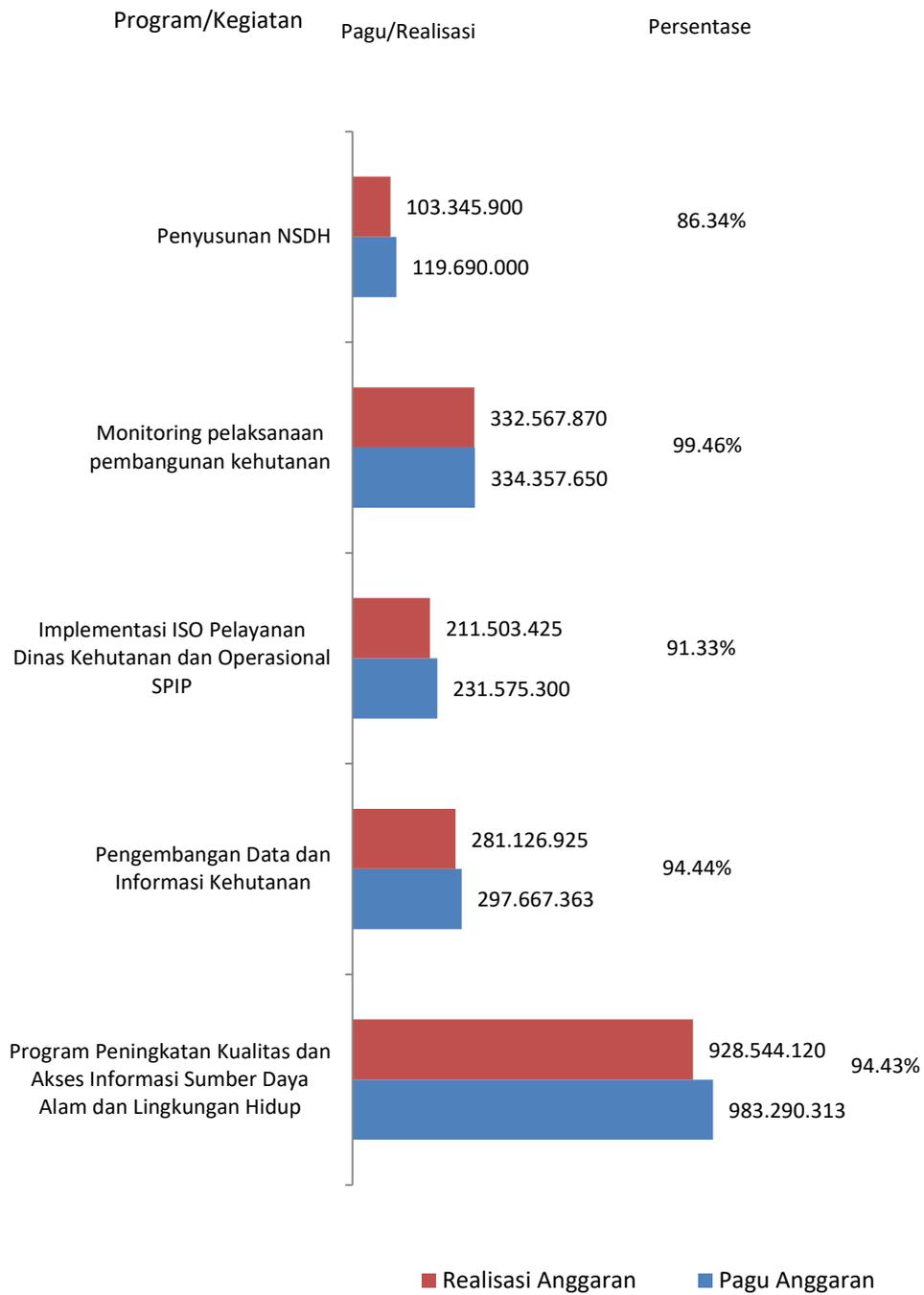
Gambar 26. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 7

Persentase Realisasi Anggaran IKU 7 (input): 87,63%

Persentase Capaian IKU 7 (output): 287,73%

Efisiensi IKU 7: Rp. 1.521.403.208,- (12,37%)

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 8



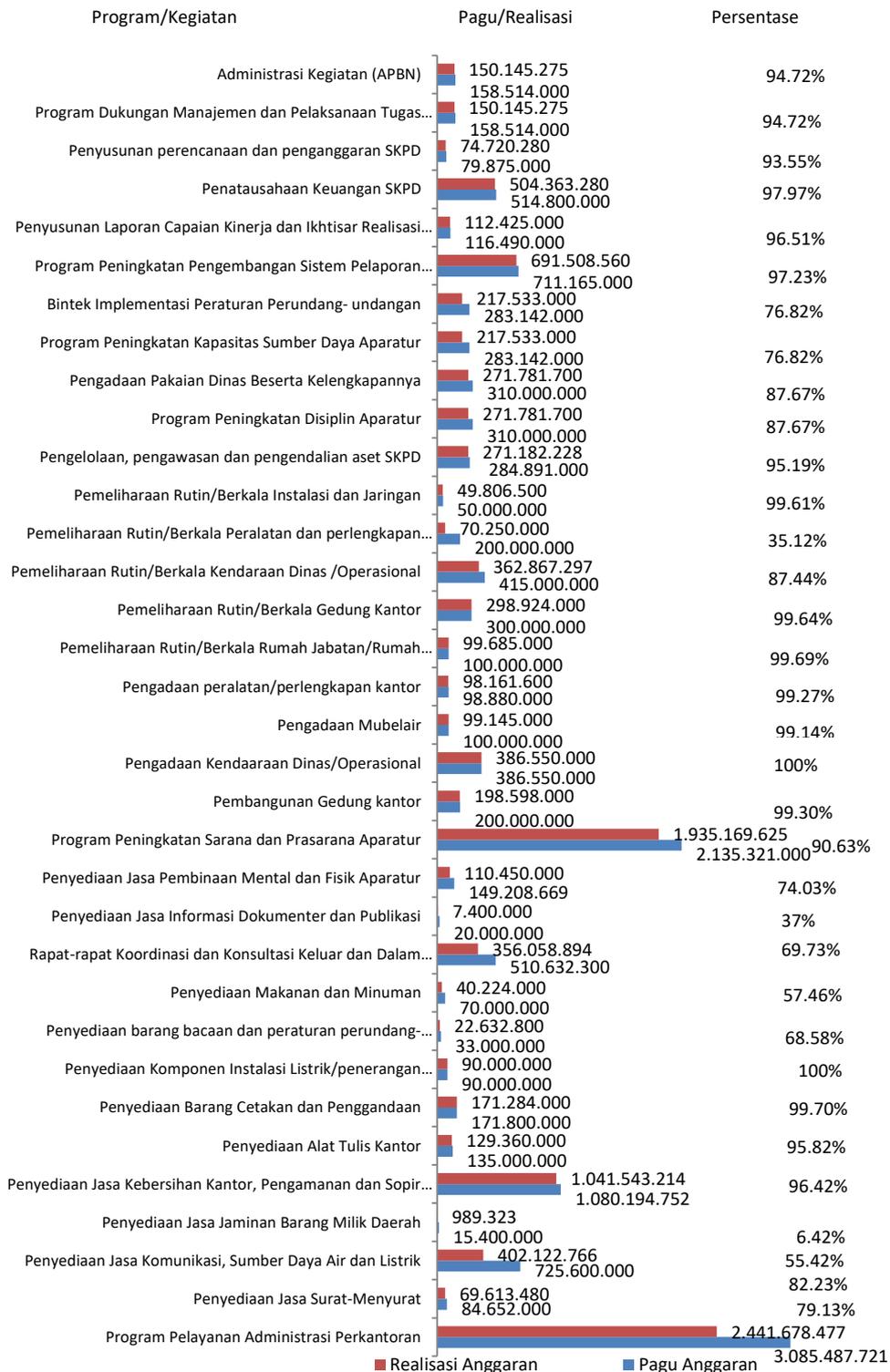
Gambar 27. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 8

Persentase Realisasi Anggaran IKU 8 (input): 89,93%%

Persentase Capaian IKU 8 (output): 142,29%

Efisiensi IKU 8: Rp. 538.767.504,- (10,07%)

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKU 9



Gambar 28. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU 9

Persentase Realisasi Anggaran IKU 9 (input): 85,40%

Persentase Capaian IKU 9 (output): 99,33%

Efisiensi IKU 9: Rp. 975.813.084,- (14,60%)

Realisasi semua kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini pada umumnya sudah diatas 85%. Adapun kegiatan yang mempunyai kinerja keuangan kurang dari 90% adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana sebesar Rp. 84.652.000,- (Delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 69.613.480 (Enam puluh Sembilan juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau (82,23%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 15.038.520,- merupakan sisa mati dari anggaran BBM dan Caraka, sisa mati pembelian perangkko, dan sisa mati sewa kotak pos, dibayarkan sesuai dengan kebutuhan Dinas dan UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp. 725.600.000,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 402.122.766,- (Empat ratus dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) atau (55,42%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 323.477.234,- merupakan sisa mati pembayaran telepon, pembayaran air, dan pembayaran listrik serta untuk pembayaran bulan Desember 2018 baru dapat dibayarkan di bulan Januari 2019, sehingga menjadi hutang jangka pendek.
3. Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah dengan dana sebesar Rp. 15.400.000,- (Lima belas juta empat ratus ribu rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 989.323,- (Sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) atau (6,42%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 14.410.677,- merupakan sisa mati dari pembayaran pajak bumi dan bangunan sesuai yang tertera pada dalam tagihan pembayaran PBB.
4. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan dana sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 22.632.800,- (Dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau (68,58%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 10.367.200,- merupakan sisa anggaran yang diperuntukan pada UPTD KPH Dinas Kehutanan yang tidak terlaksana.
5. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum dengan dana sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 40.224.000,- (Empat

puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau (57,46%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 29.776.000,- merupakan sisa mati kegiatan karena disesuaikan dengan kebutuhan rapat yang dilaksanakan.

6. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dengan dana sebesar Rp. 510.632.300,- (Lima ratus sepuluh satu juta rupiah enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 356.058.894,- (Tiga ratus lima puluh enam juta lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) atau (69,73%) dengan fisik (100%). Sisaanggaran sebesar Rp. 154.573.406,- merupakan efisiensi/ penghematan bahan bakar perjalanan dinas, penginapan, dan honorarium. Kegiatan juga bersifat situasional/berupa undangan yang masuk dari instansi lain.
7. Kegiatan penyediaan jasa informasi, dokumentasi, dan publikasi dengan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) realisasi Rp. 7.100.000,- (Tujuh juta seratus ribu rupiah), atau (35,50%) dengan fisik (35,50%). Sisa anggaran sebesar Rp. 12.900.000,- merupakan sisa mati, dibayarkan sesuai dengan liputan yang dilaksanakan.
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur dengan dana sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), setelah perubahan menjadi Rp. 149.208.669,- (Seratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) untuk kegiatan *Outbound*, realisasi keuangan sebesar Rp. 110.450.000,- (Seratus sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau (74,02%) dengan fisik (100%). Sisa anggaran sebesar Rp. 38.756.669,- merupakan sisa mati yang terdiri dari :
 - Honorarium pelatih senam sebesar Rp. 10.860.000,-
 - Honorarium pembaca Al-Qur'an sebesar Rp. 12.100.000,-
 - Honorarium penceramah sebesar Rp. 15.590.000,-
 - Sisa mati anggaran *Outbound* sebesar Rp. 208.669,-
9. KegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dengan dana sebesar Rp. 415.000.000,- (Empat ratus lima belas juta rupiah), realisasi sebesar Rp. 362.867.297,- (Tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau (87,44%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 52.132.703,- merupakan sisa mati kegiatan dengan rincian :

- Sisa mati kegiatan asuransi kendaraan roda empat.
 - Sisa mati kegiatan jasa service sebesar Rp. 42.558.30,-
 - Sisa mati pembelian BBM/pelumas sebesar Rp. 6.043.650,-
 - Sisa mati jasa KIR sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Sisa mati pembayaran pajak kendaraan sebesar Rp. 733.564,-
10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau (35,15%) dengan fisik (100%). Sisa anggaran sebesar Rp. 129.750.000,- merupakan sisa mati, karena dibayarkan sesuai biaya terhadap barang yang yang diusulkan untuk diperbaiki.
11. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya dengan dana sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) tidak ada perubahan, ini dilaksanakan melalui lelang dengan harga satuan. Realisasi keuangan sebesar Rp. 271.781.700,- (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) atau (87,67%) dengan fisik (100%). Sisa anggaran sebesar Rp. 38.218.300,- merupakan sisa mati, karena dibayarkan sesuai dengan harga satuan dalam kontrak dikarenakan banyak pegawai yang sudah pindah kembali ke kabupaten/kota dan telah pensiun.
12. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan dana sebesar Rp. 190.924.200,- (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah, setelah perubahan menjadi Rp. 283.142.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 184.661.100,- (seratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) atau (65,22%) dengan fisik (100%). Sisa anggaran sebesar Rp. 98.480.800,- merupakan sisa mati.
13. Kegiatan Pengembangan Kemitraan Kehutanan dengan dana sebesar Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 175.870.899,- (seratus tujuh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau (88,38%) dengan fisik (100%). Sisa anggaran sebesar Rp. 23.129.101,- merupakan sisa mati kegiatan berupa BBM, efisiensi penginapan, dan makan minum kegiatan.

14. Pembangunan sarana prasarana operasional KPH-Resort (DAK) dengan dana sebesar Rp. 6.507.010.000 (enam milyar lima ratus tujuh juta sepuluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.214.225.725,- atau (80,13 %) dengan realisasi fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 1.292.784.275,- merupakan sisa tender kontrak.
15. Konservasi sumber daya genetik dengan dana sebesar Rp. 120.750.000 (seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 89.031.200,- atau (73,73%) dengan realisasi fisik (93,64%).Sisa anggaran sebesar Rp. 31.718.800,- merupakan sisa-sisa belanja akomodasi, Bahan Bakar Minyak, Alat Tulis Kantor, Penggandaan, dan sisa Uang Harian Perjalanan Dinas akibat pemakaian oleh personal dengan standart biaya yang dibawahnya.
16. Pengembangan kualitas bibit dan benih tanaman hutan dengan dana sebesar Rp. 3.383.216.335,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.402.554.100,- (dua milyar empat ratus dua juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) atau (71,01 %) dengan realisasi fisik (78,02%).Sisa anggaran sebesar Rp. 980.662.235,- merupakan sisa kontrak lelang pengadaan bibit dan sisa-sisa belanja akomodasi, Bahan Bakar Minyak, Alat Tulis Kantor, Penggandaan, dan sisa Uang Harian Perjalanan Dinas akibat pemakaian oleh personal dengan standar biaya yang dibawahnya.
17. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan memiliki nilai anggaran setelah perubahan Rp. 198.718.350,- (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 178.77.230,- atau sebesar (89,97%) dan realisasi fisik (100%).Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 19.941.120,- yang merupakan merupakan sisa-sisa belanja akomodasi, bahan bakar minyak, alat tulis kantor, penggandaan, makan minum rapat, dan sisa uang harian perjalanan dinas.
18. Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR, dan HR Kemitraan dengan dana sebesar Rp. 558.986.800 dengan realisasi sebesar Rp. 462.096.766 atau (82,67%) dengan realisasi fisik (100%).Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 96.890.034,- merupakan sisa sisa belanja akomodasi, bahan bakar minyak, alat tulis kantor, penggandaan, makan minum rapat, dan sisa uang harian perjalanan dinas.

19. Pengembangan hutan mangrove dengan dana sebesar Rp. 108.743.500 (seratus delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi anggaran Rp. 92.253.000,- atau (84,84%) dengan realisasi fisik (95,71%).Sisa anggaran sebesar Rp. 16.490.500,- merupakan sisa-sisa belanja akomodasi, bahan bakar minyak, alat tulis kantor, penggandaan, makan minum rapat, dan sisa uang harian perjalanan dinas akibat pemakaian oleh personal dengan standar biaya yang ada dibawahnya.
20. Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan dengan dana sebesar Rp. 262.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 235.183.900,- atau (89,61%) dengan realisasi fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 27.266.100,- merupakan sisa-sisa belanja akomodasi, bahan bakar minyak, alat tulis kantor, penggandaan, makan minum rapat, dan sisa uang harian.
21. Penyiapan perhutanan sosial merupakan kegiatan dari DBH DR dengan anggaran Rp. 689.534.000,- dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 578.664.800,- atau (83,92%) dengan realisasi fisik (100%). Sisa anggaran sebesar Rp. 110.869.200,- merupakan sisa-sisa belanja akomodasi, Bahan Bakar Minyak, Alat Tulis Kantor, Penggandaan, Makan Minum Rapat, dan sisa uang harian perjalanan dinas.
22. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dengan dana sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 1.000.201.005,- (satu milyar dua ratus satu ribu lima rupiah) atau (99,03%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 9.798.995,- merupakan sisa mati berupa BBM, efisiensi penginapan, makan minum kegiatan serta sisa mati honor narasumber Pelatihan dan Workshop.
23. Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelola kelembagaan, kelola kawasan dengan dana sebesar Rp. 306.175.475,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 268.412.000,- atau (87,67%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran Rp. 37.763.475,- merupakan sisa mati berupa BBM, efisiensi penginapan, makan minum kegiatan.
24. Kegiatan Identifikasi, Sosialisasi Hutan Adat dan Penanganan Konflik Tenurial dengan dana sebesar Rp. 243.200.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp. 192.756.550,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau (79,26%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 50.443.450,- merupakan sisa mati dari anggaran BBM, efisiensi penginapan,

makan minum kegiatan dibayarkan sesuai dengan kebutuhan dinas serta sisa mati Belanja Jasa Kantor untuk kegiatan Workshop Hutan Adat.

25. Pengendalian perencanaan dan tata hutan dengan dana sebesar Rp. 446.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 349.909.450,- atau (78,46%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran Rp. 96.090.550,- merupakan sisa-sisa anggaran dari penghematan/ efisiensi dari belanja akomodasi, bahan bakar minyak, alat tulis kantor, penggandaan, makan minum rapat, dan sisa uang harian perjalanan dinas.
26. Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat dengan dana sebesar Rp. 82.452.190,- (delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah), realisasi keuangan sebesar Rp. 74.066.850,- (tujuh puluh empat juta enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau (89,83%) dengan fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 8.385.340,- merupakan sisa mati kegiatan berupa BBM, efisiensi penginapan, biaya transport Kapal di Mentawai dan makan minum kegiatan
27. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan dana sebesar Rp. 1.201.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.003.444.700,- atau (83,52%) dengan realisasi fisik (90%).Sisa anggaran sebesar Rp. 198.055.300,- dan tidak tercapainya realisasi fisik kegiatan 100 % dikarekan adanya beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan/ direalisasikan karena kegiatannya merupakan kegiatan yang bersifat situasional seperti pemadaman kebakaran hutan, groundcheck lokasi bekas kebakaran hutan.
28. Sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai ragam metode dengan dana sebesar Rp. 491.039.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 283.698.450,- atau (57,78%) dengan realisasi fisik (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 207.341.050,- merupakan efisiensi belanja penggandaan, bbm, makan minum rapat dan makan minum kegiatan, efisiensi penginapan, dan biaya transport.
29. Monitoring dan evaluasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan dengan dana Rp. 88.831.250,- dengan realisasi Rp. 8.694.750,- atau (9,79%) dengan realisasi fisik (10%).Sisa anggaran Rp. 80.136.500,- dan tidak tercapainya realisasi fisik 100% merupakan kegiatan yang bersifat situasional yang tidak dapat

direalisasikan karena tidak adanya kejadian yang membutuhkan/memerlukan kegiatan tersebut.

30. Ground check Hotspot dan/atau informasi kebakaran hutan dengan dana sebesar Rp. 61.812.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 412.500,- atau (0,67%) dengan realisasi fisik (1%). Sisa anggaran Rp. 61.400.000,- dan tidak tercapainya realisasi fisik 100% merupakan kegiatan yang bersifat situasional yang tidak dapat direalisasikan karena tidak adanya kejadian yang membutuhkan/memerlukan kegiatan tersebut.
31. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan dengan dana sebesar Rp. 271.420.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.680.850,- atau (9,83%) dengan realisasi fisik (10%). Tidak terealisasinya anggaran dan fisik kegiatan 100% dikarenakan kegiatan bersifat situasional atau kegiatan dapat dilaksanakan jika ada terjadi kejadian atau kebakaran hutan dan lahan.
32. Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain dengan dana Rp. 245.878.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 151.875.450 atau (61,77%) dengan realisasi fisik (96,97%). Tidak tercapainya realisasi fisik kegiatan dan keuangan sebesar 100% merupakan tidak dapat dilaksanakannya salah satu sub kegiatan yang ikut berdampak tidak dapat direalisasinya keuangan serta adanya efisiensi terhadap bahan bakar, makan minum kegiatan dan makan minum rapat serta penghematan belanja penggandaan.
33. Patroli terpadu bersama masyarakat dan pihak/ instansi terkait lainnya dengan dana sebesar Rp. 553.251.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 490.943.500,- atau (88,74%) dengan realisasi fisik sebesar (100 %). Sisa anggaran sebesar Rp. 62.307.750,- merupakan penghematan/efisiensi dari belanja penggandaan, bahan bakar minyak, makan minum kegiatan, makan minum rapat dan biaya penginapan.
34. Kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim dengan dana sebesar Rp. 137.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 122.343.623 atau (89,30%) dengan realisasi fisik kegiatan (100%). Sisa anggaran sebesar Rp. 14.656.387,- merupakan efisiensi/ penghematan dari belanja penggandaan, sisa BBM perjalanan dinas, sisa belanja penginapan dan sisa transportasi kegiatan.

35. Pengendalian keanekaragaman hayati dan ekosistem dengan dana sebesar Rp. 132.260.000,- terealisasi sebesar Rp. 117.117.500,- atau (88,55%) dengan realisasi fisik kegiatan (100%).Sisa Anggaran sebesar Rp. 15.142.500,- merupakan sisa mati karena adanya efesiensi biaya dalam pelaksanaan kegiatan berupa Belanja ATK sebesar Rp. 180.000,-, belanja BBM sebesar 806.300,-, dan belanja perjalanan dalam daerah dan luar daerah dengan masing-masing rincian sebesar Rp.11.990.000,- dan Rp. 2.166.200,- yang merupakan sisa penginapan dan biaya transportasi.
36. Pengukuran simpanan karbon dengan dana sebesar Rp. 328.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 283.594.256,- atau (86,46%) dengan realisasi fisik kegiatan (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 44.405.744,- merupakan efisiensi/sisa mati dari belanja penggandaan, BBM perjalanan dinas, penginapan dan makan minum kegiatan serta makan minum rapat.
37. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dengan dana sebesar Rp. 151.308.750,- yang terealisasi sebesar Rp. 129.085.219,- atau 85,31% dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.Sisa anggaran sebesar Rp. 22.223.531,- merupakan efisiensi/penghematan terhadap belanja BBM kegiatan dan penginapan.
38. Penyusun neraca sumberdaya hutan dengan dana sebesar Rp. 119.690.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 103.345.900,- atau (86,34%) dengan realisasi fisik kegiatan (100%).Sisa anggaran sebesar Rp. 16.344.100,- merupakan penghematan terhadap belanja penggandaan peta dan penginapan serta adanya BBM perjalanan dinas yang tidak dapat terealisasikan karena keterbatasan kendaraan dinas dalam pelaksanaan kegiatan.
39. Pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai dengan dana sebesar Rp. 581.330.000,- yang terealisasikan sebesarRp. 483.280.520,- atau (83,13%) dengan realisasi fisik kegiatan (100%).Sisa dana sebesar Rp. 98.049.480,- merupakan sisa-sisa anggaran dari belanja perjalanan dinas berupa penginapan dan uang harian pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan jabatan/ golongan dalam tim dan sisa pembayaran honorarium tenaga ahli untuk kegiatan.
40. Pembuatan tanamanan (DAK) dengan dana sebesar Rp. 5.271.196.992,- yang terealisasi sebesar 4.715.157.720,- atau (89,45 %) dengan realisasi kegiatan

(90,79%). Tidak tercapainya realisasi fisik dan keuangan sebesar 100% dikarenakan adanya 1 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya konflik masyarakat pada lokasi pelaksanaan kegiatan yang berimbas tidak dapat terealisasi juga keuangan dari kegiatan tersebut.

41. Pembangunan DAM Penahan dengan dana sebesar Rp. 438.613.000 terealisasi sebesar Rp. 384.089.336,- atau (87,57%) dengan realisasi fisik kegiatan (91,67%). Tidak terealisasinya fisik dan keuangan kegiatan 100% dikarenakan adanya 1 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan permasalahan lokasi kegiatan sehingga realisasi keuangan juga tidak dapat terealisasi.
42. Pembangunan sarana prasarana operasional KPH-Wisata (DAK) dengan dana sebesar Rp. 747.960.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan realisasi kegiatan (0%). Tidak terealisasinya kegiatan ini terkendala pada izin lingkungan. Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 7.315.379.750,- merupakan sisa materi kegiatan. Secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2018 dianggap berhasil meskipun ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya terlambat oleh faktor teknis diluar kontrol perencanaan, namun dengan upaya, strategi, dan peningkatan koordinasi yang dijalankan oleh jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, kendala dan hambatan dapat dicarikan jalan pemecahannya.

BAB IV. PENUTUP

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat merupakan instansi Pemerintah yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan amanah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2018. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategis.

Perbaikan sistem AKIP yang telah dilakukan terhadap lima komponen sistem AKIP adalah:

1. Perencanaan Kinerja

- Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen Renstra dengan menyesuaikan dokumen revisi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan revisi RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2019.
- Pemutakhiran Sistem Operasional Prosedur (SOP) sesuai hasil evaluasi SOP yang dilakukan oleh auditor internal Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan auditor eksternal.

2. Pengukuran Kinerja

Perbaikan dalam pengukuran kinerja difokuskan terutama pada perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja dengan melakukan monitoring dan evaluasi indikator kinerja setiap 3 bulan sekali.

3. Pelaporan Kinerja

- Perbaikan dalam pelaporan kinerja yang utama adalah dengan menyusun laporan realisasi kinerja dan anggaran bulanan APBD dan APBN tepat pada waktunya sebagai dasar untuk menyusun Laporan Kinerja tahunan.

- Sebelum menyusun laporan bulanan APBD dan APBN dilakukan rekonsiliasi data realisasi keuangan antara Subbag Keuangan dan Subbag Program Anggaran sehingga data realisasi keuangan dalam laporan bulanan APBD dan APBN sama dengan data realisasi keuangan dalam LRA.
 - Melalui Nota Dinas Kepala Dinas meminta untuk seluruh unit kerja menyusun Laporan Kinerja.
4. Evaluasi Kinerja
- Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal dalam bentuk rapat monev bulanan, audit internal, tinjauan manajemen, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.
 - Melakukan expose kinerja oleh masing-masing eselon III yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
 - Melakukan *reward* dan *punishment* terkait kinerja setiap unit kerja.
5. Capaian Kinerja
- Perbaikan capaian kinerja dilakukan melalui penuntasan tindak lanjut hasil audit/evaluasi Inspektorat tahun sebelumnya agar tidak berulang kembali di tahun 2019.

Seluruh rencana capaian kinerja Tahun 2018 secara substansi dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, walaupun ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya kurang tepat waktu (terlambat) oleh beberapa faktor teknis dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat diminimalisir seluruh kendala dan hambatan sehingga mendapatkan solusi pemecahannya. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* bidang kehutanan sebagai bagian integral dari pembangunan kehutanan itu sendiri, seperti terlihat pada Tabel 57.

Tabel 57. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran	Jumlah IKU	Capaian Sasaran (%)
<i>Sasaran 1</i>	3	102.11
<i>Sasaran 2</i>	3	161.65
<i>Sasaran 3</i>	1	142.29
<i>Sasaran 4</i>	2	99.67
Rata-rata	9	126.43

Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih adanya konflik kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan secara operasional masih terkendala dengan peta dasar yang tersedia, masih ada tumpang tindih dan *non prosedural* perizinan.
2. Lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran di bidang kebakaran hutan dan lahan.
3. Hotspot banyak terdapat di luar kawasan hutan namun upaya instansi terkait di daerah dalam pengendalian kebakaran lahan masih kurang.
4. Kurangnya tenaga yang memiliki keahlian dalam fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan Pengembangan perhutanan sosial/pemberdayaan masyarakat.
5. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan.
6. Pengesahan DBH-DR pada bulan Agustus 2018 menyebabkan tidak tercapainya realisasi anggaran Tahun 2018 sesuai target kinerja.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain:

1. Melakukan identifikasi konflik tenurial, melakukan identifikasi, monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar kehutanan di Kab/Kota;
2. Peningkatan peran dan kerjasama dalam peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan seperti: apel siaga, sosialisasi, dan lain-lain.
3. Melengkapi MPA dan kelompok tani pengamanan swadaya dengan sarpras pemadam kebakaran.

4. Mengupayakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Instansi/lembaga terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat serta mengoptimalkan pemberdayaan penyuluh kehutanan yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan kinerja perhutanan sosial.
5. Melakukan percepatan pengukuhan UPTD KPH lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
6. Melakukan upaya percepatan pelaksanaan penggunaan DBH- DR sesuai aturan yang berlaku.

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada jenjang institusi yang lebih tinggi dan *stakeholders* yang berkepentingan serta dapat menambah data/informasi penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut terutama dalam Pembangunan Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat.

Lampiran